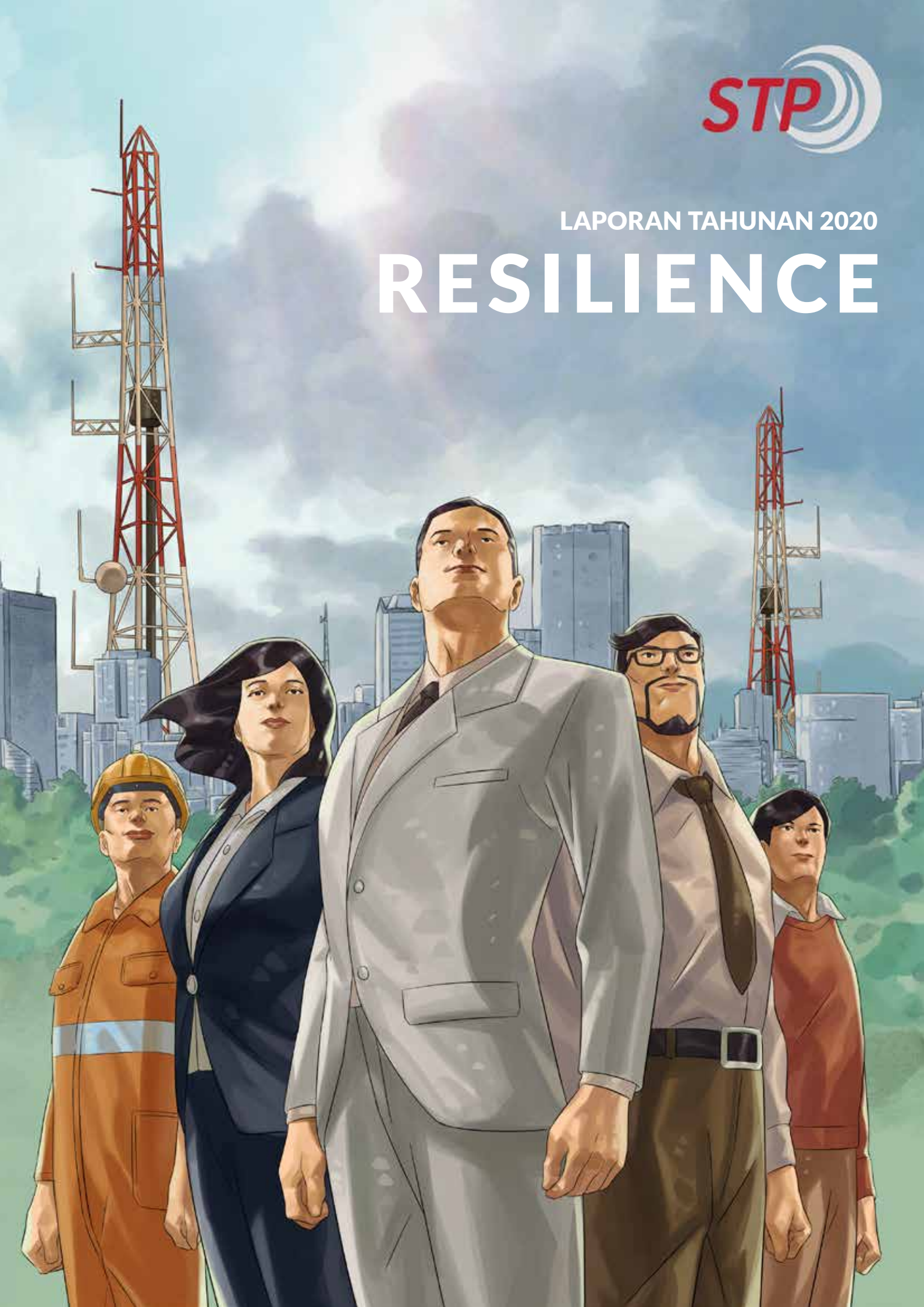




LAPORAN TAHUNAN 2020

RESILIENCE



STP DALAM ANGKA



2020	1.922,2
2019	1.767,0
2018	1.899,8



2020	1.602,3
2019	1.478,0
2018	1.637,7



2020	6.422
2019	6.384
2018	6.412



2020	12.145
2019	11.154
2018	10.492

FOKUS 2020

Melalui tema “*Resilience*” (Ketahanan), PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (Perseroan) menunjukkan kegigihannya dalam bertahan di tengah tantangan sembari tetap mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Di tahun 2020, perkembangan industri yang terdampak pandemi Covid-19 justru semakin mendorong kebutuhan akan konektivitas yang dapat diandalkan yang pada akhirnya turut berdampak positif pada pencapaian pertumbuhan penyewaan bersih Perseroan menjadi 12.145 atau tumbuh 8,9% dari tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan juga membukukan pendapatan sebesar Rp1.922,2 miliar, laba tahun berjalan sebesar Rp708,8 miliar, aset sebesar Rp12.044,7 miliar, liabilitas sebesar Rp8.397,9 miliar, dan ekuitas sebesar Rp3.646,8 miliar.

Meski di tengah pandemi, Perseroan senantiasa berinovasi dan meningkatkan bakat untuk mengantisipasi peluang yang dijanjikan industri ini. Pencapaian ini tentunya akan menjadi landasan yang kuat bagi Perseroan dalam menghadapi tantangan di tahun mendatang dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Daftar Isi

BAB 01\\

Ikhtisar Kinerja Penting

Ikhtisar Kinerja Penting	8
Kinerja Saham	10

BAB 02\\

Laporan Kepada Pemegang Saham

Laporan Dewan Komisaris	14
Profil Dewan Komisaris	18
Laporan Direksi	22
Profil Direksi	25

BAB 03\\

Profil Perusahaan

Profil Perusahaan	32
Tentang STP	33
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Inti Perusahaan	34
Kegiatan Usaha	35
Tonggak Sejarah	36
Struktur Organisasi	38
Struktur Grup Perusahaan	40
Sumber Daya Manusia	42
Teknologi Informasi	48
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham	48
Kronologi Pencatatan Saham	49
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya	49
Informasi tentang Entitas Anak	50
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	52
Penghargaan & Sertifikasi	54



BAB 04\\

Analisis & Pembahasan Manajemen

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	58
Kinerja Keuangan	60
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang	66
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal	67
Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal	67
Investasi Barang Modal	67
Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku dan Realisasinya serta Proyeksi Tahun Mendatang	68
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	68
Prospek Usaha Perusahaan	68
Aspek Pemasaran	69
Kebijakan Dividen	70
Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum	71
Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	72
Perubahan Peraturan Perundang-undangan	72
Perubahan Kebijakan Akuntansi	72
Informasi Kelangsungan Usaha	73

BAB 05\\

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan	76
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	79
Dewan Komisaris	83
Direksi	88
Komite Audit	94
Sekretaris Perusahaan	99
Audit Internal	100
Audit Eksternal	102
Manajemen Risiko	103
Sistem Pengendalian Internal	104
Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan	104
Pedoman Perilaku Perusahaan	105
Benturan Kepentingan	106
Whistleblowing System	106
Akses Informasi dan Data Perseroan kepada Publik	107
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	108
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	109

BAB 06\\

Laporan Keuangan Konsolidasian



01

IKHTISAR KINERJA PENTING



Ikhtisar Kinerja Penting

Ikhtisar Operasional

Portofolio Aset Strategis	2020	2019	2018*
Site Portofolio Tower			
Jumlah Site Menara	6.422	6.384	6.412
Site Portofolio Non-Tower			
Site Indoor DAS**	38	38	37
Jaringan Kabel Serat Optik (km)	6.277	3.382	3.000
Penyewaan Site Menara	12.145	11.154	10.492
Rasio Penyewaan Menara	1,89x	1,75x	1,64x
Penyewaan Portofolio Non-Tower			
Site Indoor DAS	57	68	54

*) Per akhir 2018, menara dan penyewaan di mana PT First Media Tbk/PT Internux tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan

**) Dihitung berdasarkan jumlah bangunan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2020	2019	2018
Kas dan Bank	237,2	361,5	147,0
Aset Lancar Lainnya	1.207,0	1.403,1	1.926,5
Jumlah Aset Lancar	1.444,2	1.764,6	2.073,5
Aset Tidak Lancar	10.600,5	9.400,2	9.597,0
Jumlah Aset	12.044,7	11.164,8	11.670,5
Liabilitas Jangka Pendek	1.721,0	1.567,0	1.536,2
Liabilitas Jangka Panjang	6.676,9	6.624,3	7.164,3
Jumlah Liabilitas	8.397,9	8.191,3	8.700,5
Jumlah Ekuitas	3.646,8	2.973,5	2.970,0
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.044,7	11.164,8	11.670,5

(dalam miliar Rupiah)

Laporan Laba Rugi Konsolidasian	2020	2019	2018
Pendapatan	1.922,2	1.767,0	1.899,8
Beban Pokok Pendapatan	582,7	492,1	478,7
Laba Bruto	1.339,5	1.274,9	1.421,1
Beban Usaha	208,3	189,1	166,8
Laba Usaha	1.131,2	1.085,8	1.254,3
Beban Lain-lain - Bersih	412,6	843,9	2.456,7
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	718,6	241,9	(1.202,4)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(9,8)	(13,5)	(21,5)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	708,8	228,4	(1.223,8)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	673,3	3,6	(1.123,5)
EBITDA*	1.602,3	1.478,0	1.637,7

*) EBITDA = Laba Usaha + Penyusutan dan Amortisasi

Rasio Keuangan	2020	2019	2018
Laba Bruto terhadap Pendapatan Usaha	69,7%	72,1%	74,8%
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha	58,8%	61,4%	66,0%
EBITDA terhadap Pendapatan Usaha	83,4%	83,6%	86,2%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Usaha	36,9%	12,9%	(64,4%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Usaha	35,0%	0,2%	(59,1%)
Rasio Lancar (x)	0,8	1,1	1,3
Rasio Pinjaman* terhadap Ekuitas (x)	1,9	2,4	2,5
Rasio Pinjaman* terhadap Jumlah Aset (x)	0,6	0,6	0,6
Pinjaman Bersih** terhadap LQA EBITDA*** (x)	4,0	4,3	4,6

*) Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman.

**) Pinjaman Bersih = Pinjaman (Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman) - Kas dan Setara Kas.

***) LQA EBITDA = EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan.

Kinerja Saham

2020						
Kuartal	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)	Kapitalisasi Pasar (Juta Rp)	Volume Perdagangan (Ribu Saham)	Nilai Perdagangan (Juta Rp)
I	4.000	2.800	4.000	4.550.319	1.200	4,5
II	4.850	2.800	4.850	5.517.262	300	1,4
III	4.850	3.380	3.450	3.924.650	1.600	6,5
IV	4.850	3.380	4.100	4.664.077	800	3,1

2019						
Kuartal	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)	Kapitalisasi Pasar (Juta Rp)	Volume Perdagangan (Ribu Saham)	Nilai Perdagangan (Juta Rp)
I	6.800	6.800	6.800	7.735.000	-	-
II	6.800	6.800	6.800	7.735.000	-	-
III	6.800	3.100	4.400	5.005.000	6	26
IV	4.280	1.270	3.280	3.731.000	20	59

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

02

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM



Laporan Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Semoga berkah dan rahmat-Nya selalu dilimpahkan untuk kita semua. Dewan Komisaris dengan berbangga hati mengungkapkan bahwa di tahun 2020 Perseroan berhasil melalui tantangan yang berat dan tetap membukukan pencapaian kinerja yang kuat. Merupakan kehormatan bagi saya, mewakili Dewan Komisaris, untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. untuk tahun buku 2020.

Menjaga Kinerja yang Baik di tengah Pandemi Covid-19

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang seiring dengan pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun. Namun demikian, Perseroan tetap berhasil membukukan pertumbuhan sewa yang sehat dengan total penyewaan yang tumbuh 8,9% menjadi 12.145 per Desember 2020 dari 11.154 per Desember 2019. Pencapaian tersebut mencatatkan pertumbuhan organik paling tinggi selama sejarah Perseroan. Kami yakin pencapaian ini didukung oleh hubungan yang kami jalin dengan baik dengan operator telekomunikasi terkemuka sehingga kami diberikan kepercayaan sebagai mitra pilihan untuk mengiringi mereka dalam perluasan jaringan. Pencapaian positif pada penyewaan menara juga tercermin pada kinerja keuangan tahun 2020, di mana pendapatan Perseroan naik 8,8% menjadi Rp1.922 miliar di tahun 2020 dibandingkan Rp1.767 miliar pada tahun sebelumnya. Kami meyakini bahwa kerja keras yang telah kami lakukan dari tahun

sebelumnya turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2020 dan menjadi landasan yang baik untuk tahun-tahun selanjutnya.

Terlepas dari tantangan pandemi yang masih menghadang, kami tetap optimis terhadap prospek Perseroan. Kami berharap industri telekomunikasi Indonesia akan melanjutkan momentum pertumbuhannya seiring dengan fokus pemerintah yang memprioritaskan digitalisasi nasional dan pembangunan infrastruktur, perluasan jaringan yang berkelanjutan dan densifikasi oleh operator telekomunikasi, serta pertumbuhan konsumsi data yang sehat.

Kami meyakini bahwa keberadaan pandemi Covid-19 akan semakin mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan telekomunikasi dan konsumsi data. Dengan didukung oleh Direksi yang berwawasan ke depan dan kompeten dalam memimpin Perseroan, kami yakin bahwa Perseroan akan meraih manfaat besar dari faktor-faktor pendorong tersebut.

Tata Kelola Perusahaan

Berbekal dukungan dari Komite Audit, kami mengawasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di semua tingkatan manajemen Perseroan. Kami berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam hal transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan dalam kegiatan operasional harian kami untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kami berharap industri telekomunikasi Indonesia akan melanjutkan momentum pertumbuhannya seiring dengan fokus pemerintah yang memprioritaskan digitalisasi nasional dan pembangunan infrastruktur, perluasan jaringan yang berkelanjutan dan densifikasi oleh operator telekomunikasi, serta pertumbuhan konsumsi data yang sehat.

Jeffrey Yuwono
Komisaris Utama



Selain itu, kami juga menjalankan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Perseroan sepanjang tahun. Meski di tengah pandemi, kami tetap menyelenggarakan rapat bersama secara rutin dengan Direksi untuk memberikan rekomendasi tentang inisiatif strategis, risiko dan peluang, serta wawasan tentang pengembangan strategi untuk tahun 2021 dan seterusnya, serta memastikan bahwa Perseroan menjalankan bisnisnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan mekanisme tata kelola yang baik, Perseroan juga telah memiliki kebijakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*). Pada kesempatan ini kami dengan senang hati mengungkapkan bahwa tidak ada laporan pelanggaran yang diterima selama 2020.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Direksi

Dewan Komisaris secara ketat mengawasi perumusan dan pelaksanaan strategi Perseroan oleh Direksi. Hal ini sejalan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar Perseroan, serta pedoman Perseroan.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk penilaian berkala atas kinerja Perseroan sepanjang tahun.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh dua komite, yakni Komite Audit serta Komite Remunerasi & Nominasi. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa kedua komite telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan membangun pengendalian internal yang kuat. Pengendalian tersebut memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memantau kinerja Perseroan, serta untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal.

Komite Remunerasi & Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam penerapan kebijakan GCG, penyempurnaan struktur organisasi, dan nominasi untuk posisi-posisi kunci di dalam Perseroan. Komite Remunerasi & Nominasi juga mengusulkan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham, serta mengkaji strategi pengembangan bakat Perseroan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan peran komite-komite ini untuk memastikan penerapan standar tata kelola yang baik di seluruh operasional Perseroan.

Perubahan pada Komposisi Dewan Komisaris

Di tahun 2020 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya atas segala kontribusi dan kerja keras beliau selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu, kami juga menyambut dengan baik bergabungnya Bapak Harry M. Zen ke dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan 22 Juli 2020.

Seiring dengan perubahan tersebut, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Bapak Jeffrey Yuwono sebagai Komisaris Utama
- Bapak Ludwig Indrawan sebagai Wakil Komisaris Utama
- Bapak Thong Thong Sennelius sebagai Komisaris
- Bapak Muhamad Senang Sembiring sebagai Komisaris Independen
- Bapak Harry M. Zen sebagai Komisaris Independen

Apresiasi Kami

Apresiasi terdalam kami tujukan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaannya, serta kepada Direksi, karyawan, dan mitra bisnis atas dukungan yang sangat besar. Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan dukungan dari para pemangku kepentingannya, Perseroan dapat terus tumbuh.

Atas nama Dewan Komisaris,



Jeffrey Yuwono
Komisaris Utama

Profil Dewan Komisaris

Jeffrey Yuwono

Komisaris Utama

Usia

41 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 15 Mei 2019
- RUPS 22 Juli 2020

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Bachelor of Arts Economics dari Duke University (1998-2002)
- Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Stanford University (2005-2007)

Riwayat Jabatan

- Associate Consultant di Marakon Associates, Singapore (2002-2005)
- Product Manager, Windows di Microsoft, Redmond, Washington (2006)
- Founder dan CEO di Playtiva, Singapore (2007-2009)
- Co-Founder dan CEO di TCCG, Singapore (2009-2015)
- Co-Founder dan CEO di Sorabel by Sale Stock, Jakarta (2016-2020)
- CEO di Gtech Indonesia (2021-sekarang)
- Komisaris Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2019-sekarang)



Ludwig Indrawan

Wakil Komisaris Utama

Usia

67 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017
- RUPS 22 Juli 2020

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar CAR dari Prahan (Victoria) College, Melbourne (1976)

Riwayat Jabatan

- Memulai karier di Challick Pte Ltd, Singapura (1978-1982)
- Menjalankan pengembangan bisnis properti di Selandia Baru dan Australia di bawah bendera Stags Leap dan Smart Homes Group (1992-2007)
- Managing Director di PT Smart Homes Anugrah, Surabaya (2007-sekarang)
- Wakil Komisaris Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2013-sekarang)



Thong Thong Sennelius

Komisaris

Usia

49 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017
- RUPS 22 Juli 2020

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, Jakarta (1994)
- Memperoleh gelar Master of Business dari Harvard University (1997)

Riwayat Jabatan

- Vice President Morgan Stanley, New York dan Singapura (1997-2002)
- Direktur Synergy Capital Partners, Jakarta (2002-2005)
- Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2006-2011)
- Komisaris PT Sekawan Abadi Prima (2006-sekarang)
- Direktur PT Jaring Lintas Indonesia (2006-sekarang)
- Komisaris PT Ciptadana Multifinance (2009-2014)
- Direktur PT Ciptadana Capital (2009-sekarang)
- Komisaris PT Ciptadana Asset Management (2015-sekarang)
- Komisaris PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2011-sekarang)



Muhamad Senang Sembiring

Komisaris Independen

Usia

69 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017
- RUPS 22 Juli 2020



Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (1996)
- Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (1999)

Riwayat Jabatan

- Camp-Field Manager PT Aqmar Services (1976-1986)
- Direktur Marketing PT Indotrin Hung Yuang Securities (1988-1990)
- Manajer bidang Pasar Modal PT Bank Pelita (1990-1991)
- Direktur Marketing PT Arya Prada Sekuritas (1991-1995)
- Ketua Delegasi Indonesia, The 2nd Asia Securities Forum, Seoul, Korea Selatan (1996)
- Ketua Delegasi Indonesia, The 6th Asia Securities Forum, Tokyo, Jepang (2000)
- Direktur Marketing PT Indomitra Sekuritas (1995-2000)
- Salah Satu Pendiri, Sekretaris Jenderal, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) (1995-2002)
- Presiden Direktur PT Indomitra Sekuritas (2000-2002)
- Direktur Perdagangan, Keanggotaan PT Bursa Efek Jakarta, PT Bursa Efek Indonesia (2002-2009)
- Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) (2009-2018)
- Komisaris Independen PT Rukun Raharja Tbk (2010-2019)
- Komisaris Utama/Independen PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega Karsa Mandiri (2011-2017)
- President di Asia Pacific Conservation Trust Fund / APNET (2017- Januari 2020)
- Komisaris Independen PT CGS CIMB Securities (2018-sekarang)
- Senior Advisor Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) (2018-sekarang)
- Komisaris Utama Independen PT Rukun Raharja Tbk (2019-sekarang)
- Komisaris Independen PT Repoer Tbk (2019-sekarang)
- Komisaris Independen PT Putra Rajawali Kencana Tbk (2019-sekarang)
- Komisaris Independen PT Delameta Bilano Tbk (Desember 2020-sekarang)
- Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2011-sekarang)

Harry M. Zen

Komisaris Independen

Usia

52 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Juli 2020



Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana Teknik Metalurgi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta (1993)
- Memperoleh gelar MBA di Corporate Finance and Financial Institutions & Market dari the State University of New York, Buffalo (1996)

Riwayat Jabatan

- Assistant Vice President Citibank Global Corporate Banking (1996-2001)
- Co-Head Investment Banking Bahana Securities (2001-2007)
- Direktur Barclays Capital (2007-2008)
- President Director Credit Suisse Securities Indonesia (2008-2015)
- Direktur Keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2016-2020)
- Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) (2016-2020)
- Komisaris Utama PT Graha Sarana Duta (2016-2020)
- Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu Energi (2020-sekarang)
- Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2020-sekarang)

Laporan Direksi

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Atas nama Direksi, dengan berbangga hati saya menyampaikan Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. dan pencapaian untuk tahun 2020.

Mendorong Pertumbuhan, Menghadapi Tantangan

Di tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda dunia dan mengubah semua aspek hidup kita. Tidak terkecuali di Indonesia di mana pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang tentunya juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan juga laju operasional bisnis di seluruh industri. Namun demikian, pergeseran budaya kerja dari *Work from Office* (WFO) menjadi *Work from Home* (WFH) ternyata mendorong kebutuhan akan konektivitas yang dapat diandalkan menjadi salah satu kebutuhan utama di tengah pandemi. Sehingga, hal ini mendorong industri telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya menjadi semakin dibutuhkan dan dituntut untuk dapat memberikan yang terbaik.

Terlepas dari situasi pandemi, tahun 2020 memang ditargetkan menjadi tahun yang lebih baik bagi industri telekomunikasi di banding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sehubungan dengan kondisi para operator telekomunikasi yang lebih stabil usai berakhirnya tren perang tarif yang marak di beberapa tahun terakhir. Di dua tahun terakhir ini, para operator telekomunikasi mulai fokus melakukan *roll-out* dan hal ini tentunya berdampak positif pada industri infrastruktur telekomunikasi terutama bagi penyedia

menara seperti kami. Seiring dengan adanya pandemi para operator tersebut justru semakin mendorong Perseroan untuk melakukan *roll-out* lebih cepat.

Mendorong Optimisme di Era Normal Baru

Seiring dengan perkembangan industri yang positif Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan sewa yang kuat dan termasuk pencapaian penambahan sewa organik tertinggi yang Perseroan pernah capai. Adapun pertumbuhan penyewaan bersih Perseroan mencapai 8,9% dari 11.154 per Desember 2019 menjadi 12.145 per Desember 2020.

Sejalan dengan kinerja operasional yang baik tersebut, Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 8,8% menjadi Rp1.922,2 miliar di 2020 dari Rp1.767,0 miliar di 2019. Pencapaian tersebut sejalan dengan kebijakan strategis Perseroan yang difokuskan pada peningkatan *tenancy ratio* dengan memaksimalkan aset Perseroan.

Salah satu tantangan terbesar Perseroan di sepanjang tahun 2020 adalah menjalankan aktivitas operasional sebaik mungkin dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang harus kami jaga dengan baik. Oleh karena itu, kami juga menerapkan beberapa kebijakan strategis terkait kegiatan operasional yang berlandaskan kepada penerapan protokol kesehatan untuk senantiasa menjaga kesehatan karyawan Perseroan.

Seiring dengan perkembangan industri yang positif, Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan sewa yang kuat, dan termasuk pencapaian penambahan sewa organik tertinggi yang perseroan pernah capai.

Nobel Tanihaha
Direktur Utama



Meskipun di tengah pandemi, kami meyakini bahwa prospek perkembangan industri telekomunikasi di masa depan akan semakin membaik. Kami senantiasa mempertahankan hubungan yang erat untuk mempertahankan peran kami sebagai mitra pilihan untuk *roll-out* jaringan mereka. Kami juga secara konsisten berinvestasi dalam layanan jaringan data untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi data dan digitalisasi ekonomi Indonesia, terutama seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi data di tengah pandemi. Selain itu, kami senantiasa berinovasi dan meningkatkan bakat kami untuk mengantisipasi peluang yang dijanjikan industri ini. Dengan inisiatif ini, kami optimis bahwa Perseroan memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan peningkatan industri telekomunikasi Indonesia di era *New Normal*.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah nilai inti yang tertanam di seluruh operasional Perseroan. Kami percaya bahwa dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan/keadilan secara konsisten dalam setiap proses bisnis, kami akan meraih kinerja yang baik dan terus menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan kami.

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perusahaan didasarkan pada pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kami juga telah meningkatkan tata kelola kami dengan menerapkan kebijakan anti korupsi di seluruh Perseroan dan memperkuat fungsi audit internal kami.

Perubahan Komposisi Direksi

Di tahun 2020 terdapat perubahan susunan Direksi seiring dengan pengunduran diri Tommy Gustavi Utomo selaku Direktur Independen. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya atas segala kontribusi dan kerja keras beliau selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selain itu, kami juga menyambut dengan baik bergabungnya Ibu Tjhin Khe Mei sebagai anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan 22 Juli 2020.

Seiring dengan perubahan tersebut, komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Bapak Nobel Tanihaha sebagai Direktur Utama
- Ibu Juliawati Gunawan sebagai Direktur
- Ibu Tjhin Khe Mei sebagai Direktur

Penutup

Atas nama Direksi, apresiasi terdalam kami tujukan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan, dan mitra bisnis Perseroan atas kepercayaan dan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Dewan Komisaris, komite terkait, dan setiap karyawan yang tanpa lelah berkontribusi pada pertumbuhan Perseroan di tengah pandemi ini. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kami kepada pemerintah, pihak regulator, dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mewujudkan Perseroan menjadi warga korporasi yang terhormat dalam perjalanan kami mewujudkan visi untuk menciptakan nilai dan perbedaan.

Atas nama Direksi,



Nobel Tanihaha
Direktur Utama

Profil Direksi

Nobel Tanihaha

Direktur Utama

Usia

46 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017
- RUPS 22 Juli 2020

Ruang Lingkup Penugasan

Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Southern California (1996)

Riwayat Jabatan

- Direktur Vikay Group yang bergerak di bidang properti (1997-2000)
- Direktur PT Sekawan Abadi Prima (2006-sekarang)
- Direktur PT Jaring Lintas Indonesia (2006-sekarang)
- Direktur PT Kharisma Agung Grahanusa (2007-sekarang)
- Direktur Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2006-sekarang)



Juliawati Gunawan

Direktur

Usia

50 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Mei 2014
- RUPS 29 Mei 2015
- RUPS 23 Mei 2017
- RUPS 22 Juli 2020



Ruang Lingkup Penugasan

Bertanggung jawab atas bidang keuangan

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara (1993)

Riwayat Jabatan

- Auditor dan Konsultan di Prasetio, Utomo & Co (Andersen Worldwide Indonesia) dan Ernst & Young Indonesia (1992-2003)
- Financial Controller PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2009-Juni 2011)
- Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (Juni 2011-sekarang)

Tjhin Khe Mei

Direktur

Usia

56 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

- RUPS 22 Juli 2020



Ruang Lingkup Penugasan

Bertanggung jawab atas bidang operasional

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana Science of Accountancy dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (1987)

Riwayat Jabatan

- Memulai karier di Lippo Group dengan posisi terakhir sebagai Associate Director of Property Sales Administration and Service Division di PT Lippo Karawaci Tbk (1989-2014)
- Presiden Direktur di PT Asiatic Sejahtera Finance (2015-2017)
- Chief Operating Officer di PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2017-sekarang)
- Direktur di PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2020-sekarang)

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Tahunan 2020

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang
Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

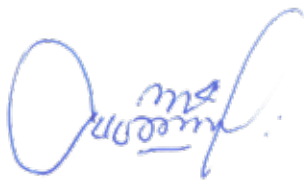
Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. tahun 2020 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Jakarta, 07 Mei 2021

Dewan Komisaris



Jeffrey Yuwono
Komisaris Utama



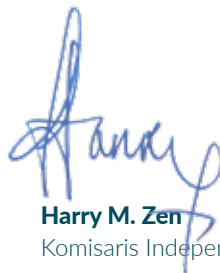
Ludwig Indrawan
Wakil Komisaris Utama



Thong Thong Sennelius
Komisaris



Muhamad Senang Sembiring
Komisaris Independen



Harry M. Zen
Komisaris Independen

Direksi

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nobel Tanihaha
Direktur Utama

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a smaller, more intricate mark on the right.

Juliawati Gunawan
Direktur

A handwritten signature in blue ink, with a large, sweeping loop on the left and a smaller, more intricate mark on the right.

Tjhin Khe Mei
Direktur

03

PROFIL PERUSAHAAN



Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Bidang Usaha Utama	PT Solusi Tunas Pratama Tbk. bergerak di bidang usaha penyediaan layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.
Status Perusahaan	Perusahaan Terbuka
Tanggal Pendirian	27 September 2006
Landasan Hukum Pendirian	- Akta Pendirian No.5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. - SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006. - Tanda Daftar Perusahaan No.090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Pusat di bawah No.1187/BH.09.05/v/2007 tanggal 16 Mei 2007. - Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No.73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.
Kode Saham	SUPR
Bursa Saham	Bursa Efek Indonesia
Modal Dasar	2.000.000.000 lembar saham atau setara dengan Rp200.000.000.000
Modal Ditempatkan & Modal Disetor	Rp113.757.969.800 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
Hubungan Investor	Telepon : +62 21 5794 0688 Faksimili : +62 21 5795 0077 E-mail : corporate.secretary@stptower.com
Alamat Lengkap	
Kantor Pusat	Rukan Permata Senayan Blok C01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia Kontak Kami Telepon : +62 21 57940688 Faksimili : +62 21 57950077 Layanan pelanggan 24 jam: 0-800-140-1380 (bebas biaya) E-mail : corporate.secretary@stptower.com Situs : www.stptower.com
Kantor Perwakilan	Kantor Perwakilan Bandung Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracondong Bandung 40275 Telepon : +62 22 733 3328 Faksimili : +62 22 733 3329
	Kantor Perwakilan Medan Komplek Centrium No. 53 Jl. Brigjen Katamso Medan 20151 Telepon : +62 61 8881 6041 Faksimili : +62 61 8881 5874
	Kantor Perwakilan Surabaya Ruko Darmo Square B10 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya Telepon : +62 31 567 7996 Faksimili : +62 31 567 9006

Tentang STP

PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (selanjutnya disebut sebagai Perseroan) didirikan pada tahun 2006 dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia dari segi jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki. Awalnya bisnis inti Perseroan fokus pada penyewaan menara telekomunikasi untuk penempatan antena dan perangkat pendukung lain kepada operator telekomunikasi, yang dikenal dengan *base transceiver station* (BTS) dengan skema perjanjian kontrak sewa jangka panjang yang rata-rata berjangka waktu sekitar 10 tahun.

Saat ini, Perseroan sudah memperluas layanan infrastruktur dengan menambah penyediaan layanan akses terhadap kapasitas *backhaul* serat optik dan juga jaringan *indoor distributed antenna system* (DAS) di berbagai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran yang terletak di kota-kota besar. Langkah strategis Perseroan tersebut dilakukan sejalan dengan proses transformasi Perseroan yang sudah dimulai sejak tahun 2012 untuk menjadi perusahaan penyedia layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa penyewaan menara dan penyediaan kapasitas *backhaul* serat optik sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia karena sejalan dengan misi operator telekomunikasi yang berupaya memenuhi permintaan yang terus meningkat akan kapasitas dan cakupan jaringan, namun sekaligus harus mengendalikan anggaran belanja modal mereka. Perseroan juga percaya bahwa permintaan terhadap kapasitas jaringan serat optik akan tetap bertumbuh sebagai hasil dari permintaan layanan data yang akan terus meningkat.

Perseroan telah memiliki aset menara telekomunikasi di seluruh 34 provinsi di Indonesia di mana sebesar 87% aset menara telekomunikasi Perseroan terletak di Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia.

Per 31 Desember 2020, Perseroan tercatat memiliki 6.422 menara dengan 12.145 penyewaan dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,89x. Selain itu, Perseroan juga memiliki 38 jaringan *Indoor DAS* serta mengoperasikan 6,277 km panjang jaringan kabel serat optik di seluruh Indonesia, termasuk yang melalui kerja sama dengan PT Indonesia Comnets Plus.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Inti Perusahaan

Visi

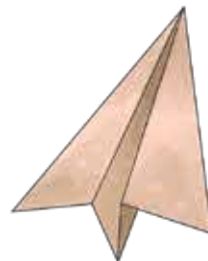


Menciptakan nilai dan perbedaan.



Mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi, kualitas dan komitmen.

Misi



Budaya Kerja

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, Manajemen mengimbau seluruh insan Perseroan untuk selalu menanamkan tata nilai inti Perseroan serta menerapkan budaya kerja yang dinamis dan inovatif dengan mengutamakan hasil pencapaian atau kinerja (*result oriented*) dari masing-masing individu yang tentunya menentukan kinerja tim secara kolaboratif.

Nilai-Nilai Inti Perseroan

	Terpercaya	Dinamis	Menyenangkan	Inovatif	Kerja Sama Tim
Nilai Inti Perusahaan	Kita dapat diandalkan dan dipercaya dalam pikiran, perkataan, dan tindakan.	Kita terbuka kepada perubahan; bertindak dengan antusias dan percaya diri.	Kami menciptakan suasana menyenangkan di pekerjaan kami.	Kita berinisiatif untuk selalu kreatif dalam mencari solusi paling efektif dalam segala yang kita lakukan.	Kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memiliki satu visi dan mencapai tujuan yang sama.
Indikator Perilaku	• Loyal. • Berkomitmen. • Jujur. • Kompeten. • Rasa Memiliki.	• Berpikir cepat dan bertindak cermat. • Percaya diri. • Proaktif dan <i>self-driven</i>. • Beradaptasi.	• Membuat orang lain senang. • Bekerja dengan semangat. • Berpikir positif. • <i>Work-life balance</i>.	• Fokus pada solusi. • Perbaikan berkesinambungan. • Berani berbeda. • Berpikir ke depan.	• Komunikasi yang efektif. • Menghormati, mendukung dan mempercayai satu sama lain. • <i>Sense of belonging</i>. • Ingin berbagi. • Kontribusi positif.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan yaitu pengelolaan dan penyewaan bangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, Perseroan melaksanakan pengelolaan dan penyewaan menara dan sarana penunjang atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak.

Tonggak Sejarah

2006

Perseroan berdiri pada tanggal 27 September 2006 dengan nama PT Solusi Pratama Tbk.

2007

Mengakuisisi 528 menara telekomunikasi dalam konstruksi yang kemudian disewakan secara tidak langsung kepada PT Axis Telecom.

2008

- Mulai beroperasi secara komersial.
- Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (*Master Lease Agreement/ MLA*) dengan PT Bakrie Telecom Tbk.

2009

- Mengakuisisi 543 portofolio menara dari PT Bakrie Telecom Tbk.
- Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (MLA) dengan PT Indosat Tbk, PT Smart Telecom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler.

2010

Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (MLA) dengan PT Axis Telekom Indonesia, PT XL Axiata Tbk (XL), PT First Media Tbk, dan PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications).

2011

- Memperoleh pinjaman sindikasi dengan jumlah keseluruhan fasilitas berjumlah Rp1,08 triliun.
- Melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 100 juta saham baru dengan harga Rp3.400 per saham. Jumlah keseluruhan perolehan dana (sebelum dikurangi harga emisi) berjumlah Rp340 miliar.
- Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2011.
- Mengakuisisi 100% penyertaan saham dalam PT Sarana Inti Persada, sebuah perusahaan penyedia menara independen di Bandung.

2012

- Berekspansi dalam bisnis jaringan kabel serat optik dan *microcell pole* (*Outdoor DAS*).

Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas I sejumlah 135 juta saham baru seharga Rp4.800 per saham dengan 59,4 juta waran yang melekat pada saham baru tersebut. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi harga emisi) dari penerbitan saham baru dan konversi waran adalah sebesar Rp933 miliar.

- Mengakuisisi 521 menara telekomunikasi dari PT Hutchison 3 Indonesia dan dari perusahaan penyedia menara independen.

2013

- Berekspansi dalam bisnis *Indoor Distributed Antenna System (Indoor DAS)*.
- Memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dengan keseluruhan fasilitas berjumlah US\$192,5 juta dan Rp1,3 triliun, yang sebagian digunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi sebelumnya yang diperoleh tahun 2011 dan sisanya untuk pengembangan barang modal dan modal kerja.

2014

- Perseroan mengakuisisi 3.500 menara telekomunikasi dari PT XL Axiata dan 142 menara telekomunikasi dari perusahaan menara independen.
- Pada 19 Desember, Perseroan mendapat Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Perseroan.

2015

- Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas II sejumlah 343.165.024 saham baru dengan harga Rp7.000 per saham. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi biaya emisi) sebesar Rp2.402.155.168.000.
- Menerbitkan obligasi US\$300 juta 6,25% Senior Notes Due 2020 sebesar US\$300 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).
- Menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Term Loan Facility* sebesar US\$315 juta dan Fasilitas Kredit *Revolving* sebesar US\$10 juta dan Rp530 miliar.

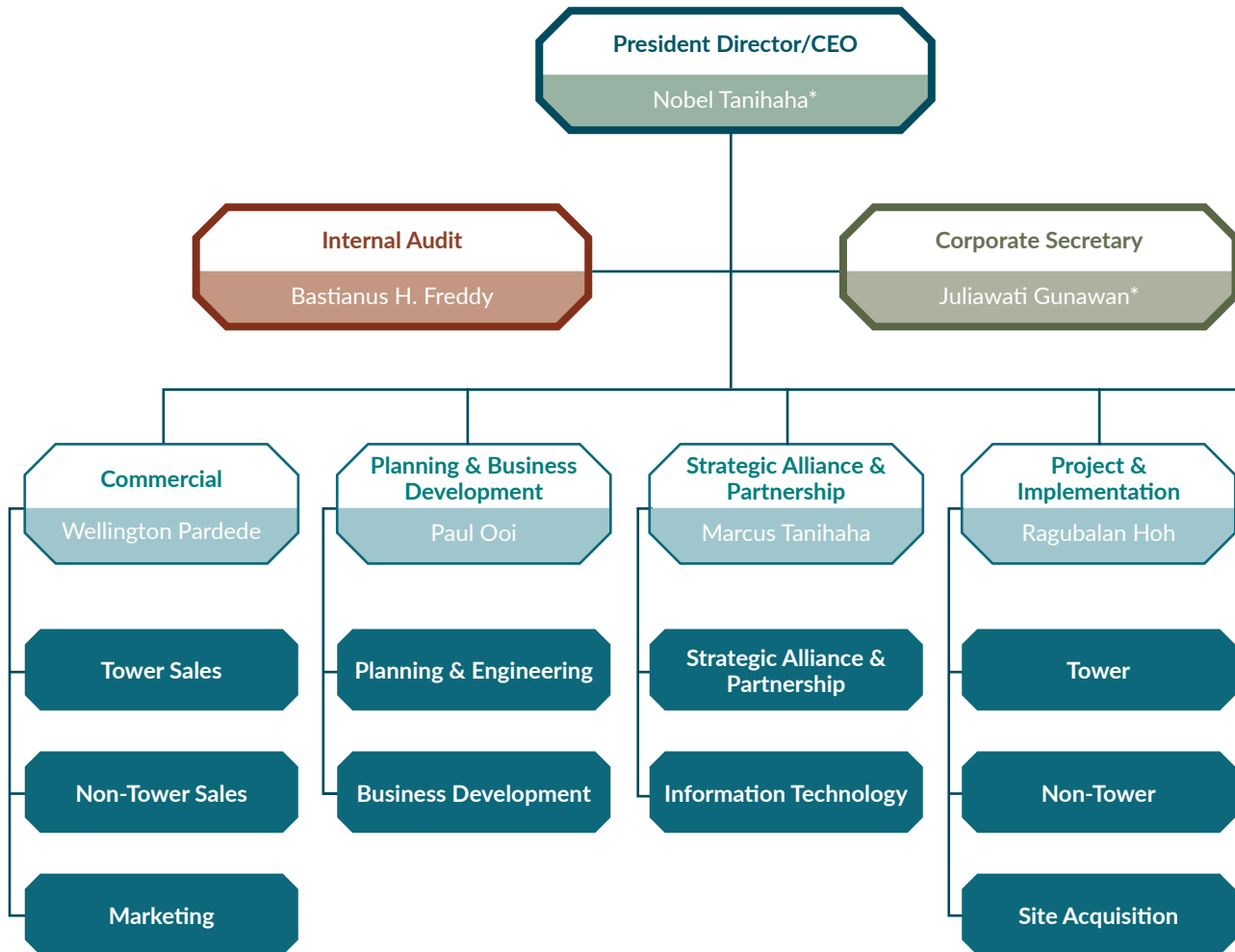
2016

- Sebagai bagian dari program Transformasi Perseroan melalui pendekatan pembenahan menyeluruh, STP melakukan penajaman Nilai Inti Perusahaan dengan menambah 1 (satu) nilai inti menjadi: *Innovative, Dynamic, Positive, Trustworthy, Fun, Reliable*.
- Pada tanggal 19 September, Perseroan melakukan skema pembiayaan kembali fasilitas pinjaman sindikasi tahun 2015 dengan skema pinjaman berjangka sebesar US\$225 juta, pinjaman berjangka sebesar Rp1.050 miliar dan fasilitas *revolving* Rp580 miliar.

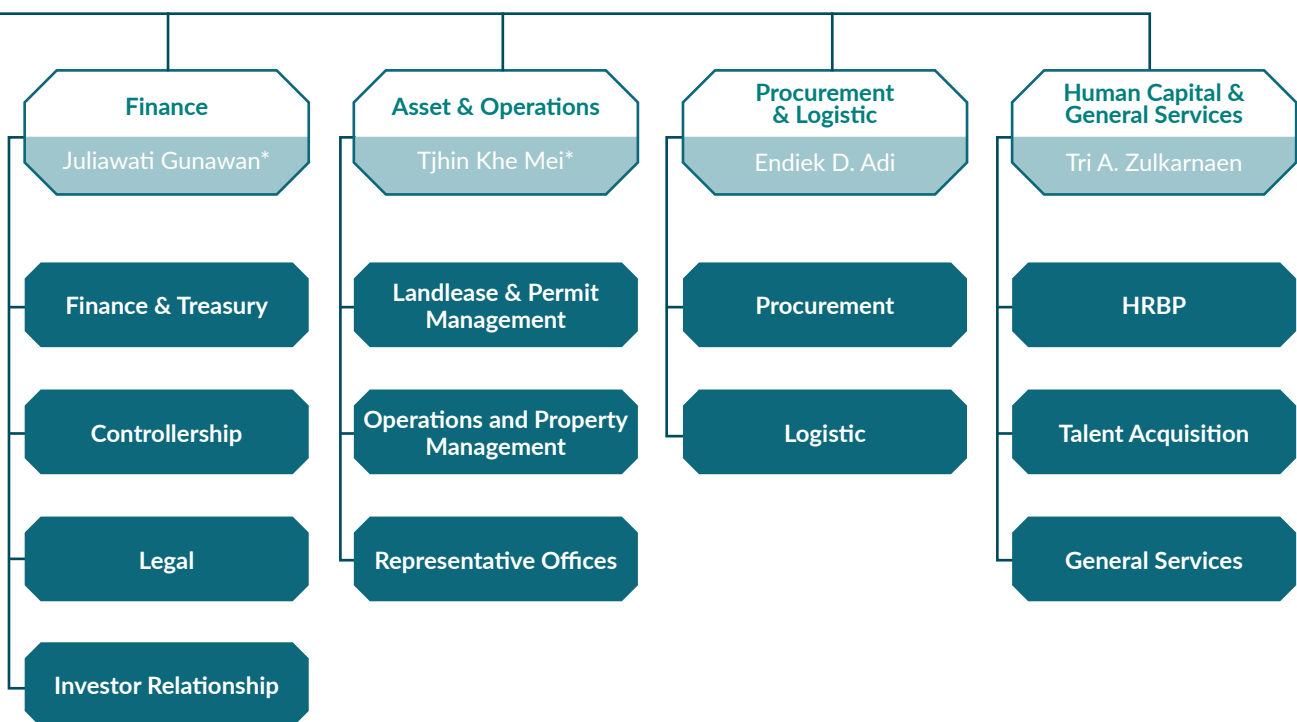
2018

Pada bulan Februari 2018, Perseroan menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman yang berupa fasilitas *Term Loan* USD sebesar US\$297 juta dan fasilitas *Term Loan and Revolving Loan* IDR sebesar Rp3.850 miliar. Kemudian pada bulan Juni 2018 Perseroan mendapatkan opsi untuk meningkatkan Fasilitas Pinjaman sebesar US\$20 juta.

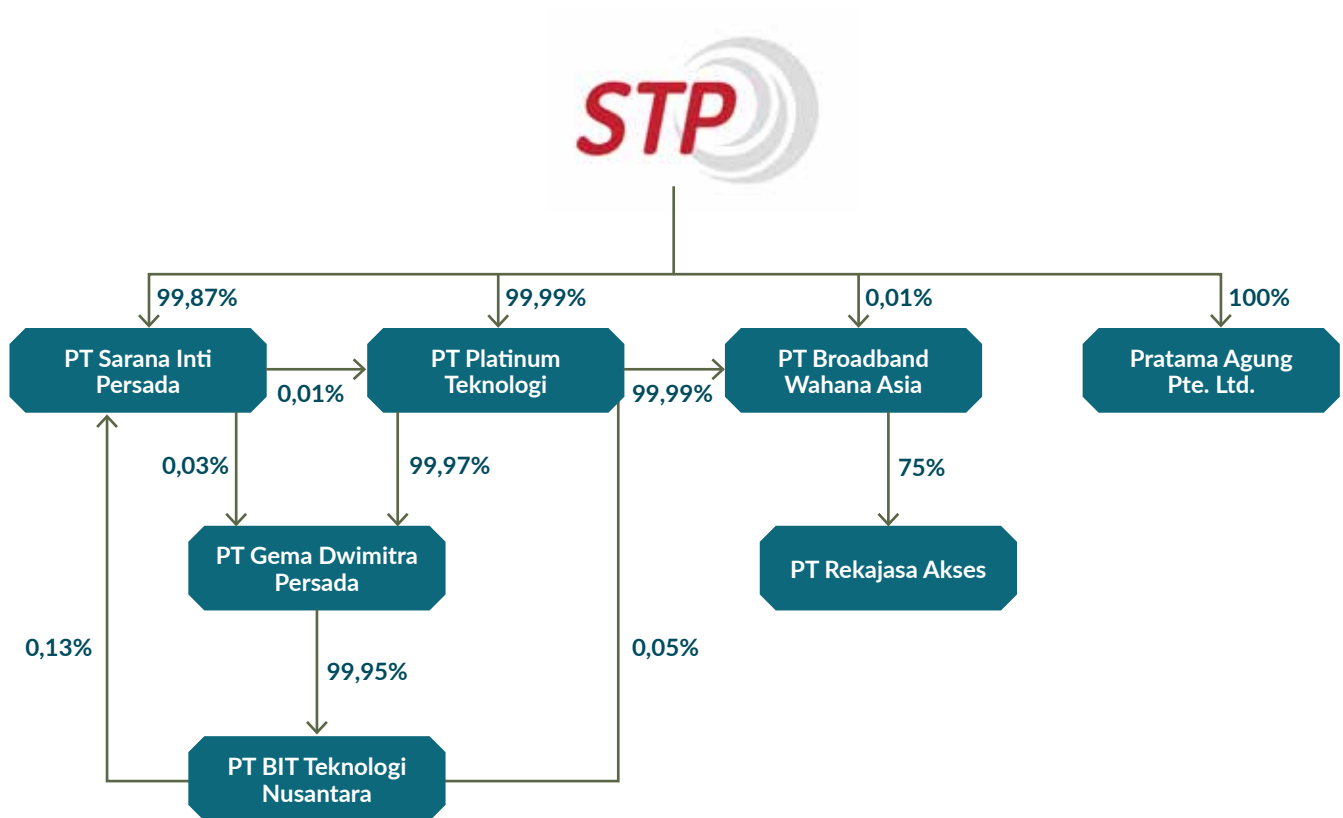
Struktur Organisasi



*Merupakan Direktur Perseroan yang diangkat melalui RUPS dan tercantum dalam akta Perseroan.



Struktur Grup Perusahaan





Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting bagi keberlanjutan usaha Perseroan. Melalui Unit SDM, Perseroan merencanakan, mengatur dan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif secara berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan bermanfaat. Perseroan mengedepankan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan andal sehingga diharapkan dapat menginspirasi dan menghasilkan karya-karya yang berdampak positif terhadap kelangsungan bisnis Perseroan, dan juga bagi kemajuan pelanggan serta masyarakat luas.

Guna memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis, Perseroan senantiasa mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang akan diperlukan di masa mendatang melalui pengembangan sumber daya manusia.

Prosedur Seleksi dan Rekrutmen Karyawan

Seiring dengan perkembangan bisnis dan dinamika industri maka Perseroan menerapkan beberapa strategi di mana Perseroan terus memperbaiki

dan mengkaji jalur rekrutmen yang ada untuk mendapatkan individu-individu terbaik melalui kerja sama dengan Institusi *Headhunter*, jaringan *online professional networking* yaitu LinkedIn, dan juga melalui situs STP.

Program rekrutmen dirancang untuk menarik para talenta terbaik di seluruh tingkatan di mana program ini bertujuan untuk menyeleksi karyawan dan menempatkan mereka sesuai dengan kompetensi masing-masing dan mampu dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja Perseroan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kesempatan berkarier secara adil. Kami menghargai keberagaman dalam jajaran tenaga kerja kami, karena Perseroan sadar bahwa memiliki karyawan yang berbeda jenis kelamin, usia, latar belakang dan perspektif akan menguntungkan bagi Perseroan. Kami menerapkan budaya inklusif dan kesetaraan ini ke dalam semua aspek kerja, termasuk perekrutan, pengembangan karir, promosi dan kompensasi.

Komposisi Karyawan

Pada tahun 2020, Perseroan merekrut 71 karyawan baru dari jumlah total 461 karyawan seiring dengan kebutuhan pengembangan bisnis Perseroan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan jumlah karyawan tahun sebelumnya yang sebesar 390 karyawan.

Adapun komposisi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Perusahaan	Direktur & Setara Direktur	Kepala Divisi	Kepala Departemen	Kepala Seksi	Officer	Staff	Non Staff	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	1	7	34	47	63	24	5	181
PT Sarana Inti Persada	-	-	1	2	11	-	-	14
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	5	18	37	64	91	14	23	252
PT Rekajasa Akses	-	1	3	1	6	3	-	14
Jumlah	6	26	75	114	171	41	28	461

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Perusahaan	Pasca Sarjana	Sarjana Strata 1	Diploma	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Pertama	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	14	110	18	39	-	181
PT Sarana Inti Persada	-	10	4	-	-	14
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	9	172	31	34	6	252
PT Rekajasa Akses	1	9	3	1	-	14
Jumlah	24	301	56	74	6	461

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Perusahaan	Karyawan Tetap	Karyawan Kontrak	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	93	88	181
PT Sarana Inti Persada	10	4	14
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	205	47	252
PT Rekajasa Akses	12	2	14
Jumlah	320	141	461

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Perusahaan	<=25	>25-35	>35-40	>40-50	>50	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	15	65	47	43	11	181
PT Sarana Inti Persada	3	8	3	-	-	14
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	11	85	63	76	17	252
PT Rekajasa Akses	-	5	5	4	-	14
Jumlah	29	163	118	123	28	461

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

Perusahaan	Wanita	Pria	Jumlah
PT Bit Teknologi Nusantara	42	139	181
PT Sarana Inti Persada	7	7	14
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	69	183	252
PT Rekajasa Akses	4	10	14
Jumlah	122	339	461

Budaya Kerja

Perseroan berkomitmen untuk menganut 5 (lima) nilai inti Perseroan yang merupakan fondasi untuk memperkuat budaya Perseroan. Kelima tata nilai Perseroan tersebut mencakup: Terpercaya, Dinamis, Menyenangkan, Inovatif, dan Kerja Sama Tim. Perseroan mengadopsi pendekatan holistik dalam perekrutan, pengembangan dan memotivasi karyawan, serta menyelaraskan tenaga kerja Perseroan dengan membudidayakan nilai-nilai inti untuk menjadi dasar dari tindakan dan bentuk budaya Perseroan.

Perseroan membangun kesadaran mengenai nilai-nilai tersebut beserta perilaku standar yang ditetapkan, dengan mengadakan sesi orientasi sebagai sarana sosialisasi kepada seluruh karyawan baru.

Selain itu, Perseroan juga senantiasa memberikan penyegaran dan menyipikan nilai-nilai inti Perseroan pada momen-momen tertentu seperti:

- *New Fiscal Year Gathering* yang merupakan ajang pengungkapan pencapaian target Perseroan pada tahun sebelumnya dan mengkomunikasikan target tahun berjalan kepada seluruh karyawan.
- *Town hall meeting* yang merupakan ajang *review* atas pencapaian Perseroan atas target tengah tahunan.

STP Culture

Sebagai bentuk penerapan budaya perusahaan dan juga menjalankan konsep *work-life balance*, Perseroan memiliki kegiatan tahunan bernama STP Culture. Di tahun 2020, memasuki tahun keempat penyelenggaraan STP Culture awalnya difokuskan untuk kegiatan-kegiatan CSR yang ditujukan untuk pihak eksternal Perseroan. Namun, seiring dengan pandemi Covid-19 yang melanda dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka program STP Culture terpaksa harus disesuaikan dengan keadaan. Sebagai gantinya, Perseroan menjalankan program STP Culture dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- *Wellness program* berupa olahraga Zumba dan Yoga bersama secara *online streaming* setiap Sabtu dan Minggu pagi.
- Kompetisi *e-sport* yang mencakup Ludo dan catur yang melibatkan hampir semua karyawan.
- Kompetisi video dengan tema seputar pandemi Covid-19 untuk saling menginspirasi semangat bagi orang-orang yang terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tema kompetisi video lainnya adalah ulang tahun STP di mana karyawan membentuk kelompok yang terdiri dari 15-20 orang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kreatif mungkin dan dibuat tanpa tatap muka.

Manajemen Kinerja

Penilaian kerja karyawan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau per semester. Sistem penilaian yang dilakukan adalah dengan pendekatan Management by Objective (MBO).

1. Apresiasi

Perseroan memberikan apresiasi (*reward*) bagi setiap karyawan yang diukur berdasarkan kinerja masing-masing. *Reward* yang dimaksud adalah berupa insentif dan biasanya diberikan di tengah dan akhir tahun saat proses appraisal karyawan oleh divisi SDM.

2. Sanksi

Dalam pelaksanaannya, mekanisme sanksi dijalankan secara normatif, di mana setiap karyawan yang terbukti melanggar peraturan dan etika kerja yang berlaku, maka akan menerima teguran dan/atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

3. Strategi Remunerasi

Dalam menetapkan besaran remunerasi, Perseroan selalu melihat kondisi bisnis dan tren industri. Hal ini secara otomatis memposisikan Perseroan sebagai perusahaan yang memiliki kompensasi dan benefit yang kompetitif. Dalam hal ini Perseroan juga selalu melakukan *review* kinerja setiap tahunnya.

Perseroan selalu berupaya untuk menerapkan pemberian kompensasi yang adil. Perseroan menyadari bahwa tenaga kerja dengan keahlian khusus, termotivasi, dan mampu berinteraksi dengan baik sangatlah penting bagi pencapaian sasaran pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan memberikan remunerasi kepada karyawannya berdasarkan peran dan tanggung jawab, masa kerja, dan penilaian kinerja berupa gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Sistem penggajian ditetapkan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Perseroan dan standar penggajian yang kompetitif di pasar tenaga kerja khususnya untuk industri terkait.

Perseroan juga senantiasa mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia dan mengedepankan kesetaraan remunerasi dengan tidak membedakan jumlah remunerasi berdasarkan gender, melainkan kepada jenjang jabatan, masa kerja, dan hasil penilaian kinerja individu.

Struktur remunerasi karyawan Perseroan dikaji ulang setiap tahunnya untuk disesuaikan dengan situasi di pasar sehingga dapat terus bersaing dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Struktur remunerasi Perseroan juga senantiasa mematuhi peraturan terkait upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum regional (UMR).

Ketentuan mengenai remunerasi dan manfaat yang diterima karyawan tersebut tercantum secara formal dalam Perjanjian Kerja Karyawan. Khusus untuk karyawan wanita, Perseroan memberikan istirahat melahirkan selama total 3 (bulan). Perseroan juga memberikan izin cuti meninggalkan pekerjaan bagi karyawan pria karena kelahiran anak.

Komitmen Perseroan untuk melindungi karyawan

juga dilakukan dengan memberikan paket manfaat yang komprehensif dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Manfaat ini meliputi:

- Manfaat kesehatan;
- Cuti hamil dan melahirkan;
- Dana pensiun;
- Tunjangan hari raya; dan
- Manfaat lainnya untuk karyawan dan keluarga inti karyawan.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dan mewujudkan keberlanjutan usaha. Sehingga sebagai perwujudan dari komitmen tersebut maka Perseroan menyusun program-program pengembangan karyawan yang dilakukan secara internal melalui *on the job training* dengan pengawasan dari masing-masing atasan dan juga secara eksternal dengan materi pelatihan yang dipilih untuk dapat mengembangkan kompetensi yang relevan.

Di tahun 2020, Perseroan merealisasikan anggaran sebesar Rp246.831.168 dengan total 889 *mandays* untuk program pelatihan bagi karyawan Perseroan yang dititikberatkan pada pengembangan *soft skill*. Pelatihan tersebut diselenggarakan secara internal (*inhouse training*) dan melalui mekanisme *online*, tidak lagi melalui temu fisik. Adapun program-program pelatihan yang dijalankan Perseroan selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Pelatihan SDM Tahun 2020

No.	Bulan	Jenis Training	Jumlah Peserta	Nama Training	Penyelenggara
1.	Januari	<i>Inhouse</i>	11	New Employee Induction	HCGS
2.	Februari	<i>Public Training</i>	5	Training Competency Based Interview	PT People Prime Consultant
3.	Maret	<i>Inhouse</i>	10	New Employee Induction	HCGS
4.	April	<i>Inhouse</i>	2	Assessment for Non Psychologists Workshop	QQ Nuansa Consultant
5.	Mei	<i>Inhouse</i>	14	Fiber Skill Training	HCGS
6.	Mei	<i>Inhouse</i>	89	Online Training - Self Development	PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru)
7.	Juni	<i>Inhouse</i>	2	Workshop Program Certified Practitioner OKR (CPOKR)	Solafide Consulting Indonesia CV
8.	Juni	<i>Inhouse</i>	2	Online Training "4 Steps Personal Strategies to Navigate the Extraordinary Disruption"	PT Cipta Jaya Indonesia

No.	Bulan	Jenis Training	Jumlah Peserta	Nama Training	Penyelenggara
9.	Juni	Inhouse	2	Workshop "Corporate Survival & Growth Strategy by Ebitda Control"	PT Equiti Manajemen Teknologi
10.	Agustus	Inhouse	44	New Employee Induction	HCGS
11.	Agustus	Inhouse	57	Google Meet Refresh Training	HCGS
12.	September	Inhouse	12	Delegating Effectively	HCGS
13.	September	Inhouse	10	Managing Up	GLC
14.	September	Inhouse	2	Excel Training	Execute Training
15.	September	Inhouse	2	Minimba OKR Training	Ruang ilmu
16.	Oktober	Inhouse	2	UU CIPTAKER	GOERS
17.	November	Inhouse	18	Managing Up	HCGS
18.	Desember	Inhouse	7	Interview Technique, Competency Based Interview	HCGS

Kesetaraan dan Keberagaman

Terkait pengembangan sumber daya manusia, Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan yang adil (*fair*) dan juga senantiasa menjamin kesempatan berkarier yang sama bagi karyawan pria maupun wanita. Hal ini antara lain didukung dengan sistem jenjang karier yang didasarkan pada kualifikasi jabatan, kompetensi karyawan yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, dan masa kerja. Perseroan menilai pengembangan karier merupakan hal penting yang dapat memacu produktivitas setiap karyawan, meningkatkan sikap kerja, serta menciptakan kepuasan kerja demi mencapai tujuan perusahaan.

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama di dalam Perseroan, dengan tidak memandang jenis kelamin, latar belakang, agama, atau etnis. Setiap keputusan dalam melakukan perekrutan, pelatihan, promosi, dan kompensasi didasarkan semata-mata pada kriteria yang objektif sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan dan kinerja karyawan.

Jalur Komunikasi Informasi bagi Karyawan

Perseroan menyadari bahwa penyampaian informasi yang efektif dapat membantu Perseroan merealisasikan visi dan misinya. Untuk itu, Perseroan

berkomitmen untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan karyawan, antara lain melalui jalur komunikasi email, sosialisasi langsung atau tatap muka dengan karyawan, serta *town hall meeting*.

Di tahun 2020, sebagai ajang komunikasi antara karyawan dengan pihak manajemen sekaligus sebagai forum untuk sosialisasi rencana bisnis dan strategi perusahaan maka Perseroan menyelenggarakan aktivitas sebagai berikut:

1. *New Year Gathering* 22 Januari 2020
Acara ini merupakan tradisi STP Group dalam menyambut Tahun Baru di mana seluruh karyawan diundang untuk makan bersama. Selain sebagai perayaan, acara ini juga menjadi ajang beramah tamah dan silaturahmi antara karyawan. Selain itu acara ini juga diisi dengan *Town Hall Meeting*, di mana pihak manajemen menyampaikan pencapaian target tahun sebelumnya dan mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan target tahun berjalan dan juga *update* program perusahaan.
2. Ulang tahun STP ke-14 pada tanggal 5 November 2020 secara *online*. Kegiatan ini merupakan acara selebrasi ulang tahun Perseroan yang ke-14.

Work-Life Balance di Lingkungan Kerja Perseroan

Perseroan sangat memperhatikan keseimbangan antara pola kerja dengan pola hidup masing-masing karyawannya. Perseroan selalu mendukung bahwa keluarga karyawan adalah prioritas utama sehingga Perseroan senantiasa mengedepankan tingkat fleksibilitas waktu kerja bagi pegawai tetap, waktu kerja bagi pegawai paruh waktu, dan waktu cuti untuk pegawai laki-laki setelah istrinya melahirkan.

Upaya untuk menciptakan lingkungan serta suasana kerja yang seimbang antara bekerja dengan aktivitas pribadi (*work and life balance*) terwujud dalam kegiatan yang mengekspresikan aspirasi rohani dan hobi. Kegiatan tersebut diwadahi oleh Perseroan dengan menyediakan fasilitas ibadah seperti mushola dan juga fasilitas olah raga seperti gym atau pusat kebugaran.

Tidak hanya didukung dengan fasilitas, Perseroan juga menyelenggarakan kelas olahraga (*Wellness Class*) setiap sore, setelah usai jam kerja. Setiap karyawan dapat mengikuti kelas Muay Thai, Yoga, Zumba, atau Futsal dan mendapatkan poin untuk STP Culture jika mengikuti kelas-kelas tersebut.

Serangkaian upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki keseimbangan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan kerja di STP. Perseroan percaya bahwa kenyamanan lingkungan kerja juga menjadi tolak ukur kepuasan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, Perseroan selalu berusaha memfasilitasi pengelolaan lingkungan kerja melalui *work flow* yang nyaman dan seimbang demi memaksimalkan produktivitas serta kinerja setiap karyawan.



Foto Bersama Chinese New Year Dinner 2020

Beradaptasi dengan Kenormalan Baru

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat seiring dengan munculnya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh sendi kehidupan kita. Tidak hanya aspek kesehatan, pandemi ini turut memberikan dampak bagi aspek ekonomi dan mengubah tatanan normal hidup kita serta memberikan makna tersendiri pada istilah kenormalan baru (*new normal*).

Perseroan meyakini bahwa kunci dari kesinambungan bisnis terletak pada kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat mengikuti keadaan. Oleh karena itu, di tahun 2020 Perseroan juga menerapkan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk dapat beradaptasi di era kenormalan baru. Selain penerapan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah melalui Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang pencegahan penularan virus Corona di tempat kerja sektor usaha dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha, Perseroan juga berkomitmen untuk senantiasa menjaga kesehatan karyawannya melalui langkah-langkah berikut ini:

- Mengatur waktu kerja (*shift*) karyawan terkait kebijakan *Working from Home* (WFH) dan *Working from Office* (WFO).
- Menyediakan layanan antar jemput bagi karyawan yang sebelumnya selalu menggunakan transportasi umum.
- Menyediakan makan siang untuk karyawan agar karyawan tidak perlu membeli makanan dari luar.
- Mengeluarkan imbauan tentang pola hidup sehat, anjuran 3M, dan anjuran lain terkait protokol kesehatan.
- Membuat kebijakan dan sistem untuk senantiasa mengontrol kesehatan karyawan.



Acara New Year Dinner 2020

Teknologi Informasi

Di era industri 4.0, teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital untuk mendukung kemajuan suatu perusahaan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat kian membentuk industri dan memberikan keunggulan kompetitif yang kuat bagi perusahaan yang dapat mengikuti tren tersebut. Begitu pula halnya di Perseroan, teknologi informasi merupakan salah satu aspek penting yang mendukung operasional Perseroan.

Perkembangan teknologi informasi di Perseroan berada di bawah tanggung jawab Divisi Teknologi Informasi (TI). Divisi TI memiliki visi untuk menjadi *business enabler* untuk memberdayakan STP Group agar dapat mencapai objektif bisnisnya

dengan menyediakan sistem yang kuat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Divisi TI memiliki misi untuk memberikan solusi TI yang strategis untuk STP Group untuk mendukung pertumbuhan yang menguntungkan melalui otomatisasi sistem, kebijakan, dan peningkatan proses.

Di tahun 2020, pengembangan teknologi informasi di Perseroan difokuskan pada upaya meningkatkan kapabilitas HRIS terutama untuk dapat mendukung penyelenggaraan program pelatihan karyawan secara *online*. Adapun rencana pengembangan teknologi informasi untuk tahun 2021 akan difokuskan pada upaya memperluas cakupan modul pelatihan *online*.

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Pemegang Saham	Per 31 Desember 2020			Per 31 Desember 2019		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rupiah Penuh)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rupiah Penuh)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
PT Kharisma Indah Ekaprima	491.384.554	49.138.455.400	43,20	491.384.554	49.138.455.400	43,20
Cahaya Anugrah Nusantara Holdings Ltd	290.228.868	29.002.288.660	25,51	290.228.868	29.002.288.660	25,51
Juliawati Gunawan (Direktur)	359.596	35.959.600	0,03	359.596	35.959.600	0,03
Masyarakat (<5%)	355.606.680	35.560.668.000	31,26	355.606.680	35.560.668.000	31,26
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.137.579.698	113.757.969.800	100,00	1.137.579.698	113.757.969.800	100,00

Kronologi Pencatatan Saham

Penawaran Umum Perdana

Pada 29 September 2011, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 100.000.000 lembar Saham Biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp3.400 per saham. Seluruh saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana digunakan untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau site telekomunikasi dan modal kerja.

Penawaran Umum Terbatas I

Pada 8 Agustus 2012, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK No. S-9825/BL/2012 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 135.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp4.800 per saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 waran. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp4.800 dengan masa berlaku pelaksanaan 6 Maret 2013 sampai dengan

28 Agustus 2015. Sampai dengan masa pelaksanaan berakhir, Perseroan menerbitkan 59.415.534 waran. Saham-saham dan waran ini tercatat pada BEI. Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau site telekomunikasi, dan modal kerja.

Penawaran Umum Terbatas II

Pada 19 Desember 2014, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-550/D.04/2014 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 343.165.024 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp7.000 per saham. Seluruh saham dari penawaran umum ini telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia, pada bulan Januari 2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (setelah perjumpaan antara pinjaman pemegang saham Perseroan kepada PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) dengan kewajiban KIE untuk penyeteroran modal) digunakan untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan modal kerja.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Pada tahun 2015, Pratama Agung Pte. Ltd., entitas anak telah berhasil menerbitkan obligasi sebesar US\$300 juta dengan kupon 6,25% berjangka waktu 5 tahun (Surat Utang) dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX) pada 25 Februari 2015. Obligasi ini bernama US\$300 million 6,25% Senior Notes Due 2020 dan merupakan obligasi internasional perdana yang diterbitkan oleh grup Perseroan dan telah diperdagangkan. Pada tanggal 28 Maret 2018, Perseroan telah melunasi penuh obligasi ini.

Informasi tentang Entitas Anak

Entitas Anak dan Struktur Kepemilikannya

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung (%)	Tahun Penyertaan
Kepemilikan Langsung				
1.	PT Sarana Inti Persada	Pengelolaan dan Penyewaan Menara BTS	100,0	2011
2.	PT Platinum Teknologi	Investasi	100,0	2012
3.	Pratama Agung Pte. Ltd.	Investasi	100,0	2013
4.	PT Broadband Wahana Asia	Investasi	100,0	2016
Kepemilikan Tidak Langsung				
1.	PT Gema Dwimitra Persada (melalui PT Platinum Teknologi)	Perdagangan	100,0	2012
2.	PT Bit Teknologi Nusantara (melalui PT Gema Dwimitra Persada dan PT Platinum Teknologi)	Penyewaan <i>Microcell</i> dan Jasa Jaringan Kabel Serat Optik	100,0	2012
3.	PT Rekajasa Akses (melalui PT Broadband Wahana Asia)	Penyedia Layanan Data	75,0	2016

Nama dan Alamat Entitas Anak serta Kantor Perwakilan

Alamat Lengkap	
Kantor Pusat	Kantor Perwakilan
Rukan Permata Senayan Blok C01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta 12210, Indonesia	Kantor Perwakilan Bandung Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracandong Bandung 40275 Telepon : +62 22 733 3328 Faksimili : +62 22 733 3329
Kontak Kami Telepon : +62 21 57940688 Faksimili : +62 21 57950077 Layanan pelanggan 24 jam: 0-800-140-1380 (bebas biaya) E-mail : corporate.secretary@stptower.com Situs : www.stptower.com	Kantor Perwakilan Medan Komplek Centrium No. 53 Jl. Brigjen Katamso Medan 20151 Telepon : +62 61 8881 6041 Faksimili : +62 61 8881 5874
	Kantor Perwakilan Surabaya Ruko Darmo Square B10 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya Telepon : +62 31 567 7996 Faksimili : +62 31 567 9006
Entitas Anak	
PT Bit Teknologi Nusantara Perkantoran Permata Senayan Blok C1 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Telepon : +62 21 5794 0688 Faksimili : +62 21 5794 1278 Situs : www.bit-teknologi.com	PT Sarana Inti Persada Jl. Ibrahim Adjie No. 402 Kiaracandong, Bandung, Jawa Barat 40275 Telepon : +62 22 733 3328 Faksimili : +62 22 733 3329

Alamat Lengkap

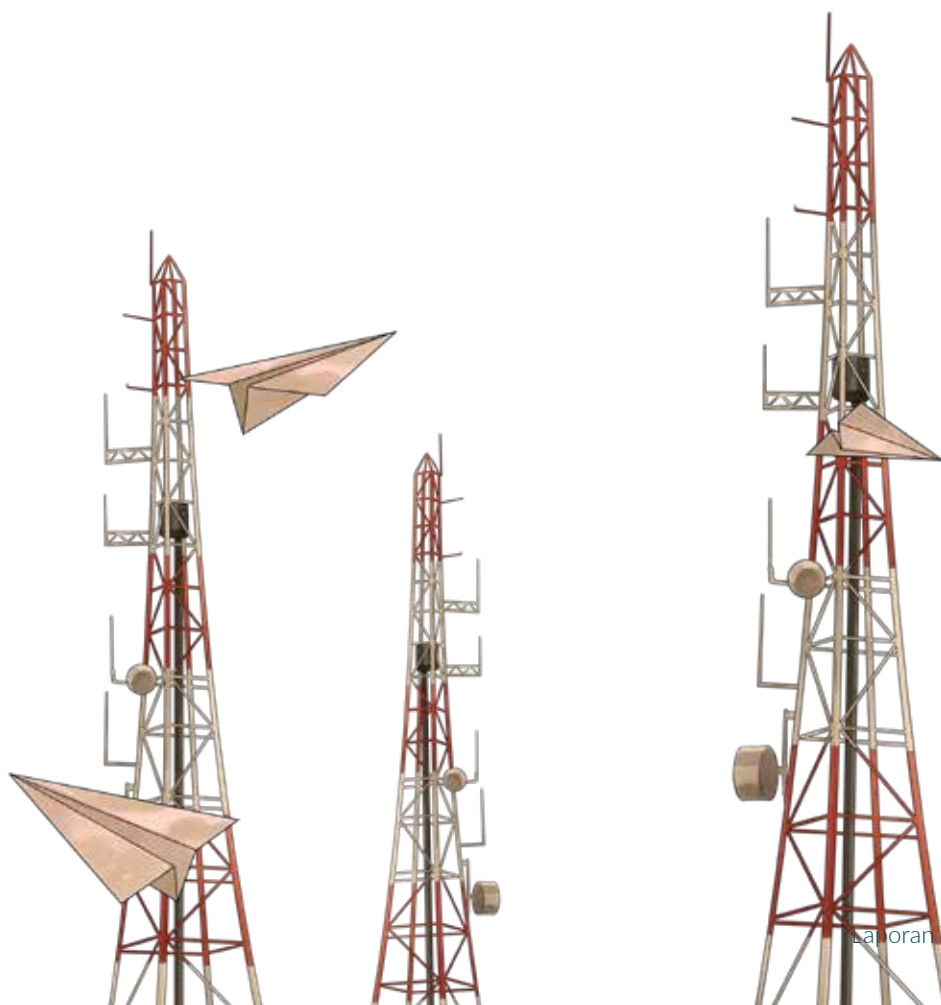
PT Platinum Teknologi
Perkantoran Permata Senayan Blok C23 Lt. 3
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Telepon : +62 21 5794 0688
Faksimili : +62 21 5795 0077

PT Gema Dwimitra Persada
Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Telepon : +62 21 5794 0688
Faksimili : +62 21 5795 0077

PT Broadband Wahana Asia
Perkantoran Permata Senayan Blok F8-9
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Telepon : +62 21 5794 0966
Faksimili : +62 21 5794 0977

PT Rekajasa Akses
Perkantoran Permata Senayan Blok F8-9
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210
Telepon : +62 21 5794 0966
Faksimili : +62 21 5794 0977
Situs : www.acsata.com

Pratama Agung Pte. Ltd.
7 Straits View
#12-00
Marina One East Tower
Singapore (018936)



Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(Member Firm of RSM Network)

Plaza ASIA Lantai 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon : +62 21 5140 1340

Faksimili : +62 21 5140 1350

STTD : No. 212/BL/STTD-AP/2012 tanggal
17 Desember 2012

Keanggotaan Asosiasi: Anggota IAPI No. 1546

Surat Penunjukan: 0081014/BNA/104/EL Tanggal
2 Oktober 2014

Jasa yang diberikan:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan audit yang dilakukan.

Periode Penugasan:

Tahun Buku 2020

Konsultan Hukum

Hiswara Bunjamin & Tandjung

18th Floor, Tower 1, Sudirman 7.8

Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8

Tanah Abang, Jakarta 10220

Telepon : +62 21 3973 8000

STTD : STTD.KH-289/PM.223/2019

Keanggotaan Asosiasi: HKHPM No. 201810

Surat Penunjukan: No. 018/04/21/EL tertanggal
20 April 2021

Jasa yang diberikan:

Melakukan pemeriksaan uji tuntas atas fakta mengenai Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Periode Penugasan:

Tahun Buku 2020

Notaris	
Rini Yulianti, S.H. Jl. H. Naman Raya No. 31 Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telepon : +62 21 864 1170 STTD : No. 90/BL/STTD-N/2007 Keanggotaan Asosiasi: Berdasarkan Surat Keterangan No.06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/ XI/2010 tanggal 2 November 2010 Surat Penunjukkan: 048A/DIR-STP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014	Jasa yang diberikan: Membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT II, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan dalam rangka PUT II kecuali rapat-rapat mengenai keuangan, penentuan harga, dan strategi pemasaran. Periode Penugasan: Tahun Buku 2020
Biro Administrasi Efek	
PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 252 5666 Faksimili : +62 21 252 5028 STTD : No.Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991 a/n PT Risjad Salim Registra Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IV/2011-004 Surat Penunjukkan: 048B/DIR-STP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014	Jasa yang diberikan: Melaksanakan administrasi Daftar Pemegang Saham, menghitung HMETD, distribusi HMETD, administrasi pelaksanaan HMETD, deposit saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam sistem elektronik, melaksanakan penjabatan, menerbitkan formulir konfirmasi penjabatan, menyajikan laporan pelaksanaan HMETD dan menerbitkan Surat Kolektif Saham. Periode Penugasan: Tahun Buku 2020

Penghargaan & Sertifikasi

2013



9 Media Bersama
The Best Tower Building Company of the Year



Warta Ekonomi
Indonesia Best New Emiten 2013

2014



Economic Review
Perusahaan Penunjang Telekomunikasi Independen Terbaik 2014



Economic Review
Peringkat ke-7 Bidang Konstruksi Non Bangunan 2014



Economic Review
Most Powerful & Valuable Company dalam kategori Bidang Konstruksi Non Bangunan

2015



Brand Finance plc
87th Most Valuable Indonesian Brands 2015 & US\$21 mil Brand Value & A+

2016



Brand Finance plc
Ranked 94th in Most Valuable Indonesian Brands 2016 with a US\$ 17 million Brand Value & A- Brand Rating

2017



Infobank
100 Fastest Growing
Companies 2017



Warta Ekonomi
Indonesia Most Powerful
Companies Award (MPCA) 2017

2018



**The Financial Times
dan Statista**
FT 1000 High-Growth
Companies Asia-Pacific
2018

2020



SWA
Indonesia Outstanding Performers
in Pandemic Area 2020

04

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 membuat layanan internet memiliki peranan yang vital, baik bagi keberlangsungan kegiatan bisnis maupun dunia pendidikan. Terbukti berdasarkan pengamatan sejak kuartal II 2020 dan laporan dari operator seluler, telah terjadi kenaikan lalu lintas data, yang artinya kebutuhan dan penggunaan layanan internet via *mobile devices* cenderung terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa sektor telekomunikasi telah menjadi layanan infrastruktur inti dan esensial bagi perekonomian nasional, dengan infrastruktur data yang menjadi sangat penting di dunia yang saling terhubung.

Pandemi Covid-19 juga mendorong percepatan digitalisasi aspek kehidupan masyarakat, yang terlihat dari maraknya penggunaan platform *e-commerce*, *video conferencing*, *entertainment*, *digital banking*, dan *social media*.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, saat ini pemakai internet di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 170 juta orang dari total penduduk 260 juta. Sekitar 90% dari jumlah tersebut, masih menggunakan layanan data via *mobile device/handphone* dan sekitar 70% dari mereka menggunakan jaringan 3G/4G.

Penetrasi internet di Indonesia masih memiliki potensi untuk terus berkembang, didukung komposisi demografi di Indonesia yang didominasi

penduduk usia muda, dan pemakai internet yang terus menuntut peningkatan kualitas layanan karena intensitas penggunaan yang terus bertambah. Kedua hal tersebut, ditambah penetrasi jumlah tower dan sambungan fiber optic yang masih rendah di Indonesia membuat masa depan bisnis penyediaan infrastruktur telekomunikasi ini cukup cerah. Diekspektasikan bahwa industri telekomunikasi Indonesia tetap stabil dikarenakan sifat industri yang defensif, di tengah ketidakpastian prospek ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19.

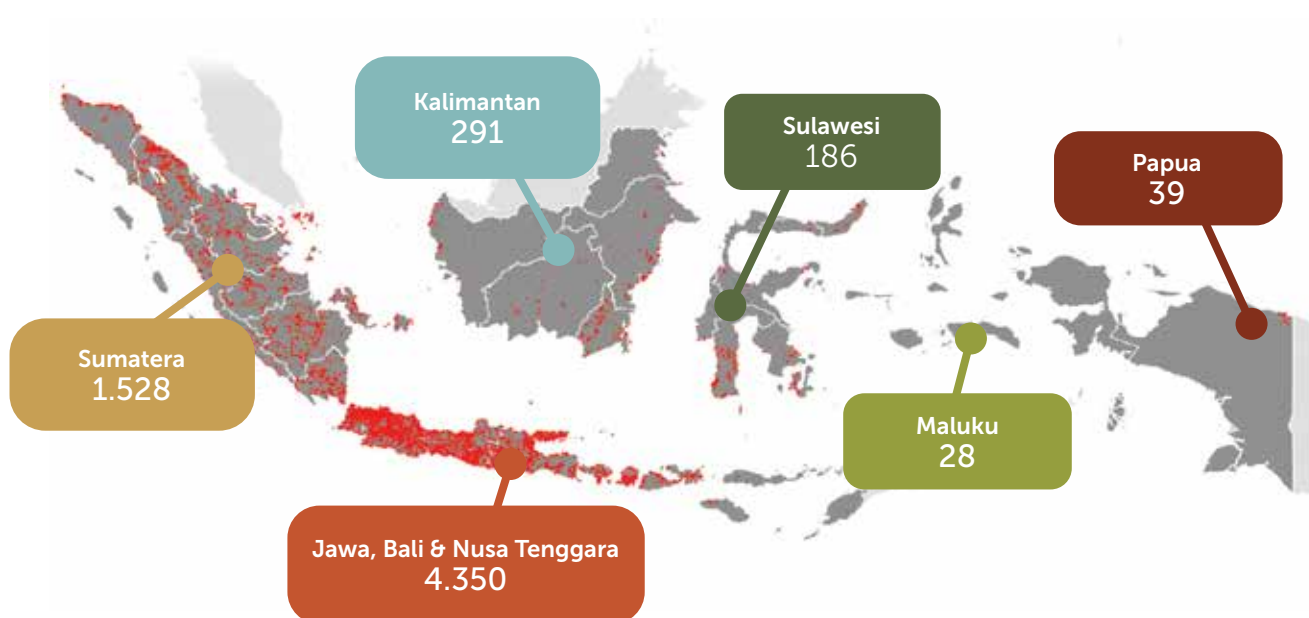
Sebagai salah satu dari perusahaan penyedia infrastruktur menara independen terkemuka di Indonesia, perkembangan kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi dari kinerja pertumbuhan industri telekomunikasi. Pendapatan Perseroan terutama berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar dan terpercaya di Indonesia, yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Group, dan PT Indosat Tbk.

Saat ini, Perseroan telah mengoperasikan menara di seluruh 34 provinsi di Indonesia. Mayoritas menara Perseroan terletak di pulau Jawa dan Sumatera di mana daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia. Perkembangan portofolio aset Perseroan selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:

Portofolio Aset Strategis	2020	2019	2018*
Site Portofolio Tower			
Jumlah Site Menara	6.422	6.384	6.412
Site Portofolio Non-Tower			
Site Indoor DAS**	38	38	37
Jaringan Kabel Serat Optik (km)	6.277	3.382	3.000
Penyewaan Site Menara	12.145	11.154	10.492
Rasio Penyewaan Menara	1,89x	1,75x	1,64x
Penyewaan Portofolio Non-Tower			
Site Indoor DAS	57	68	54

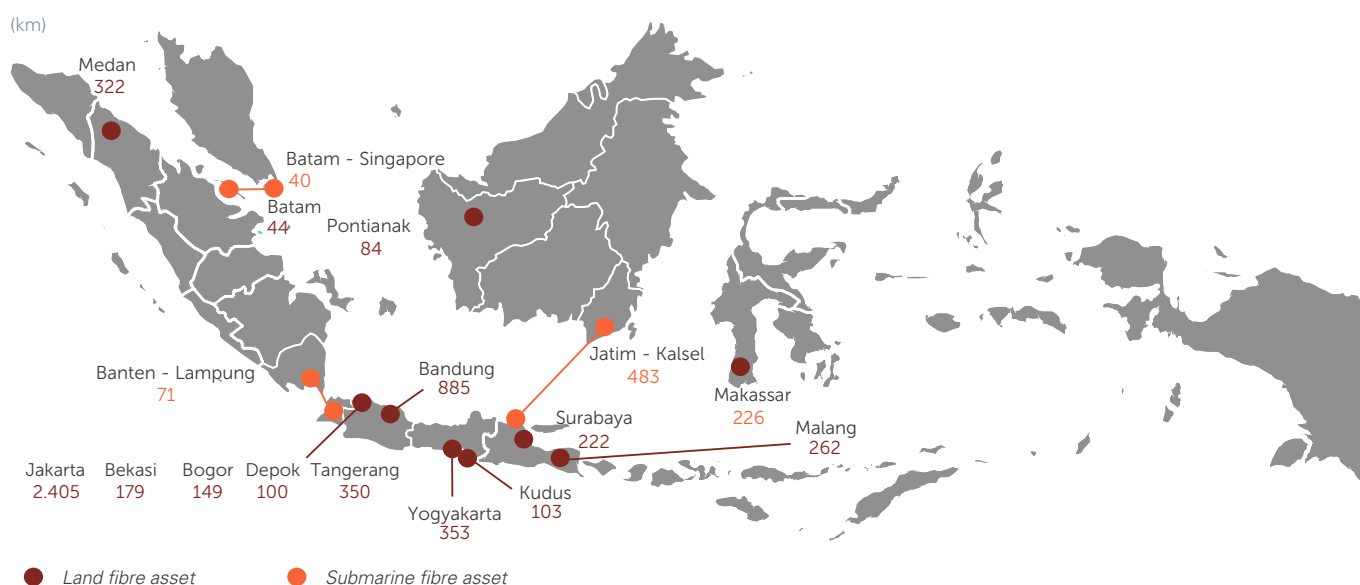
*) Per akhir 2018, menara dan penyewaan di mana PT First Media Tbk/PT Internux tercatat sebagai penyewa tunggal telah dikeluarkan dari pelaporan portofolio aset menara Perseroan

**) Dihitung berdasarkan jumlah bangunan



Selain portofolio aset menara, Perseroan juga memiliki portofolio kabel serat optik darat yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Selain jaringan kabel serat optik darat, Perseroan juga memiliki jaringan serat optik bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa – Kalimantan, Pulau Jawa – Sumatera, dan Batam – Singapura.

Perseroan meyakini bahwa ekspansi di jaringan serat optik akan memperkuat posisi sebagai penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi secara terintegrasi di Indonesia dan bersaing pada era digital saat ini. Ke depannya, Perseroan akan tetap berinovasi dan bertumbuh untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.



Kinerja Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2020	2019	Perubahan 2019-2020
Aset Lancar	1.444,2	1.764,6	-320,4
Aset tidak Lancar	10.600,5	9.400,2	1.200,3
Jumlah Aset	12.044,7	11.164,8	879,9
Liabilitas Jangka Pendek	1.721,0	1.567,0	154,0
Liabilitas Jangka Panjang	6.676,9	6.624,3	52,6
Jumlah Liabilitas	8.397,9	8.191,3	206,6
Jumlah Ekuitas	3.646,8	2.973,5	673,3

Aset Lancar

Per 31 Desember 2020, jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp1.444,2 miliar, menurun 18,2% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.764,6 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan bank dan penurunan saldo uang muka dan beban dibayar di muka sebagai akibat implementasi PSAK 73.

Aset Tidak Lancar

Per 31 Desember 2020, aset tidak lancar Perseroan tercatat sebesar Rp10.600,5 miliar, meningkat sebesar 12,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp9.400,2 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya aset hak guna sebesar Rp1.265,2 miliar yang timbul dari implementasi PSAK 73 atas sewa.

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp12.044,7 miliar, atau meningkat sebesar

7,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp11.164,8 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap dan kenaikan nilai revaluasi atas aset tetap.

Liabilitas Jangka Pendek

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp1.721,0 miliar atau meningkat sebesar 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.567,0 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang bank jangka pendek yang digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,8% menjadi Rp6.676,9 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6.624,3 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya liabilitas sewa jangka panjang yang timbul dari implementasi PSAK 73 atas sewa.

Ekuitas

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2020	2019	Perubahan 2019-2020
Modal Saham	113,8	113,8	0
Tambahan Modal Disetor – Bersih	3.589,8	3.589,8	0
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(278,1)	(247,2)	-30,9
Saldo Laba (Defisit)	219,2	(482,8)	702,0
Kepentingan Non-Pengendali	2,1	0	2,1
Jumlah Ekuitas	3.646,8	2.973,5	673,2

Di tahun 2020 jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar 22,6% dari Rp2.973,5 miliar per 31 Desember 2019 menjadi Rp3.646,8 miliar per 31 Desember

2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo laba dari defisit Rp482,8 miliar di tahun 2019 menjadi laba Rp219,2 miliar di tahun 2020.

Laporan Keuangan Laba Rugi Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2020	2019	Perubahan 2019-2020
Pendapatan Usaha	1.922,2	1.767,0	155,2
Laba Bruto	1.339,5	1.274,9	64,6
Laba Usaha	1.131,2	1.085,8	45,4
Ebitda	1.602,3	1.478,0	124,3
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	708,8	228,4	480,4
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	673,3	3,6	669,7

Pendapatan

Pendapatan usaha Perseroan terutama berasal dari penyewaan infrastruktur milik Perseroan yang terdiri dari penyewaan menara telekomunikasi, penyewaan infrastruktur penguat sinyal di gedung-gedung, dan juga penyewaan dan pemakaian kapasitas infrastruktur jaringan kabel serat optik. Jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.922,2 miliar atau meningkat sebesar 8,8% dibandingkan tahun 2019, di mana sekitar

86,5% pendapatan Perseroan pada tahun tersebut tercatat berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Group (termasuk PT Telkom Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Dayamitra Telekomunikasi), dan PT Indosat Tbk. Kualitas kredit yang kuat dari para pelanggan utama Perseroan serta ditambah dengan arus kas jangka panjang yang stabil merupakan beberapa faktor kunci dan menjadi keunggulan komparatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Sumber Pendapatan Perseroan berdasarkan Pelanggan

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	Tahun		Tahun	
	2020	%	2019	%
PT XL Axiata Tbk (XL)	640,9	33,3	648,2	36,7
PT Hutchison 3 Indonesia (H3I)	402,1	20,9	379,4	21,5
Telkom Group	399,8	20,8	404,1	22,9
PT Indosat Tbk (Indosat)	220,6	11,5	136,6	7,7
PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)	176,4	9,2	124,6	7,1
Lain-Lain	82,4	4,3	74,1	4,1
Jumlah	1.922,2	100,0	1.767,0	100,0

Beban Pokok Pendapatan

Total beban pokok pendapatan pada 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,4% dari tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penyusutan aset tetap sebagai dampak perubahan nilai aset tetap hasil penilaian oleh penilai independen. Tabel berikut menunjukkan rincian beban pokok pendapatan Perseroan:

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	Tahun		Tahun		Perubahan 2019-2020
	2020	% terhadap Pendapatan	2019	% terhadap Pendapatan	
Penyusutan dan Amortisasi:					
Penyusutan Aset Tetap	219,4	11,4	152,6	8,6	66,8
Penyusutan Aset Guna Usaha	199,5	10,4	-	-	199,5
Hak Penggunaan Kapasitas Jaringan dan Kabel Laut Serat Optik	7,0	0,4	7,0	0,4	0
Perizinan	6,3	0,3	6,9	0,4	-0,6
Sewa Lahan	-	0,0	189,2	10,7	-189,2
Lain-Lain	13,9	0,7	12,5	0,7	1,4
Sub Jumlah	446,1	23,2	368,2	20,8	77,9
Beban Pokok Pendapatan Lainnya:					
Pemeliharaan dan Perbaikan	65,5	3,4	64,0	3,6	1,5
Jasa Keamanan dan Lain-Lain	71,1	3,7	59,9	3,4	11,2
Sub Jumlah	136,6	7,1	123,9	7,0	12,7
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	582,7	30,3	492,1	27,8	90,6

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komponen terbesar dari beban pokok pendapatan Perseroan di tahun 2020 adalah beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset guna usaha merupakan penyusutan sewa lahan untuk menara telekomunikasi, sewa tempat dan sewa peralatan sesuai dengan PSAK 73 mengenai "Sewa". Beban amortisasi sewa lahan merupakan amortisasi biaya sewa lahan yang dibayar di muka kepada pemilik lahan untuk lokasi pendirian menara telekomunikasi Perseroan. Biaya sewa lahan diamortisasi selama periode sewa sesuai dengan perjanjian sewa yang berlaku. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain merupakan amortisasi biaya perizinan sesuai masa manfaat perizinan tersebut. Beban penyusutan aset tetap merupakan biaya penyusutan atas menara dan jaringan serat kabel optik beserta sarana pendukungnya, beban penyusutan instalasi jaringan Indoor DAS, dan aset tetap lainnya.

Sementara beban pemeliharaan dan perbaikan serta jasa keamanan dan lain-lain merupakan beban operasional yang timbul terkait pengoperasian aset Perseroan yang disewakan kepada pelanggan.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan merupakan pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan. Pada tahun 2020, Perseroan mencatatkan laba bruto sebesar Rp1.339,5 miliar, mengalami peningkatan sebesar 5,1% dari tahun 2019 sebesar Rp1.274,9 miliar, serta margin laba bruto mengalami penurunan menjadi sebesar 69,7% dari 72,1% di tahun 2019.

Beban Usaha

Secara keseluruhan, beban usaha Perseroan di tahun 2020 mencapai Rp208,3 miliar di mana beban usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar 10,1% dari Rp189,1 miliar pada tahun 2019. Beban usaha Perseroan terutama berasal dari beban gaji dan tunjangan yang tercatat meningkat sebesar 17,3% bila dibandingkan dengan tahun 2019 seiring dengan penambahan jumlah karyawan. Rincian beban usaha Perseroan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Deskripsi	Tahun		Tahun		Perubahan 2019-2020
	2020	% terhadap Pendapatan	2019	% terhadap Pendapatan	
Penyusutan dan Amortisasi:					
Amortisasi	13,7	0,7%	19,9	1,1	-6,3
Penyusutan Aset Guna Usaha	6,5	0,3%	-	-	6,5
Penyusutan Aset Tetap	4,8	0,3%	4,1	0,2	0,7
Sub Jumlah	25,0	1,3%	24,0	1,4	1,0
Beban Usaha Lainnya:					
Gaji dan Tunjangan	145,5	7,6%	124,1	7,0	21,4
Imbalan Pasca Kerja	12,2	0,6%	9,3	0,5	2,9
Perjalanan dan Akomodasi	8,6	0,4%	11,0	0,6	-2,5
Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya	8,2	0,4%	8,2	0,5	0,0
Jasa Profesional	5,4	0,3%	6,1	0,3	-0,7
Pemasaran	3,4	0,2%	6,4	0,4	-2,9
Sub Jumlah	183,3	9,5%	165,1	9,3	18,2
Jumlah Beban Usaha	208,3	10,8%	189,1	10,7	19,2

Laba Usaha

Pada tahun 2020, laba usaha Perseroan tercatat mengalami sebesar Rp1.131,2 miliar atau meningkat 4,2% jika dibandingkan dengan laba usaha pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.085,8 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada pendapatan usaha yang lebih besar dibandingkan kenaikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha. Namun, margin laba usaha tercatat menurun menjadi 58,8% pada tahun 2020 dari 61,4% pada tahun 2019.

EBITDA

EBITDA Perseroan dihitung dari laba usaha ditambah biaya depresiasi dan amortisasi. Pada tahun 2020, EBITDA tercatat sebesar Rp1.602,3 miliar, di mana EBITDA Perseroan mengalami sedikit peningkatan sebesar 8,4% dibandingkan dengan Rp1.478,0 miliar EBITDA pada tahun 2019. Margin EBITDA di tahun 2020 tercatat sebesar 83,4% dibandingkan dengan 83,6% pada tahun 2019.

Beban Lain-Lain – Bersih

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2020	2019	Perubahan 2019-2020
Kerugian Atas Pelepasan Aset Tetap	(34,6)	(164,1)	129,5
Beban Pajak	(42,8)	(10,1)	-32,7
Amortisasi Aset tak Berwujud	(6,6)	(6,6)	0
Beban Penalti	(3,5)	(5,3)	1,7
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs – Bersih	16,7	(1,7)	18,4
Penurunan Nilai Piutang Usaha – Bersih	(0,4)	(0,8)	0,4
Penurunan Nilai Persediaan	(16,7)	-	-16,7
Lain-Lain – Bersih	(7,3)	(13,1)	5,8
Jumlah Beban Lain-Lain – Bersih	(95,2)	(201,6)	106,4

Di tahun 2020 Perseroan mencatatkan beban lain-lain – bersih sebesar Rp95,2 miliar atau turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan beban lain-lain – bersih sebesar Rp201,6 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada kerugian atas pelepasan aset tetap.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Di tahun 2020 Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp708,8 miliar atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp228,4 miliar.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Deskripsi	2020	2019	Perubahan 2019-2020
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.502,4	1.876,9	-374,5
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(414,3)	(534,3)	120,0
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.211,5)	(1.128,7)	-82,7
Kenaikan (Penurunan) pada Kas dan Bank	(123,4)	213,9	-337,3

Deskripsi	2020	2019	Perubahan 2019-2020
Dampak Selisih Kurs pada Bank	(1,0)	0,6	-1,6
Kas dan Bank Awal Tahun	361,5	147,0	214,5
Kas dan Bank Akhir Tahun	237,2	361,5	-124,3

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan lainnya, pembayaran kepada manajemen dan karyawan, serta arus kas masuk dan keluar yang mencerminkan penerimaan serta pembayaran bunga dan pajak.

Pada akhir 2020, penerimaan kas dari pelanggan tercatat sebesar Rp1.902,7 miliar, pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp245,8 miliar, dan pembayaran kepada manajemen dan karyawan sebesar Rp139,6 miliar. Setelah diimbangi dengan penerimaan bunga serta penerimaan dan pembayaran pajak, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sejumlah Rp1.502,4 miliar pada tahun 2020, menurun 20,0% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.876,9 miliar.

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan properti investasi yang mencakup penambahan menara telekomunikasi dan kolokasi, pembayaran sewa lahan dibayar di muka dan juga penambahan aset tetap.

Pada tahun 2020, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk penambahan aset tetap sebesar Rp408,5 miliar. Secara keseluruhan, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2020 adalah sebesar Rp414,3 miliar, menurun 22,5% dari tahun sebelumnya sebesar Rp534,3 miliar.

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan terutama terdiri dari perolehan dari utang sindikasi, penerimaan dan pembayaran utang bank, pembayaran liabilitas sewa dan pembayaran beban keuangan.

Di tahun 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan sejumlah Rp1.211,5 atau meningkat 7,3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.128,7 miliar yang terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman sindikasi.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dijadikan sebagai ukuran terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar utang. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek melalui rasio kas dan rasio lancar. Di mana rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dan setara kas yang tersedia dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio solvabilitas atau disebut juga *leverage ratio* digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh Perseroan dengan dana yang dipinjam dari kreditur Perseroan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva Perseroan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank). Rasio solvabilitas antara lain mencakup rasio utang terhadap ekuitas dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, serta rasio utang terhadap jumlah aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Di tahun 2020, pencapaian rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Perusahaan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Uraian	2020	2019
Rasio Likuiditas (%)		
Rasio Kas	0,1	0,2
Rasio Lancar	0,8	1,1
Rasio Solvabilitas (x)		
Rasio Pinjaman* terhadap Ekuitas	1,9	2,4
Rasio Pinjaman* terhadap Aset	0,6	0,6
Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset	0,3	0,3

*) Pinjaman dalam USD yang diukur menggunakan kurs lindung nilai sesuai dengan fasilitas pinjaman

Kolektibilitas

Rata-rata periode kolektibilitas piutang merupakan jumlah piutang usaha dibagi dengan pendapatan dikali 365 hari. Periode kolektibilitas rata-rata Perseroan selama tahun 2020 adalah 116 hari dan di tahun 2019 berupa 167 hari, sedangkan rasio perputaran piutang di tahun 2020 adalah 3,1x dan di tahun 2019 sebesar 2,2x.

Berdasarkan penelaahan manajemen atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Uraian	2020	2019
Rasio Aktivitas		
Kolektibilitas Piutang (hari)	116	167
Perputaran Piutang (x)	3,1	2,2

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang

saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Berikut ini merupakan tabel struktur modal Perseroan yang terdiri dari:

Deskripsi	2020*	2019	2018
Pinjaman**			
Bank	6.848,7	7.052,2	7.359,7
Ekuitas	3.646,8	2.973,5	2.969,9
Total Modal yang Diinvestasikan	10.495,5	10.025,7	10.329,6

*) Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatat rasio pinjaman bersih terhadap LQA EBITDA sebesar 4,0x, sementara rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 1,9x.

**) Pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2020, tidak terdapat ikatan material baru sebagaimana diungkapkan pada pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Investasi Barang Modal

Kami membangun dan mengakuisisi *site* baru dan mengakuisisi portofolio *site* setelah mendapatkan kontrak sewa jangka panjang yang berdurasi 10 tahun dengan perusahaan operator telekomunikasi. Oleh karena itu sebagian besar belanja modal kami bersifat diskresioner. Sumber pendanaan untuk belanja modal tersebut berasal dari pendanaan internal dan pinjaman eksternal.

Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku dan Realisasinya serta Proyeksi Tahun Mendatang

Dalam menjalankan usahanya, manajemen Perseroan secara rutin menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan menentukan target kinerja Perseroan untuk tahun mendatang dengan berlandaskan pada kapasitas Perseroan sepanjang tahun berjalan.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Berdasarkan Keputusan Pengganti Rapat Direksi tanggal 5 Maret 2021, Perseroan melakukan perubahan Sekretaris Perusahaan yang sebelumnya dijabat oleh Juliawati Gunawan, digantikan oleh Antonius Ardityo Budi Susetiatmo dan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Prospek Usaha Perusahaan

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 berada pada kisaran 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi $3,0 \pm 1\%$. Sedangkan di sektor perbankan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit berkisar 5-7% dan DPK diproyeksikan tumbuh pada kisaran 7-9%. Meski perekonomian dunia dan perekonomian nasional mengalami perlambatan, namun prospek ekonomi Indonesia masih tetap baik. Diharapkan pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung dapat menjaga stabilitas keuangan nasional dan memberikan peluang pertumbuhan bagi dunia usaha.

Bagi industri telekomunikasi, infrastruktur merupakan investasi yang cukup signifikan. Tren yang berjalan kini menunjukkan bahwa infrastruktur sudah tidak lagi dikerjakan oleh operator penyedia jasa telekomunikasi dan mereka lebih memfokuskan diri kepada pengembangan jaringan dan peningkatan kualitas layanan. Sehingga, infrastruktur kini cenderung dikerjakan oleh perusahaan infrastruktur telekomunikasi seperti kami.

Prospek subsektor operator telekomunikasi dan menara telekomunikasi diperkirakan akan tetap positif pada tahun 2021. Ada dua katalis yang menjadi pendorongnya. Pertama, adanya tambahan tiga blok

spektrum 10MHz pada pita 2300MHz yang akan dilelang pemerintah. Kedua, implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang bakal membuka kesempatan operator telekomunikasi untuk dapat berbagi infrastruktur.

Di Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur telekomunikasi masih bisa ditingkatkan lebih jauh sehingga industri infrastruktur telekomunikasi masih memiliki ruang bertumbuh yang sangat luas, terutama jika didukung pertumbuhan yang sehat dan stabil pada industri telekomunikasi. Selain itu, tren pembangunan kota besar sebagai *smart city* juga menjadi potensi yang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, jumlah pengguna *mobile data* di Indonesia kian meningkat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan peningkatan tren di masyarakat yang semakin banyak bergantung pada teknologi *mobile* dan menggunakan aplikasi *ber-bandwidth* tinggi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlepas dari itu, konsumsi data per orang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Konsumsi data pun akan terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah startup dan usaha

kecil dan menengah yang akan mendorong adopsi teknologi digital di Indonesia.

Untuk memastikan layanan komunikasi tetap terjaga dengan baik, para operator telekomunikasi di negeri ini terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan 3G dan 4G LTE miliknya di mana para operator telekomunikasi akan meningkatkan penyebaran dari menara makro dan tiang *microcell*. Hal ini memberi peluang bagi Perseroan untuk membangun menara BTS dan kolokasi baru agar cakupan dan kualitas layanan para operator telekomunikasi tetap terjaga.

Berlandaskan asumsi tersebut, kami percaya bahwa para operator telekomunikasi akan terus berinvestasi dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan mereka agar dapat memenuhi permintaan data dari konsumen yang kian meningkat. Dengan rekam jejak dan portofolio jaringan fiber optik Perseroan, kami percaya bahwa Perseroan memiliki keahlian dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dari para operator telekomunikasi. Oleh karena itu, Perseroan akan terus memperkuat posisinya sebagai salah satu dari perusahaan penyedia infrastruktur menara independen terkemuka di Indonesia.

Aspek Pemasaran

Di tahun 2020, penetrasi pemasaran dan penjualan layanan Perseroan tetap difokuskan dalam penguatan sinergi dengan para operator telekomunikasi di Indonesia seiring dengan rencana *roll out* jaringan dari masing-masing operator. Selain itu, melalui entitas anak perusahaan, Perseroan juga fokus melakukan pemasaran dalam bidang pemanfaatan dan pengembangan jaringan kabel serat optik. Perseroan juga menyadari perlunya mencari pelanggan baru dan tidak bergantung kepada *existing customers* saja.

Dalam sektor bisnis jaringan serat kabel, selain membangun jaringan serat kabel untuk kebutuhan operator telekomunikasi, kami juga terus mengembangkan prospek layanan konektivitas jaringan buat perusahaan layanan internet dan *enterprise*, serta melakukan penetrasi bisnis di layanan infrastruktur *Fiber to the Home* (FTTH) dan juga bisnis *cloud*. Dalam hal ini, Perseroan berupaya tepat dalam menyusun strategi dan melihat peluang ke depan melalui integrasi solusi-solusi yang inovatif dan terkini sejalan dengan perkembangan tren teknologi telekomunikasi di Indonesia.

Strategi

1. Pengembangan Fokus Bisnis

Untuk memperkuat kompetensi inti dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi

berkelanjutan, Perseroan memformulasikan dan mengimplementasikan strategi pengembangan produk dan layanan yang berfokus pada perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi, termasuk memperlebar akses terhadap kapasitas *backhaul* jaringan serat optik dan jaringan *indoor antenna system* (DAS) di berbagai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran, serta optimalisasi layanan penyewaan atau kolokasi infrastruktur jaringan lain yang dimiliki Perseroan. Perseroan terus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan agar dapat secara menyeluruh bertumbuh dan bertransformasi menjadi perusahaan yang menyediakan jaringan infrastruktur yang seutuhnya.

Dalam menetapkan harga layanan, Perseroan senantiasa memperhatikan etika bisnis, kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, serta ketentuan yang dikeluarkan pihak regulator. Dengan demikian, Perseroan dapat meningkatkan kepercayaan baik dari pelanggan maupun calon pelanggan secara berkesinambungan, dan juga berkompetisi secara sehat.

2. Service Excellence

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, Perseroan meningkatkan kualitas

pelayanan dan memperkaya pengetahuan karyawan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan (*product knowledge*) didukung oleh simplikasi standar operasional perusahaan (SOP), serta dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui penajaman nilai inti Perseroan yang dibarengi dengan penerapan budaya Perseroan yang ditanamkan oleh Manajemen dalam upaya merealisasikan visi dan misi jangka panjang Perseroan.

Pangsa Pasar

Positioning Perseroan sebagai nomor tiga penyedia menara telekomunikasi independen terbesar yang tercatat di bursa Indonesia menjadi suatu nilai tambah tersendiri. Perseroan merupakan salah satu penyedia infrastruktur yang dapat diandalkan di Indonesia saat ini dan senantiasa berusaha untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Sebagai salah satu upaya untuk senantiasa menjaga posisi Perseroan di pangsa pasar industri infrastruktur telekomunikasi, Perseroan juga akan terus fokus untuk melakukan inovasi infrastruktur yang menunjang bisnis non menara untuk memperkaya nilai tambah yang dapat diberikan Perseroan kepada

pelanggan. Kondisi pasar saat ini dikaitkan terhadap kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang masih memiliki permintaan yang besar dengan semakin beragamnya aplikasi melalui media internet. Baik dari sisi kebutuhan akan jangkauan yang luas maupun kecepatan, kebutuhan ini akan tetap meningkat terutama mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Perseroan melalui salah satu anak perusahaannya yakni PT Bit Teknologi Nusantara (BIT) turut mendorong tingkat kompetisi dalam hal penyediaan produk yang semakin lengkap dengan kemampuan untuk melakukan layanan tambahan selain menara, misalnya termasuk penyediaan *mobile backhaul* ke lokasi menara milik Perseroan. Melalui BIT, Perseroan mengembangkan bisnisnya pada produk yang masih terhubung dengan bisnis inti Perseroan.

Persaingan di pasar yang semakin ketat, tentunya juga memerlukan kecepatan proses bisnis dan kebijakan yang lebih berfokus pada pasar (*market-driven policy*). Tidak hanya diversifikasi agar produk/layanan semakin lengkap, Perseroan juga perlu melakukan peningkatan secara terus menerus terhadap layanan Perseroan.

Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen kas memerlukan persetujuan para pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan Direksi. Dalam menetapkan pembayaran dividen kas beserta jumlahnya, Direksi akan mempertimbangkan usulannya yang didasarkan pada beberapa faktor, termasuk pencapaian hasil laba Perseroan,

ketersediaan cadangan, kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh, kebutuhan belanja modal dan kesempatan pengembangan usaha yang ada.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada tahun 2020, melalui RUPS Tahunan sesuai Akta Notaris Rini Yulianti S.H., notaris di Jakarta, No. 21 tanggal 22 Juli 2020, Direksi memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum

Rincian mengenai realisasi penggunaan dana penawaran umum Perseroan dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus			
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Penggunaan 1	Penggunaan 2	Penggunaan 3	Penggunaan 4
Penawaran Umum Terbatas II	19 Desember 2014	2.404.155	8.639	2.393.516	1.708.000	462.500	223.016	2.393.516

(dalam jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Sisa Dana Hasil Penggunaan Penawaran Umum
		Penggunaan 1	Penggunaan 2	Penggunaan 3	Penggunaan 4	
Penawaran Umum Terbatas II	19 Desember 2014	1.708.000	462.500	223.016	2.393.516	-

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Waran Seri I (WS I)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali lembar)

Jenis Efek	Tanggal Penerbitan	Total Efek yang Telah Diterbitkan (Lembar)*	Efek yang Telah Dikonversi		Jumlah Efek yang Tidak Dikonversikan (Lembar)**	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Sisa Dana Hasil Konversi
			Jumlah Konversi (Lembar)	Nilai (Rp)			
Waran Seri 1	6 Maret 2013	59.415.534	59.414.674	285.117	860	285.117	-

*) Pada saat penerbitan efektif, jumlah efek waran yang diterbitkan sejumlah 59.400.000 waran, berdasarkan surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-0284/JKU/0115 tanggal 6 Januari 2015 mengenai Laporan Penyesuaian Jumlah Waran Series I PT Solusi Tunas Pratama Tbk., jumlah efek waran menjadi sebesar 59.415.534 waran dengan harga pelaksanaan menjadi Rp3.367 per waran.

**) Jumlah efek yang tidak dikonversikan sebanyak 860 waran merupakan sisa waran series 1 yang tidak berlaku lagi karena tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.

Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi material yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi diungkapkan pada Catatan 29 pada Laporan Keuangan Konsolidasian. Adapun hubungan dan sifat saldo akun atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Berelasi	Hubungan dengan Perusahaan	Transaksi
1.	PT Sekawan Abadi Prima	Di bawah Pengendalian Bersama	Piutang Usaha, Utang Usaha dan Pendapatan
2.	Komisaris dan Direksi	Manajemen Kunci	Beban Imbalan Kerja

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Selama tahun 2020 tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap kinerja Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

Amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amendemen 2020): "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19".

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis".
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): "Akuntansi Sukuk";
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): "Akuntansi Wa'd"; dan Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen

PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2".

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi".

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Perseroan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen standar tersebut.

Informasi Kelangsungan Usaha

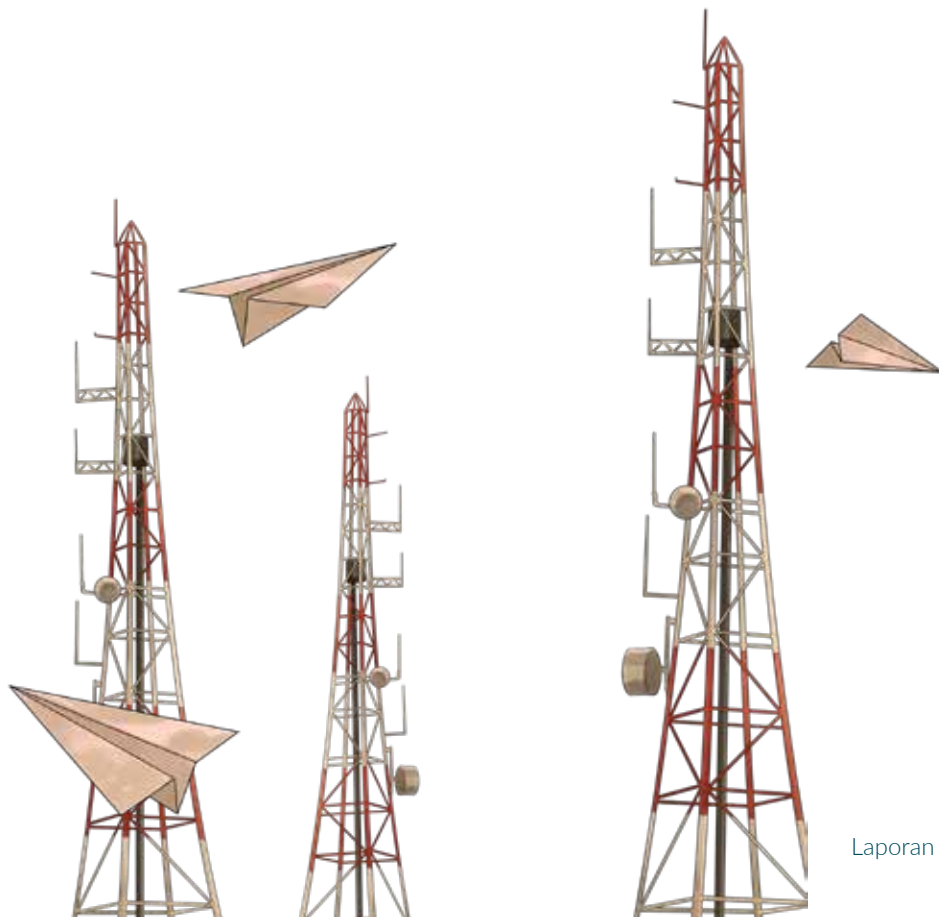
Sebagian besar pendapatan Perseroan pada segmen *tower business* di tahun 2020 berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, Telkom Group (termasuk PT Telkom Tbk, PT Telekomunikasi Selular dan PT Dayamitra Telekomunikasi) dan PT Indosat Tbk. Selain dari *tower business*, kelangsungan usaha Perseroan juga ditunjang oleh *non-tower business* untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan Perseroan. Kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi menjadi permintaan yang besar seiring dengan semakin beragamnya aplikasi melalui media internet. Baik dari sisi kebutuhan akan jangkauan yang luas maupun kecepatan, kebutuhan ini akan tetap meningkat terutama mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Meskipun penetrasi internet melalui seluler cukup luas, hal ini berbeda dengan penetrasi internet melalui jaringan pita lebar (*broadband*) yang dinilai belum mencukupi saat ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Perseroan melalui salah satu anak perusahaannya yakni PT Bit Teknologi Nusantara (BIT) mengembangkan segmen *non-tower business* yang masih terhubung dengan bisnis inti Perseroan, antara lain melalui

penyediaan *mobile backhaul* ke lokasi menara milik Perseroan serta pengembangan *Data Business* maupun solusi layanan lainnya.

Melalui upaya inovasi dan pengembangan usaha pada kedua segmen tower dan non-tower, Perseroan yakin akan keberlangsungan usahanya untuk terus beroperasi guna memenuhi harapan para pemegang saham.

Di sisi lain, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, telah terjadi pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa Perseroan tidak mengalami dampak signifikan per tanggal posisi keuangan. Lebih lanjut, bisnis Perseroan tidak mengalami perubahan khususnya tidak terdapat penurunan penjualan dan laba tahun berjalan dari periode sebelumnya. Manajemen menyatakan bahwa pandemi Covid-19 saat ini tidak berdampak pada Perseroan seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan konektivitas yang dapat diandalkan baik komunikasi seluler maupun internet.



05

TATA KELOLA PERUSAHAAN



Tata Kelola Perusahaan

Untuk dapat mewujudkan perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen STP untuk mendorong terwujudnya perusahaan yang kokoh dan independen.

Perseroan percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting untuk keberlanjutan kinerja Perseroan. Untuk itu, STP berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya sistem manajemen yang efisien dan efektif, sehingga mewujudkan nilai bagi pemangku kepentingan.

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik dan panduan yang berlaku secara umum bagi perusahaan publik. Komitmen ini ditegakkan di semua tingkat organisasi, di mana prinsip dan praktik terbaik tata kelola ini diterapkan dalam aktivitas operasi sehari-hari dan ditinjau kembali untuk menjamin terpenuhinya tujuan guna mewujudkan nilai pemegang saham untuk para pemangku kepentingan.

Prinsip GCG yang dimaksud terdiri dari lima prinsip utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

1. Transparansi

Perseroan berupaya untuk memastikan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material serta relevan terkait aktivitas Perseroan. Sebagai perwujudan prinsip transparansi, Perseroan berusaha

semaksimal mungkin untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu cara Perseroan untuk mempertahankan objektivitas dalam menjalankan usaha.

2. Akuntabilitas

Agar sistem pengelolaan perusahaan bisa terlaksana dengan lebih efektif, Perseroan beserta entitas anak dikelola dengan kejelasan struktur organisasi, fungsi, sistem, serta peran dan tanggung jawab Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan maupun seluruh karyawan.

3. Tanggung Jawab

Perseroan berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dan memastikan bahwa Perseroan dikelola untuk menjadi perusahaan yang sehat, taat pada hukum dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

4. Independensi

Perseroan mendorong setiap unit kerja agar melakukan peran serta fungsinya masing-masing secara profesional dan independen tanpa ada benturan kepentingan atau tanpa pengaruh secara berlebihan dari pihak ataupun kepentingan tertentu. Upaya tersebut mencakup meminimalisir benturan kepentingan dalam kegiatan manajemen dan operasional, dengan cara memastikan agar rangkap jabatan dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap Perseroan.

5. Keadilan

Perseroan berupaya untuk menjamin adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu,

Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan karier tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG di seluruh tingkatan organisasi mengacu kepada ketentuan yang berlaku, Piagam Audit Internal Perseroan dan *Code of Conduct* Perseroan yang diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit setingkat Dewan Komisaris, dan Komite setingkat Direksi;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal dan Manajemen Risiko;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Pelaksanaan pemilihan Audit Eksternal dan pembentukan Satuan Kerja Audit Internal;
6. Penyusunan Rencana Bisnis Perseroan;
7. Pelaksanaan transparansi laporan keuangan dan non-keuangan Perseroan.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme GCG merupakan proses implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Sistem tersebut menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme GCG juga menjelaskan prosedur pengambilan keputusan dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan GCG yang ada di lingkungan perusahaan agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG. Oleh karena itu, Perseroan selalu memasukkan peninjauan kembali terhadap kebijakan GCG dalam pembahasan rencana kerja GCG setiap tahunnya. Seluruh kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan GCG dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme *check-and balance* yang efektif.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan salah satu bagian dari kebijakan GCG yang mengatur mekanisme dalam penerapan GCG. Mekanisme ini meliputi prosedur dan aturan pengawasan kinerja pihak pengambil keputusan, khususnya formulasi kebijakan yang akan ditempuh.

Kebijakan GCG di Perseroan terdiri dari:

1. **Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris**
Dalam menjalankan tata laksana kerja, Direksi dan Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang ketentuannya mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan. Anggaran Dasar menjelaskan tahapan aktivitas yang terstruktur dan sistematis, seperti ketentuan mengenai keanggotaan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pedoman kerja Direksi dan Komisaris. Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini disusun berdasarkan regulasi (Undang-Undang/Peraturan) dan praktik terbaik yang telah disepakati bersama sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Anggaran Dasar Perusahaan juga menjelaskan secara rinci hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam melaksanakan tugas, sehingga tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien.
2. ***Code of Conduct***
Code of Conduct merupakan pedoman perilaku dan etika bisnis bagi setiap insan Perseroan dalam menjalankan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan lingkup pekerjaannya di Perseroan.
3. **Piagam Komite Audit**
Piagam Komite Audit adalah pedoman yang menjelaskan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, Komite Audit merujuk kepada Piagam yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi ini.

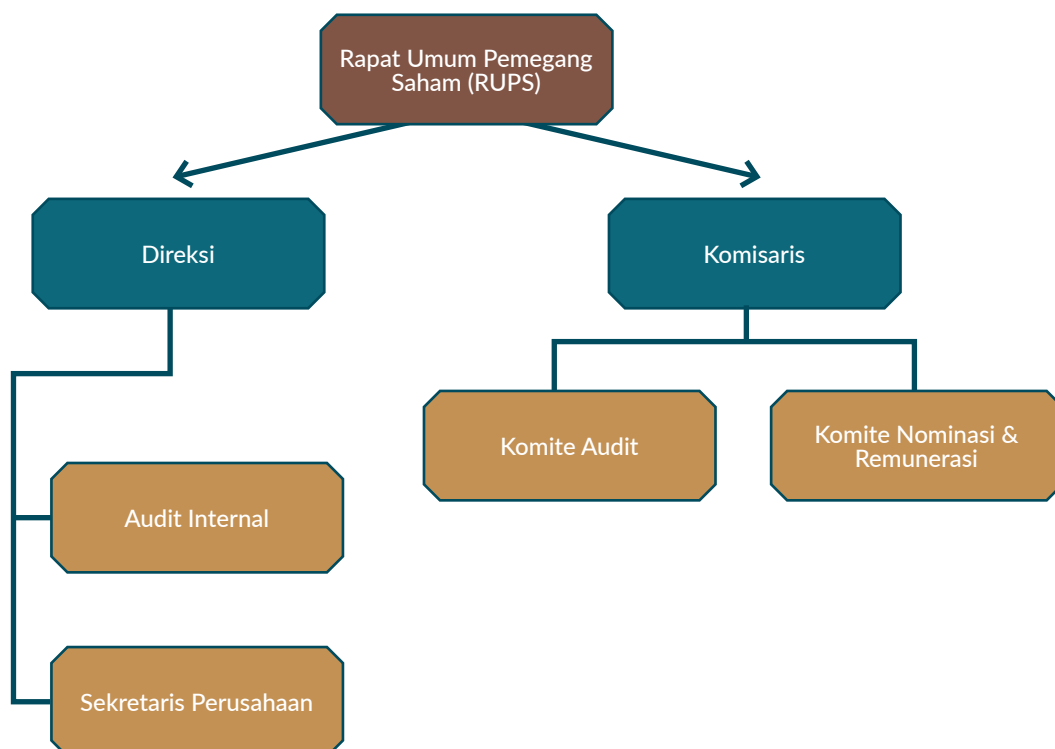
4. Piagam Internal Audit

Piagam adalah dokumen formal yang mengelaborasi visi, misi, tata nilai, kode etik dan norma, ruang lingkup, tugas, kewenangan, tanggung jawab dan standar pelaksanaan Audit. Piagam Internal Audit menjadi bukti komitmen dan dukungan manajemen serta komitmen fungsi Satuan Pengawasan Internal untuk menjalankan fungsinya. Piagam Internal Audit ditandatangani oleh Direktur Utama dan satu orang Direktur lainnya.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, organ perusahaan tertinggi di dalam Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun kepengurusan di Perseroan menganut sistem dua dewan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsi masing-masing sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan hubungan tata kelola, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasannya dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi, sedangkan Direksi dalam melakukan fungsi pengelolaannya dibantu oleh Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perseroan terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku yang bersangkutan dan salah satu agenda penting RUPS Tahunan adalah membahas pengesahan Laporan Tahunan. Sementara RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan/permintaan pemegang saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan jangka panjang Perseroan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara terbuka, wajar, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Berdasarkan surat OJK No. S-92/d.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, di mana diatur ketentuan relaksasi batas waktu penyelenggaraan RUPS menjadi diperpanjang 2 bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS. Sehingga pada tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 21 tertanggal 22 Juli 2020 yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

No.	Agenda	Hasil
1.	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik "Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Rekan" dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019. 3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 4. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00580/2.1030/AU.1/03/1115-2/1/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020.
2.	Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

No.	Agenda	Hasil
3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.	1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4.	Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantien Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.	1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi; 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5.	Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan pengubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK 15; dan 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

No.	Agenda	Hasil
6.	Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS • Komisaris Utama: Bapak Jeffrey Yuwono • Wakil Komisaris Utama: Bapak Ludwig Indrawan • Komisaris: Bapak Thong Thong Sennelius • Komisaris Independen: Bapak Muhamad Senang Sembiring • Komisaris Independen: Bapak Harry M. Zen DIREKSI • Direktur Utama: Bapak Nobel Tanihaha • Direktur: Ibu Juliawati Gunawan • Direktur: Ibu Tjhin Khe Mei 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Usai penyelenggaraan RUPS Tahunan, Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 22 tertanggal 22 Juli 2020 yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

No.	Agenda	Hasil
1.	Persetujuan atas rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang dolar Amerika Serikat (USD) di mana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan dapat dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).	Persetujuan atas rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan dapat dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan), serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.
2.	Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemulihan usaha Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.	Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemulihan usaha Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan aktivitas usaha yang dijalankan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali oleh RUPS. Setiap anggota

Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, kehati-hatian, bertanggung jawab serta independen.

Penunjukan, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebelum dan sesudah RUPS Tahunan, adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tanggal 22 Juli 2020

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	Jeffrey Yuwono	Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2019
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
4.	Erry Firmansyah	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
5.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017

Komposisi Dewan Komisaris sesudah RUPS Tahunan Tanggal 22 Juli 2020

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	Jeffrey Yuwono	Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020
4.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020
5.	Harry M. Zen	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020

Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
 - » Seorang Komisaris Utama;
 - » Seorang Wakil Komisaris Utama; dan
 - » Seorang atau lebih Komisaris lainnya termasuk Komisaris Independen;
 Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk untuk setiap saat menjaga jumlah Komisaris Independen minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; atau
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- v. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- vi. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, yaitu secara umum sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
3. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Komisaris Independen

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Independensi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Yang di maksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
3. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
4. Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
5. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perseroan;
6. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Independensi Dewan Komisaris

Mengacu pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen, Perseroan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu Bapak Harry M. Zen dan Bapak Muhamad Senang Sembiring. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota Dewan Komisaris bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun, serta mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.33/POJK.04.2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan; serta
4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, kedua Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan independensi Komisaris Independen telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04.2014.

Tata Cara Penunjukan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat wajib mengikuti ketentuan:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
3. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Tata cara penunjukan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahun ketiga setelah tanggal pengangkatan

para anggota, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

2. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 6 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Jeffrey Yuwono	Komisaris Utama	6	6	100%
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	6	5	83%
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	6	6	100%
4.	Erry Firmansyah*	Komisaris Independen	6	0	0%
5.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	6	6	100%
6	Harry M. Zen**	Komisaris Independen	6	3	50%

*) Resmi tidak menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 22 Juli 2020

**) Resmi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 22 Juli 2020

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda
21 Januari 2020	Membahas isu teraktual terkait bisnis dan kinerja Perseroan secara khusus serta industri telekomunikasi secara umum.
17 Maret 2020	Membahas isu teraktual terkait bisnis dan kinerja Perseroan secara khusus serta industri telekomunikasi secara umum.
4 Mei 2020	Membahas isu teraktual terkait bisnis dan kinerja Perseroan secara khusus serta industri telekomunikasi secara umum.
28 Juli 2020	Membahas isu teraktual terkait bisnis dan kinerja Perseroan secara khusus serta industri telekomunikasi secara umum.

Tanggal	Agenda
21 September 2020	Membahas isu teraktual terkait bisnis dan kinerja Perseroan secara khusus serta industri telekomunikasi secara umum.
11 November 2020	Membahas isu teraktual terkait bisnis dan kinerja Perseroan secara khusus serta industri telekomunikasi secara umum.

Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya, serta pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS di mana Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggung jawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode tahun buku.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi merupakan komite yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sejauh ini komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan dari penunjukan komite tersebut. Dewan Komisaris tidak menemukan ketidaksesuaian ataupun penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi tersebut ataupun bagian daripadanya.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris Perseroan tidak mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi atau seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan oleh Dewan Komisaris yang lebih fokus pada melakukan pengawasan dan memantau agar aktivitas Perseroan berjalan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seiring dengan strategi bisnis Perseroan yang fokus pada pembaruan struktur organisasi, penyelarasan budaya Perseroan melalui penajaman serta internalisasi nilai-nilai inti Perseroan, pengembangan serta pemberdayaan sumber daya manusia, dan perbaikan menyeluruh sistem operasional Perseroan. Selain itu juga dikarenakan di tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 sehingga Dewan Komisaris tidak dapat mengikuti program pelatihan dan pengembangan.

Direksi

Sebagai organ eksekutif tertinggi di Perseroan, Direksi bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan operasional Perseroan, dalam upaya mencapai target yang ditentukan untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi juga mewakili Perseroan dalam persoalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penunjukan, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014.

Selama tahun 2020 terdapat perubahan pada komposisi Direksi Perseroan. Sehingga, susunan anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi sebelum RUPS Tahunan Tanggal 22 Juli 2020

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
2.	Juliawati Gunawan	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017
3.	Tommy Gustavi Utomo	Direktur Independen	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2017

Komposisi Direksi sesudah RUPS Tahunan Tanggal 22 Juli 2020

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020
2.	Juliawati Gunawan	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020
3.	Tjhin Khe Mei	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020

Komposisi dan kriteria anggota Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integrasi yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya yang sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - v. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - vi. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup hal-hal secara umum sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. Tugas pokok Direksi adalah;
 - a. Mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus harta kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat Anggaran Tahunan Perseroan dan wajib disampaikan pada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan batasan bahwa untuk hal-hal dan keputusan-keputusan berikut ini tidak dapat dilakukan Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, dimana persetujuan tersebut termasuk persetujuan dari Wakil Komisaris Utama.

Tata Cara Penunjukan Anggota Direksi

Anggota Direksi yang diangkat wajib mengikuti ketentuan:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
3. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan.

Tata cara penunjukan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahun ketiga setelah tanggal pengangkatan para anggota, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
2. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah melakukan rapat setidak-tidaknya 12 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	12	12	100%
2.	Juliawati Gunawan	Direktur	12	12	100%
3.	Tommy Gustavi Utomo *	Direktur Independen	12	3	25%
4.	Tjhin Khe Mei**	Direktur	12	5	42%

*) Resmi tidak menjabat sebagai Direktur Independen sejak 22 Juli 2020

**) Resmi menjabat sebagai Direktur sejak 22 Juli 2020

Agenda Rapat Direksi

Tanggal	Agenda
28 Januari 2020	Pembahasan operasional Perseroan
25 Februari 2020	Pembahasan operasional Perseroan
24 Maret 2020	Pembahasan operasional Perseroan
24 April 2020	Pembahasan operasional Perseroan
20 Mei 2020	Pembahasan operasional Perseroan
29 Juni 2020	Pembahasan operasional Perseroan
27 Juli 2020	Pembahasan operasional Perseroan
31 Agustus 2020	Pembahasan operasional Perseroan
30 September 2020	Pembahasan operasional Perseroan
4 November 2020	Pembahasan operasional Perseroan
2 Desember 2020	Pembahasan operasional Perseroan
17 Desember 2020	Pembahasan operasional Perseroan

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2020, Perseroan melaksanakan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Jeffrey Yuwono	Komisaris Utama	3	3	100%
2.	Ludwig Indrawan	Wakil Komisaris Utama	3	1	100%
3.	Thong Thong Sennelius	Komisaris	3	3	100%
4.	Erry Firmansyah*	Komisaris Independen	3	0	0%
5.	Muhamad Senang Sembiring	Komisaris Independen	3	3	100%
6.	Harry M. Zen**	Komisaris Independen	3	2	67%
7.	Nobel Tanihaha	Direktur Utama	3	3	100%

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
8.	Juliawati Gunawan	Direktur	3	3	100%
9.	Tommy Gustavi Utomo***	Direktur Independen	3	0	0%
10.	Tjhin Khe Mei****	Direktur	3	2	67%

*) Resmi tidak menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 22 Juli 2020

**) Resmi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 22 Juli 2020

***) Resmi tidak menjabat sebagai Direktur Independen sejak 22 Juli 2020

****) Resmi menjabat sebagai Direktur sejak 22 Juli 2020

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal	Agenda
4 Mei 2020	Membahas strategi Perseroan dalam usahanya mencapai target dan membahas isu aktual terkait bisnis Perseroan dan strategi Perseroan dalam menghadapinya.
28 Juli 2020	Membahas strategi Perseroan dalam usahanya mencapai target dan membahas isu aktual terkait bisnis Perseroan dan strategi Perseroan dalam menghadapinya.
18 Desember 2020	Membahas dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan – Tahun Buku 2021.

Informasi mengenai Keputusan RUPS

Hingga 31 Desember 2020, pelaksanaan keputusan RUPS untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun buku 2020, terdapat satu keputusan RUPS 2020 yang belum dilaksanakan Perseroan yaitu Persetujuan atas rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan dapat dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).

Belum dilaksanakannya keputusan tersebut disebabkan karena kondisi pasar yang belum menguntungkan akibat pandemi Covid-19 sehingga Perseroan memutuskan untuk menunda pelaksanaan penerbitan obligasi tersebut.

Penilaian Kinerja Direksi

Direktur Utama melakukan kajian atas kinerja pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan oleh Anggota Direksi selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya satu kali dalam setahun berdasarkan kriteria-kriteria tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan pertimbangan dan masukan Direktur Utama, di mana evaluasi kinerja Direksi tersebut dilaporkan kepada pemegang saham dan tertuang di dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Komite Pendukung Tugas Direksi

Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan merupakan fungsi yang membantu Direksi dalam menjalankan tata kelola Perusahaan. Sejauh ini Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan dari pembentukan fungsi tersebut. Direksi tidak menemukan ketidaksesuaian ataupun penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan ataupun bagian daripadanya.

Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui prosedur yaitu RUPS melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Remunerasi

Prinsip penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Sementara struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi turut mengacu pada ketentuan sebagaimana telah ditetapkan disetujui oleh RUPS tersebut, dengan komponen penghasilan yang dimaksud terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Tantiem/Insentif Kinerja.

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Remunerasi & Nominasi mengacu kepada indikator agar sesuai dengan tujuan dari kebijakan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. *Key Performance Indicator* (KPI).
2. Kinerja Perseroan.
3. Hasil *benchmarking* remunerasi industri terkait.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan untuk melakukan analisis dan evaluasi semua informasi tersebut serta menghasilkan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuannya dan/atau disampaikan kepada RUPS.

RUPS Tahunan 2020 yang diselenggarakan pada 22 Juli 2020 memutuskan bahwa pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Pada tahun 2020, jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp1,7 miliar dan Rp18 miliar. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp1,6 miliar rupiah dan Rp17 miliar rupiah.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Dalam kepengurusan Perseroan, hubungan keluarga dan keuangan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat melalui tabel berikut.

Nama	Hubungan Afiliasi dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jeffrey Yuwono	-	√	-	√	√	-
Ludwig Indrawan	-	√	-	√	-	√
Thong Thong Sennelius	-	√	-	√	√	-
Erry Firmansyah*	-	√	-	√	-	√
Harry M. Zen**	-	√	-	√	-	√
Muhamad Senang Sembiring	-	√	-	√	-	√
Nobel Tanihaha	-	√	-	√	√	-
Juliawati Gunawan	-	√	-	√	-	√
Tommy Gustavi Utomo***	-	√	-	√	-	√
Tjhin Khe Mei****	-	√	-	√	-	√

*) Resmi tidak menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 22 Juli 2020

**) Resmi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 22 Juli 2020

***) Resmi tidak menjabat sebagai Direktur Independen sejak 22 Juli 2020

****) Resmi menjabat sebagai Direktur sejak 22 Juli 2020

Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja dan operasi Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2017 mengenai pengangkatan Komite Audit Perseroan, periode jabatan Anggota Komite Audit Perseroan berakhir pada bulan Mei 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Oktober 2020, diputuskan untuk mengangkat Komite Audit dengan periode tiga tahun sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan Mei 2023. Adapun susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tanggal 3 Oktober 2017

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1.	Muhamad Senang Sembiring (Komisaris Independen)	Ketua	Mei 2017 – Oktober 2020
2.	Sujoko Martin (Pihak Independen)	Anggota	Mei 2017 – Oktober 2020
3.	Anwar Muljadi Arif (Pihak Independen)	Anggota	Mei 2017 – Oktober 2020

Komposisi Komite Audit Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tanggal 7 Oktober 2020

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1.	Harry M. Zen (Komisaris Independen)	Ketua	Oktober 2020 – Mei 2023
2.	Sujoko Martin (Pihak Independen)	Anggota	Oktober 2020 – Mei 2023
3.	Anwar Muljadi Arif (Pihak Independen)	Anggota	Oktober 2020 – Mei 2023

Profil Anggota Komite Audit

Muhamad Senang Sembiring

Ketua Komite Audit*

Profil Muhamad Senang Sembiring dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris, bab Laporan Manajemen.

*) Periode Mei 2017 – Oktober 2020

Harry M. Zen

Ketua Komite Audit**

Profil Harry M. Zen dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris, bab Laporan Manajemen.

**) Periode Oktober 2020 – Mei 2023

Sujoko Martin

Anggota Komite Audit

Usia

52 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukkan

Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Oktober 2020

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan

Riwayat Jabatan

- Memulai karier di PT Astra International Tbk dengan posisi terakhir sebagai Head of Corporate Accounting (1992-2004)
- Head of Accounting & Control PT United Tractors, Tbk (2004-2009)
- Direktur Finance PT Bina Pertiwi (wholly owned subsidiary of PT United Tractors) (2009-2010)
- Direktur Finance dan IT PT Bukit Makmur Mandiri Utama (2010-2014)
- CFO dan Board Risk Committee Samko Timber Limited, Singapore (2015-Februari 2017)
- CFO PT Artamulia Tatapratama (Juli 2017-Juli 2018)
- Direktur PT Putra Perkasa Abadi (Desember 2018-sekarang)

Anwar Muljadi Arif

Anggota Komite Audit

Usia

61 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukkan

Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Oktober 2020

Riwayat Pendidikan

- Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan (1985)
- Memperoleh gelar PPAk di Universitas Indonesia (2004)

Riwayat Jabatan

- Drs Utomo & Co – SGV & Co - Audit Staff to Audit Manager Group (1985-1991)
- Prasetyo, Utomo & Co – Arthur Andersen & Co-Audit AW Manager (1991-1994)
- Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja – Ernst & Young – Senior Manager (1994-2003)
- Purwantono, Suherman & Surja – Ernst & Young – Associate Director (2003-2015)

Independensi Anggota Komite Audit

1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan dua (2) orang anggota dari profesional sebagai pihak independen yang keduanya berasal dari luar lingkungan Perseroan yaitu Sujoko Martin dan Anwar Muljadi Arif. Anggota dan Ketua Komite Audit bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan keuangan, keluarga, atau pun bisnis dengan Perseroan selain dari remunerasi yang diterima karena pelaksanaan tugas mereka selaku Komite Audit dan Dewan Komisaris.
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Pihak Independen adalah pihak diluar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 April 2012 dan sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 April 2016.

Struktur isi Piagam Komite Audit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Pendahuluan
2. Tujuan Pembentukan Komite Audit
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
4. Wewenang
5. Komposisi dan Struktur Komite Audit
6. Persyaratan Komisaris Independen
7. Syarat Keanggotaan Komite Audit
8. Etika Kerja
9. Pelaksanaan Kerja

10. Prosedur Pengaduan
11. Masa Tugas
12. Kebijakan Anti Korupsi dan Pedoman Operasional
13. Pemberlakuan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh tim auditor eksternal dan internal.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 4 kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

No.	Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Muhamad Senang Sembiring (Komisaris Independen)	Ketua	4	3	75%
2.	Harry M. Zen (Komisaris Independen)	Ketua	4	1	25%
3.	Sujoko Martin (Pihak Independen)	Anggota	4	4	100%
4.	Anwar Muljadi Arif (Pihak Independen)	Anggota	4	4	100%

Pelatihan Anggota Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Audit tidak mengikuti pelatihan terkait baik yang diselenggarakan oleh Perseroan maupun pihak eksternal.

Laporan Kegiatan Komite Audit pada Tahun Buku

Komite Audit telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, rapat Komite Audit telah membahas dan memberikan rekomendasi atas beberapa hal berikut:

1. Komite memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Perseroan secara berkala;
2. Komite melakukan kajian terhadap usulan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020 dan 2021;
3. Komite melakukan pembahasan atas perencanaan audit ekstern tahun 2020 dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal;

4. Komite memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2020, memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan dan memberikan rekomendasi di antaranya memastikan Pengembangan Teknologi Informasi;
5. Komite memantau penerapan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku;
6. Komite memantau tindakan dan penanganan kasus internal *fraud*;
7. Komite melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Perseroan.

Komite Remunerasi & Nominasi

Komite Remunerasi & Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No.34/2014 oleh kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Susunan Komite Remunerasi & Nominasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 2 Oktober 2017 mengenai pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, periode jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berakhir pada bulan Mei 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Oktober 2020, diputuskan untuk mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan periode 3 tahun sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan Mei 2023. Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komposisi Nominasi dan Remunerasi Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tanggal 2 Oktober 2017

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1.	Erry Firmansyah (Komisaris Independen)	Ketua	Mei 2017 – Juli 2020
2.	Jeffrey Yuwono (Komisaris Utama)	Anggota	Juli 2019 – Oktober 2020
3.	Ludwig Indrawan (Wakil Komisaris Utama)	Anggota	Mei 2017 – Oktober 2020

Komposisi Nominasi dan Remunerasi Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tanggal 7 Oktober 2020

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1.	Muhamad Senang Sembiring (Komisaris Independen)	Ketua	Oktober 2020 – Mei 2023
2.	Jeffrey Yuwono (Komisaris Utama)	Anggota	Oktober 2020 – Mei 2023
3.	Ludwig Indrawan (Wakil Komisaris Utama)	Anggota	Oktober 2020 – Mei 2023

Profil Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi & Nominasi, terutama untuk Muhamad Senang Sembiring, Jeffrey Yuwono, dan Ludwig Indrawan dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris, bab Laporan Manajemen.

Independensi Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi & Nominasi telah memenuhi kriteria independensi berikut ini:

1. Ketua merupakan Komisaris Independen dan anggota lainnya merupakan anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite tidak berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Piagam Komite Remunerasi & Nominasi

Perseroan tidak memiliki Piagam Komite Remunerasi & Nominasi namun Komite Remunerasi & Nominasi menjalankan fungsinya berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris seperti yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi adalah memformulasikan remunerasi dari anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan baik dalam bentuk tunai atau apapun (termasuk namun tidak terbatas pada gaji, tunjangan, bonus, intensif, dan pesangon).

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi & Nominasi tidak mengadakan rapat khusus untuk pembahasan aspek remunerasi & nominasi di Perseroan.

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Remunerasi & Nominasi tidak mengikuti pelatihan terkait baik yang diselenggarakan oleh Perseroan maupun pihak eksternal.

Laporan Kegiatan Komite Remunerasi & Nominasi pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2020, Komite Remunerasi & Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas struktur organisasi Perseroan.
2. Memberikan usulan rekomendasi remunerasi dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Profil dan Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Sekretaris Perusahaan

Saat ini jabatan Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Juliawati Gunawan yang berdomisili di Jakarta dan diangkat berdasarkan Surat Penunjukan oleh Direksi Perusahaan No. 015/DIR-STP/CORSEC/III/2011 perihal Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan tertanggal 2 Maret 2011.

Sekretaris Perusahaan

Juliawati Gunawan

Usia

50 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Surat Penunjukan No. 015/DIR-STP/CORSEC/III/2011 tanggal 2 Maret 2011

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara (1993)

Riwayat Jabatan

- Auditor dan Konsultan di Prasetyo, Utomo & Co (Andersen Worldwide Indonesia) dan Ernst & Young Indonesia (1992-2003)
- Financial Controller PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (2009-Juni 2011)
- Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (Juni 2011-sekarang)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama dan berperan dalam menjaga kelancaran hubungan antara Perusahaan dengan pemegang saham, regulator, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk membantu Direksi dalam hal:

1. Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis Perseroan dan menjalin hubungan baik dengan para pihak lembaga penunjang industri pasar modal.
2. Memastikan Perseroan menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyelenggarakan kegiatan RUPS.
4. Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara Direksi dan manajemen dengan pemangku kepentingan dalam rangka membangun citra Perseroan.
5. Menyelenggarakan kegiatan serta memfasilitasi hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan.
6. Memantau Daftar Pemegang Saham Perseroan.
7. Memonitor perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menyebarkan informasi kepada semua unsur dalam organisasi yang menyangkut program-program Perseroan, termasuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi Perseroan.

Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Kegiatan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2020 termasuk:

1. Menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan;
2. Menyelenggarakan satu (1) kali paparan publik (*public expose*); dan
3. Memastikan pemenuhan terhadap kepatuhan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2020, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pelatihan dan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengungkapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan.
2. Sosialisasi Ketentuan Mengenai Keuangan Berkelanjutan-Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017.
3. Penilaian Tata Kelola Perusahaan dan *sharing* terkait Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

Audit Internal

Perseroan menyadari betapa pentingnya sistem pengendalian internal yang baik di Perseroan dan memastikan bahwa sistem yang dimiliki sudah cukup lengkap dan memadai. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan membentuk Unit Audit Internal Perusahaan pada 15 Agustus 2011. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 27 Mei 2020 memutuskan untuk menunjuk dan mengangkat Bastianus H. Freddy sebagai Ketua Audit Internal.

Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang independen terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal Perseroan dan sistem manajemen risiko. Unit Audit Internal juga berperan untuk memberikan penjaminan kualitas tata kelola seluruh bagian Perseroan. Tugas-tugas Unit Audit Internal ini dicapai dengan melakukan audit rutin dan menyeluruh terhadap semua departemen, fungsi, dan proses yang ada di Perseroan, dengan berfokus pada bagian yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi sehubungan dengan kemungkinannya dalam memberikan pengaruh yang dapat merugikan kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Ketua Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang anggota, yaitu 1 Kepala Departemen dan 1 (satu) orang Staf Audit Internal. Seluruh anggota Unit Audit Internal tersebut memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi dan pengalaman kerja sebelumnya sebagai auditor internal dan atau auditor eksternal.

Profil Ketua Unit Audit Internal

Bastianus H. Freddy*

Ketua Unit Audit Internal

Usia

39 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukkan

Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 28 Mei 2020

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Atmajaya, Jakarta (2004)

Riwayat Jabatan

- Staf Audit Internal di PT Perdana Gapura Prima Group (2004)
- Manajer Audit di Deloitte Indonesia (2009-2010)
- Asisten Manajer di PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia (2010-2013)
- Ketua Audit Internal di PT Air Asia Indonesia Tbk (2013-2020)
- Ketua Unit Audit Internal di PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2020-sekarang)

*) Resmi diangkat sebagai Ketua Audit Internal per tanggal 27 Mei 2020.

Pelatihan Unit Audit Internal

Hingga 31 Desember 2020 tidak ada pelatihan terkait audit internal baik yang diselenggarakan oleh Perseroan ataupun mengikuti pelatihan dari pihak eksternal.

Struktur dan Posisi Audit Internal

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal dalam Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Ketua Unit Audit Internal.
2. Ketua Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Ketua Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Ketua Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Ketua Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Unit Audit Internal.
6. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Ketua Unit Audit Internal wajib diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal mengacu kepada Piagam Audit Internal yang telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 16 September 2016.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen formal yang menjelaskan struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik serta independensi dan objektivitas Auditor Internal. Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan, Unit Audit Internal menyusun prioritas objek audit tahunan dalam rencana audit internal dan memfokuskan pada unit usaha atau prospek bisnis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas operasional dan atau laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Audit Internal merupakan kegiatan keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki

operasional Perseroan, melalui pendekatan sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan.

Unit Audit Internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Dalam struktur organisasi, Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Audit Eksternal

Dalam menyusun laporan keuangan dan guna meningkatkan fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM International). Penunjukan KAP Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ini dimaksudkan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019. Penunjukan KAP tersebut dilakukan berdasarkan kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mendelegasikan kewenangan penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ("KAP AAJAM") sebagai auditor eksternal Perusahaan telah dilakukan sejak tahun buku 2011, maka periode penugasan KAP AAJAM terhadap jasa yang diberikan kepada Perusahaan tercatat sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

Perseroan dan KAP AAJAM tidak memiliki hubungan afiliasi kekeluargaan dan keuangan yang mampu mempengaruhi independensi auditor eksternal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Jasa yang diberikan kepada Perseroan selama tahun 2020 adalah audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Laporan keuangan tahunan Perseroan memperoleh opini wajar tanpa modifikasi. Selain audit atas laporan keuangan, Perseroan tidak menggunakan jasa lain dari KAP AAJAM.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta telah sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Manajemen Risiko

Dalam perjalanannya, Perseroan senantiasa menghadapi perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang sangat pesat sehingga menimbulkan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Melalui manajemen risiko, Perseroan berusaha meminimalkan terjadinya ancaman dan memaksimalkan peluang yang ada. Penerapan manajemen risiko di Perseroan mengacu pada berbagai pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang juga berlaku di industri.

Penerapan sistem manajemen risiko yang tepat sasaran dan intensif diharapkan mampu memberi manfaat yang berkelanjutan berupa:

1. Penyediaan informasi kepada pihak manajemen mengenai eksposur risiko yang dihadapi.
2. Peningkatan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis.
3. Penilaian risiko yang melekat pada setiap produk atau kegiatan usaha Perseroan.

Risiko yang Dihadapi Perseroan dan Upaya Pengelolaan Risiko

Beberapa risiko utama yang memiliki pengaruh penting terhadap kegiatan usaha Perusahaan, antara lain:

Profil Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Operasional	• Menerapkan sistem dan prosedur operasional perawatan peralatan dan menara-menara yang dimiliki serta peralatan pendukung lain secara berkala untuk menjaga agar peralatan tersebut tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik. • Mengasuransikan sebagian besar aset dengan nilai yang memadai untuk meminimalisir potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan musibah.
Risiko Hukum	• Menelaah secara seksama atas perjanjian yang dilaksanakan, termasuk perjanjian dengan penyewa, para pemilik lahan dan pemasok untuk mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum. • Peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari.
Risiko Keuangan	• Menerapkan prinsip keuangan yang berhati-hati. • Melakukan perencanaan keuangan yang matang, bijaksana dan konsisten. • Menjaga rasio-rasio keuangan dalam upaya untuk memperoleh dana yang direncanakan sesuai jadwal dengan syarat yang kompetitif. • Melakukan kontrak lindung nilai terhadap risiko: (i) fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap pembayaran pinjaman Perusahaan yang diperoleh dalam mata uang USD; dan (ii) volatilitas suku bunga pinjaman.

Sistem Pengendalian Internal

Unit Audit Internal dibentuk untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang menjadi salah satu dasar bagi Manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara efektif dan efisien.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Unit Audit Internal senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal pada semua level, dalam menerapkan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta manajemen risiko untuk memastikan bahwa Perseroan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Terdapat perkara yang sedang dihadapi oleh Perusahaan yaitu perkara penyelesaian perselisihan dengan PT First Media Tbk ("FM") secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didaftarkan dengan No Registrasi Perkara No. 43071/XII/ARB-BANI/2020 tanggal 2 Desember 2020 dengan Perseroan sebagai Pemohon dan FM sebagai Termohon. Tidak ada dampak material dari perkara ini atas Perseroan.

Pedoman Perilaku Perusahaan

Code of Conduct bertindak sebagai etika bisnis atau pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, pihak independen dan seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan agar secara konsisten bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nilai-nilai dan visi misi Perseroan.

Isi Pedoman Perilaku Perusahaan

1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, saling menghargai dan menghormati sesama, saling terbuka & percaya, menjaga *privacy* & rahasia individu, loyal & bertanggung jawab, menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan lain sebagainya);
4. Hubungan dengan Pemegang Saham, Pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya (yang meliputi Hubungan dengan Pelanggan, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyusunan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, dan Anti Pencucian Uang);
5. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran terhadap Kode Etik).

Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan terus mengoptimalkan penerapannya guna mencapai skema praktik terbaik. Perseroan terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan memperkuat etika dan budaya kerja yang mengutamakan integritas tinggi, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh level manajemen dan karyawan.

Upaya Penegakan Kode Etik

Perseroan terus berupaya dalam proses penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku karyawan yang sesuai standar etika. Langkah-langkah upaya antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui email pengumuman kepada seluruh karyawan dan karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. Penyampaian Kode Etik juga dilakukan pada saat *Induction Program* bagi karyawan eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik, sementara sosialisasi pengkinian akan terus dilakukan secara berkala. Perseroan memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

Pengendalian Korupsi dan Gratifikasi

Untuk memandu manajemen dan seluruh karyawan dalam menjalankan etika bisnis yang sehat, Perseroan menerapkan Kebijakan Antikorupsi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan tanpa terkecuali. Hal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 27 Agustus 2012. Dalam pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi tersebut, *Compliance Manager* ditunjuk oleh Perseroan untuk memastikan Kebijakan Antikorupsi ini berlaku dan dijalankan dengan baik. Pokok-pokok isi dari Kebijakan Antikorupsi tersebut, antara lain:

1. Larangan tegas terhadap korupsi dalam bentuk apapun.
2. Hubungan dengan mitra kerja.
3. Mengatur kebijakan tentang hadiah, hiburan, dan perjalanan.
4. Sumbangan politik, donasi, CSR dan *sponsorship*.
5. Rekrutmen mantan pejabat pemerintah dan pejabat pemerintah aktif.
6. Ketepatan pencatatan dan pengendalian internal.
7. Sanksi.
8. Prosedur kepatuhan.

Benturan Kepentingan

Seluruh karyawan Perseroan diimbau untuk menghindari kegiatan pribadi atau urusan finansial yang memiliki benturan kepentingan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan.

Whistleblowing System

Terjadinya fraud yang diakibatkan oleh praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menyebabkan kerugian dan mempengaruhi citra Perseroan. Hal tersebut juga dapat merusak produktivitas kerja maupun kelangsungan usaha Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen menyediakan sarana sistem pelaporan bagi karyawan yang berkeinginan untuk menyampaikan pelaporan dugaan pelanggaran terkait fraud atau dikenal sebagai *Whistleblowing System* (WBS). Sarana ini dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan dalam membantu Perseroan meningkatkan kualitas GCG.

Dalam rangka untuk semakin mendorong peran serta karyawan dalam melaporkan, mencegah dan menangani pelanggaran terkait *fraud* secara efektif dan efisien, maka Perseroan juga menambah kemudahan akses melalui beberapa media pelaporan dugaan *fraud* dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap Pelapor.

Perlindungan bagi Whistleblower

Setiap pelapor akan diberikan jaminan perlindungan dari Perseroan di mana identitas pelapor (nama,

alamat, nomor telepon, email dan unit kerja/perusahaan) akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, pelapor diperbolehkan untuk tidak mencantumkan identitas (anonim).

Penanganan dan Pihak Pengelola Pengaduan

Divisi Audit Internal merupakan Unit Kerja terkait yang mengelola pengaduan di mana laporan yang diterima oleh Perseroan akan diteruskan ke Direktur Utama kemudian ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait tersebut. Bilamana diperlukan maka unit kerja terkait tersebut akan melakukan investigasi lebih lanjut. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran terkait *fraud* dapat dilakukan melalui surat, *email*, *website*, dan telepon.

Laporan Pelanggaran Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Perseroan mencatat tidak terdapat (nihil) laporan pengaduan pelanggaran yang masuk baik melalui telepon, email, faksimili, ataupun kontak surat.

Akses Informasi dan Data Perseroan kepada Publik

Dalam rangka memelihara akuntabilitas dan transparansi perusahaan, Perseroan secara rutin menyampaikan berbagai informasi, khususnya yang terkait dengan kepentingan pelanggan Perseroan dan para pemangku kepentingan lainnya. Perseroan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bursa efek dan pasar modal terkait keterbukaan informasi.

Secara berkala, Perseroan selalu menyampaikan informasi terkini tentang Perseroan kepada pemegang saham, pihak otoritas pasar modal dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai jalur komunikasi. Selain pelaporan langsung kepada regulator pasar modal, informasi juga disampaikan oleh Perseroan kepada pemegang saham secara umum melalui pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di media massa.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan membuka saluran informasi dan komunikasi seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui media berikut ini.

Situs (Website)

Guna mendukung kemudahan dalam mengakses informasi bagi para pemangku kepentingan, Perseroan telah membangun *platform* teknologi informasi yang efektif dalam memberikan dukungan penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu, dan tepat sasaran. Bagi masyarakat umum yang berminat mencari informasi perkembangan terkini Perseroan dapat mengakses situs resmi Perseroan di www.stptower.com.

Laporan Tahunan

Informasi lebih lengkap mengenai Perseroan dapat diperoleh melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain dicetak dalam bentuk fisik, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan juga diunggah di situs resmi Perseroan.

Layanan Pelanggan

Sedangkan bagi yang ingin mendapatkan dan mengirimkan informasi lebih rinci termasuk dalam menyampaikan keluhan, silakan gunakan fasilitas "Kontak Kami" di situs www.stptower.com atau hubungi kami melalui saluran telepon di nomor +6221-5794 0688, dan faksimili di nomor +6221-5795 0077.

Media Massa

Perseroan secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Alamat surat-menyurat:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Rukan Permata Senayan Blok C01-02

Grogol Utara, Kebayoran Lama

Jakarta 12210, Indonesia

Telepon : +6221 5794 0688

Faksimil : +6221 5795 0077

Email : corporate.secretary@stptower.com

Website : www.stptower.com

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang pada praktiknya harus dilaksanakan secara efektif guna mempertahankan tingkat keberhasilan kinerja Perseroan, maka Perseroan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari jajaran personel yang tepat dan berkualitas baik dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan pengalaman yang luas seperti ekonomi, hukum dan teknologi yang terkait dengan bisnis Perseroan.

Keragaman keahlian, latar belakang dan pengetahuan, pengalaman industri, di antara faktor-faktor lain akan menjadi pertimbangan saat akan memilih seorang anggota baru dari Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan mengakui dan mendapatkan manfaat dari keberagaman latar belakang anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan melihat peningkatan keragaman pada komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai satu bagian penting dalam menjaga keunggulan yang kompetitif.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk senantiasa dipenuhi. Dalam hal ini, definisi CSR di Perseroan mencakup kewajiban untuk melestarikan lingkungan, menghormati hak-hak asasi manusia, menyediakan kondisi kerja yang nyaman dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan para karyawan, memprioritaskan kesehatan dan keamanan di tempat kerja, serta berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan perekonomian domestik. Perseroan meyakini bahwa kegiatan bisnis yang inovatif, etika bisnis yang baik, serta pengembangan tenaga kerja yang unggul berperan penting untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan yang akan memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup

Saat ini, penyusunan program CSR di Perseroan baru hanya difokuskan pada aspek tertentu dan memiliki cakupan yang tidak terlalu luas. Namun, untuk ke depannya Perseroan berharap untuk dapat memberikan manfaat seluas-luasnya melalui implementasi program CSR yang meliputi empat pilar sebagai berikut:

1. Lingkungan hidup;
2. Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan
4. Tanggung jawab kepada konsumen.

Meskipun saat ini implementasi program CSR belum merata di semua pilar, Perseroan senantiasa meningkatkan komitmennya untuk memperluas cakupan program CSR yang dimiliki.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Program CSR Perseroan dilakukan berlandaskan kesadaran penuh bahwa keberadaan Perseroan di tengah masyarakat sangat bergantung pada penerimaan masyarakat setempat terhadap Perseroan sebagai perusahaan penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia. Atas dasar ini pula, Perseroan memfokuskan kegiatan CSR-nya pada aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan, terutama dalam bentuk kegiatan yang bersifat filantropi seperti donasi untuk korban bencana alam.

Di tahun 2020, seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan tak terkecuali Indonesia, maka Perseroan turut menyesuaikan kembali program kegiatan sosial yang sebelumnya telah disiapkan sejak awal tahun. Perseroan meyakini bahwa aspek kesehatan menjadi perhatian utama di tahun 2020 sehingga kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Perseroan disusun dengan berlandaskan pertimbangan tersebut. Salah satu bentuk kepedulian Perseroan berangkat dari keprihatinan terhadap para tenaga medis sebagai garda depan penanggulangan pandemi Covid-19 yang sebagian besar dari mereka tidak sempat pulang ke rumah. Dalam hal ini Perseroan memberikan bantuan makanan siap saji yang langsung diantarkan ke rumah sakit.

Di sepanjang tahun, Perseroan menyalurkan sebesar Rp679 juta untuk penyelenggaraan kegiatan CSR di sepanjang tahun. Adapun detail dari kegiatan CSR Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bantuan	Lokasi
CSR Banjir Bandang & Longsor Lebak – Banten	Februari 2020	Peralatan rumah tangga dan perlengkapan sekolah	Lebak, Banten, Jawa Barat
CSR Longsor Sukajaya – Bogor	April 2020	Instalasi air bersih dan sarana MCK	Sukajaya, Bogor, Jawa Barat
CSR Bantuan Makanan untuk Tenaga Medis RS Fatmawati	Mei 2020	Bantuan makanan siap saji untuk tenaga medis	Jakarta
CSR Bantuan Makanan untuk Tenaga Medis RS Cengkareng	Mei 2020	Bantuan makanan siap saji untuk tenaga medis	Jakarta
CSR Bantuan Makanan untuk Tenaga Medis RS Persahabatan	Mei 2020	Bantuan makanan siap saji untuk tenaga medis	Jakarta
CSR Bantuan Penanggulangan Covid-19 untuk warga Kab. Jembrana – Bali	Juli 2020	Bantuan bahan makanan dan alat penanggulangan Covid-19	Jembrana, Bali
CSR Hewan Kurban	Juli 2020	Bantuan pemberian hewan kurban	Tersebar di Jabodetabek, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua
CSR program penyediaan WiFi Hotspot untuk mendukung Program Pembelajaran Jarak Jauh dari Yayasan Emmanuel untuk 2 sekolah swasta di daerah Bogor & 1 sekolah negeri di DKI Jakarta, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.	Semester 2 – 2020	Bantuan pemberian layanan hotspot WiFi untuk sekolah yang bernaung/bekerja sama dengan Yayasan Emmanuel: Sekolah Mitra, Bogor EduNation, Bogor SLBN 12, Jagakarsa SDN Duren Tiga 13, Jakarta	Bogor & Jakarta



Pemberian bantuan bencana banjir bandang & longsor di Lebak, Banten



Instalasi air bersih bantuan bencana longsor di Sukajaya, Bogor



Pembangunan MCK bantuan bencana longsor di Sukajaya, Bogor



Pemberian bantuan makanan untuk tenaga medis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta



Pemberian bantuan makanan untuk tenaga medis di Rumah Sakit Cengkareng, Jakarta



Pemberian bantuan makanan untuk tenaga medis di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta



Pemberian bantuan penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Jembrana, Bali



Pemberian bantuan Hewan Kurban



Serah terima perangkat untuk kegiatan CSR penyediaan WiFi Hotspot Sekolah

Tanggung Jawab terhadap Konsumen

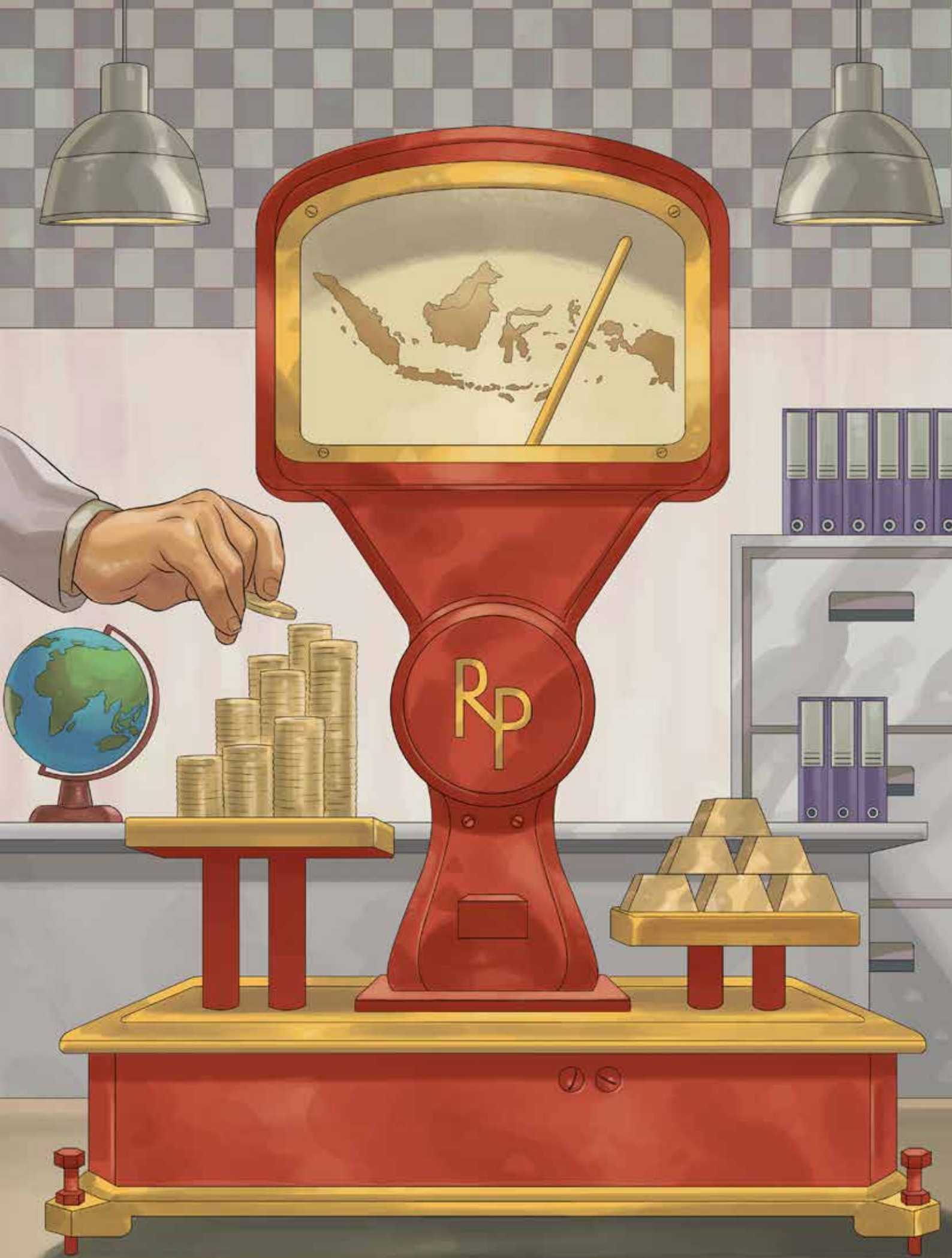
Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen. Perseroan telah mengasuransikan atau menjamin kualitas layanan yang ditawarkan kepada pelanggan/klien. Komitmen Perseroan atas perlindungan terhadap konsumen tercermin dalam standar etika Perseroan sebagai berikut:

1. Perseroan senantiasa bekerja keras untuk memberikan layanan dengan kualitas terbaik;
2. Perseroan senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional demi memuaskan pelanggan;
3. Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan layanan-layanan, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem dan didukung teknologi yang memadai;
4. Selain mempertahankan kualitas layanan, Perseroan juga senantiasa memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses operasional;
5. Melakukan upaya evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, Perseroan telah memiliki Pusat Pengaduan Konsumen yang dapat disampaikan melalui email yang ditujukan kepada stptower.com atau melalui 24 Hours Helpdesk di nomor 0800 1401 380.

06

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

***PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	Notes to the Consolidated Financial Statements
Informasi Tambahan-Laporan Keuangan Tersendiri:		Supplementary Information-Separate Financial Statements:
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran I/ Appendix I	Statements of Financial Position (Parent Entity)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	Lampiran II/ Appendix II	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran III/ Appendix III	Statements of Changes in Equity (Parent Entity)
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran IV/ Appendix IV	Statements of Cash Flows (Parent Entity)
Pengungkapan Lainnya	Lampiran V/ Appendix V	Other Disclosures



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER**

**Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian/
Regarding to the Responsibility for the Consolidated Financial Statements**

**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
For The Years Ended December 31, 2020 and 2019**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ *We, the undersigned:*

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Nama/ <i>Name</i> | : | Nobel Tanihaha |
| | Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Komplek Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| | Alamat Domisili sesuai KTP/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, RT.005/RW.002
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan |
| | Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : | (021) 5794 0688 |
| | Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2 | Nama/ <i>Name</i> | : | Juliawati Gunawan Halim |
| | Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Komplek Rukan Permata Senayan Blok C.01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| | Alamat Domisili sesuai KTP/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Perum Citra 3 Blok E-5/3A, RT.006/RW.013
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat |
| | Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : | (021) 5794 0688 |
| | Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur/ <i>Director</i> |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan; | 1 | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements and supplementary information;</i> |
| 2 | Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2 | <i>The consolidated financial statements and supplementary information have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3 | a) Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3 | <i>a) All information contained in the consolidated financial statements and supplementary information is complete and correct;</i> |



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

- | | |
|---|--|
| <p>b) Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas Anak.</p> | <p>b) <i>The consolidated financial statements and supplementary information do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.</i></p> <p>4 <i>We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 22 April / April 22, 2021

Atas Nama dan Mewakili Direksi/ *On behalf of the Board of Directors*



Nobel Tanihaha
Direktur Utama/
President Director



Juliawati Gunawan Halim
Direktur/
Director



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00312/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/IV/2021

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian ini bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended, is performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not

analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken a whole.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Tjun Tjun

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1115/
Public Accountant License Number: AP.1115

Jakarta, 22 April/April 22, 2021

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	3, 30	237,176	361,534	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha	4, 29, 30	614,221	611,786	Trade Receivables
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5, 30	217,741	209,232	Accrued Income
Piutang Lain-lain	6, 29, 30	5,797	11,887	Other Receivables
Persediaan	7	45,234	37,649	Inventory
Pajak Dibayar di Muka	27.a	240,118	264,173	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	8	83,984	268,345	Advances and Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar		1,444,271	1,764,606	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka - Setelah Dikurangi Bagian Lancar	8	62,328	799,699	Advances and Prepaid Expenses - Net of Current Portion
Aset Tetap	9	9,161,218	8,441,722	Property and Equipment
Aset Hak Guna	10	1,265,241	--	Right of Use Assets
Aset Takberwujud	11	105,874	110,769	Intangible Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	12, 30	3,464	46,884	Other Non-Current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	27.d	2,340	1,145	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		10,600,465	9,400,219	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		12,044,736	11,164,825	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	13, 30			Trade Payables
Pihak Berelasi	29	29	2,548	Related Party
Pihak Ketiga		15,172	8,512	Third Parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	30	25,607	15,383	Other Current Financial Liabilities
Utang Pajak	27.b	52,821	7,791	Taxes Payable
Akrual	14, 30	184,768	171,741	Accruals
Pendapatan Ditangguhkan	15	582,609	688,183	Deferred Income
Bagian Lancar atas Liabilitas Sewa	16, 30	33,946	--	Current Portion of Lease Liability
Utang Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loan
Utang Bank Jangka Pendek	17.a, 30	450,000	300,000	Short-Term Bank Loan
Bagian Lancar atas Utang Bank Berjangka	17.b, 30	376,064	372,831	Current Portion of Term Bank Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1,721,016	1,566,989	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	16	292,749	--	Long-Term Portion of Lease Liability
Utang Bank Sindikasi Berjangka	17.b, 30	6,315,792	6,585,646	Syndicated Term Bank Loans
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	18	54,778	38,674	Long-Term Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	32.a	13,613	--	Other Non-Current Financial Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		6,676,932	6,624,320	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		8,397,948	8,191,309	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 (Rupiah Penuh) per Saham				Share Capital - Rp100 (Full Amount) Par Value per Share
- Modal Dasar - 2.000.000.000 Saham				- Authorized Capital - 2,000,000,000 Shares
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.137.579.698 Saham	19	113,758	113,758	- Issued and Paid-Up Capital - 1,137,579,698 Shares
Tambahan Modal Disetor - Bersih	20	3,589,771	3,589,771	Additional Paid-in Capital - Net
Penghasilan Komprehensif Lainnya	21	(278,169)	(247,200)	Other Comprehensive Income
Saldo Laba (Defisit)		219,288	(482,813)	Retained Earnings (Deficit)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		3,644,648	2,973,516	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		2,140	--	Non-controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		3,646,788	2,973,516	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		12,044,736	11,164,825	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
PENDAPATAN	22, 29	1,922,151	1,767,050	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	23			COST OF REVENUES
Penyusutan dan Amortisasi		(446,092)	(368,167)	Depreciation and Amortization
Beban Pokok Pendapatan Lainnya		(136,601)	(123,933)	Other Cost of Revenues
Jumlah		<u>(582,693)</u>	<u>(492,100)</u>	Total
LABA BRUTO		1,339,458	1,274,950	GROSS PROFIT
Beban Usaha	24			Operating Expenses
Penyusutan dan Amortisasi		(25,014)	(24,026)	Depreciation and Amortization
Beban Usaha Lainnya		(183,281)	(165,077)	Other Operating Expenses
Jumlah		<u>(208,295)</u>	<u>(189,103)</u>	Total
LABA USAHA		1,131,163	1,085,847	OPERATING PROFIT
Penghasilan Bunga	25.a	19,001	13,058	Interest Income
Beban Keuangan	25.b			Financial Charges
Beban Bunga		(426,594)	(523,919)	Interest Expense
Beban Keuangan Lainnya		(381,162)	(331,966)	Other Financial Charges
Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	9	471,485	200,444	Net Increase of Revaluation of Towers and Supporting Equipment
Beban Lain-lain - Neto	26	<u>(95,207)</u>	<u>(201,593)</u>	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM PAJAK		718,686	241,871	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	27.c	<u>(9,803)</u>	<u>(13,489)</u>	Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		<u>708,883</u>	<u>228,382</u>	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	18	(4,204)	(1,552)	Remeasurement of Defined Benefits Plan
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	18, 27.d.	157	50	Income Tax of Remeasurement of Defined Benefits Plan
Kenaikan (Penurunan) Bersih atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	9	64,168	(96,249)	Net Increase (Decrease) of Revaluation of Towers and Supporting Equipment
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss
Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	21	446	(1,279)	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency
Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen Lindung	21	(96,178)	(125,741)	Effective Portion of Loss on Hedging Instrument Related with Cash Flow Hedge
Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas				Total Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		<u>(35,611)</u>	<u>(224,771)</u>	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>673,272</u>	<u>3,611</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		706,991	228,382	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		1,892	--	Non-controlling Interest
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN		<u>708,883</u>	<u>228,382</u>	TOTAL PROFIT FOR THE YEAR
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		671,132	3,611	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		2,140	--	Non-controlling Interest
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>673,272</u>	<u>3,611</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM:				EARNINGS PER SHARE:
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (Rupiah Penuh) Dasar	28	621	201	Profit for the year attributable to shareholders of common shares of the Company (Full Rupiah) Basic

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended

December 31, 2020 and 2019

(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Modal Saham/ Share Capital	Tambahkan Modal Disetor - Bersih/ Additional Paid-in Capital - Net	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income				Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Total Equity Attributable to Owners of the Company	Kepentingan Non - Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
		Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Anus Kas/ Effective Portion of Loss on Hedging Instrument Related with Cash Flow Hedge	Kenakan (Penurunan) Bersih atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang/ Net Increase (Decrease) in Revaluation of Towers and Supporting Equipment	Selish Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing/ Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefits Plan	Yang Telah Ditetapkan Penguanaannya/ Appropriated	Yang Belum Ditetapkan Penguanaannya/ Unappropriated			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PADA TANGGAL 1 JANUARI 2019 / BALANCE AS OF JANUARY 1, 2019	113.758	3.589.771	(373.458)	333.932	16.295	9.086	22.900	(742.379)	2.969.905	--
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2019 / Movements in Equity in 2019										
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba / Reclassification of Revaluation Reserve to Retained Earning	--	--	--	(8.284)	--	--	--	8.284	--	--
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	--	--	(125.741)	(96.249)	(1.279)	(1.502)	--	228.382	3.611	--
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 / BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019	113.758	3.589.771	(499.199)	229.399	15.016	7.584	22.900	(505.713)	2.973.516	--
Perubahan Ekuitas pada Tahun 2020 / Movements in Equity in 2020										
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba / Reclassification of Revaluation Reserve to Retained Earning	--	--	--	4.890	--	--	--	(4.890)	--	--
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	--	--	(96.178)	64.168	446	(4.295)	--	706.991	671.132	2.140
SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 / BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020	113.758	3.589.771	(595.377)	298.457	15.462	3.289	22.900	196.388	3.644.648	2.140

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		1,902,694	2,154,474	Cash Received from Customers
Pembayaran kepada Pemasok dan Lainnya		(245,759)	(165,813)	Payment to Suppliers and Others
Pembayaran kepada Manajemen dan Karyawan		(139,633)	(124,381)	Payments for Management and Employees
Penerimaan Bunga		19,001	13,058	Interest Received
Penerimaan Restitusi Pajak		29,288	43,361	Receipts from Tax Refund
Pembayaran Pajak Penghasilan		(63,143)	(43,730)	Cash Paid For Income Tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>1,502,448</u>	<u>1,876,969</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan Aset Tetap	9	(408,519)	(299,348)	Addition of Property and Equipment
Penambahan Aset Takberwujud	11	(4,899)	(6,880)	Addition of Intangible Assets
Uang Muka Konstruksi	8	(923)	(4,689)	Advances for Construction
Pembayaran Sewa Lahan		--	(223,391)	Payments For Land Lease
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(414,341)</u>	<u>(534,308)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Liabilitas Sewa		(267,363)	--	Payment for Lease Liabilities
Transaksi Utang Sindikasi	17			Syndicated Loan Transactions
Penerimaan		1,050,000	400,000	Proceeds
Pembayaran		(1,301,266)	(723,188)	Payments
Pembayaran Beban Keuangan	25.b	(692,860)	(805,560)	Payment of Financial Charges
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		<u>(1,211,489)</u>	<u>(1,128,748)</u>	Net Cash Flows Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(123,382)	213,913	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
DAMPAK SELISIH KURS PADA BANK		(976)	576	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ON CASH IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		<u>361,534</u>	<u>147,045</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	3	<u><u>237,176</u></u>	<u><u>361,534</u></u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Informasi transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 35.

Information of non-cash transaction is presented in Note 35.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1. General

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2007 Tambahan No. 9241/2007. Perubahan anggaran dasar terakhir, berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 24 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pelaporan atas perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0411714 tanggal 28 November 2020.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan yaitu pengelolaan dan penyewaan bangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008. Saat ini, kegiatan usaha Perusahaan adalah pengelolaan dan penyewaan menara dan sarana penunjang atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Kharisma Indah Ekaprima. Entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Deltamas Abadi Makmur.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor yang beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01 – 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia.

1.a. The Company's Establishment

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (hereinafter called "the Company") was established based on Notarial Deed No. 5 dated July 25, 2006 made in presence of Ridjqi Nurdiani, S.H., Notary in Bekasi. The Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241/2007. The latest amended articles of association, based on Notarial Deed No. 28 dated November 24, 2020 made in presence of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, regarding the amendment and restatement of Company's Articles of Association to conform with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Conducting of General Meetings Shareholders of Public Company. The amendment notice has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No. AHU-AH.01.03-0411714 dated November 28, 2020.

In accordance with the Company's Articles Association, the main business activities of the Company are operating and renting of Base Transceiver Station (BTS) tower building or telecommunications towers and other related telecommunication infrastructure. The Company started its commercial activities in March 2008. Currently, the Company's business activities are operating and renting of towers and supporting equipment or telecommunications towers and other telecommunication infrastructures directly or through subsidiaries.

Parent entity of the Company is PT Kharisma Indah Ekaprima. Ultimate parent entity of the Company is PT Deltamas Abadi Makmur.

The Company is domiciled in Jakarta with office address at Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01 – 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, South Jakarta, Indonesia.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

1.b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 22 Juli 2020 dan Akta Notaris No. 8 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Jeffrey Yuwono
Wakil Komisaris Utama	Ludwig Indrawan
Komisaris	Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen	Muhamad Senang Sembiring
Komisaris Independen	Harry Mozarta Zen
Direksi	
Direktur Utama	Nobel Tanihaha
Direktur	Juliawati Gunawan *)
Direktur Independen	Tjhin Khe Mei

*) Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan, susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020
Komite Audit	
Ketua	Harry Mozarta Zen
Anggota	Sujoko Martin
Anggota	Anwar Muljadi Arif

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") masing-masing sebanyak 461 dan 390 orang.

1.c. Penawaran Umum Saham Perusahaan Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 29 September 2011, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 100.000.000 lembar Saham Biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp3.400 (Rupiah penuh) per saham.

Selisih lebih jumlah yang diterima dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp320.524, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp9.476 (Catatan 20).

1.b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on Notarial Deed No. 23 dated July 22, 2020 and Notarial Deed No. 8 dated May 15, 2019 made in presence of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2019	
		Boards of Commissioners
Jeffrey Yuwono	Jeffrey Yuwono	President Commissioner
Ludwig Indrawan	Ludwig Indrawan	Vice President Commissioner
Thong Thong Sennelius	Thong Thong Sennelius	Commissioner
Muhamad Senang Sembiring	Muhamad Senang Sembiring	Independent Commissioner
Erry Firmansyah	Erry Firmansyah	Independent Commissioner
		Directors
Nobel Tanihaha	Nobel Tanihaha	President Director
Juliawati Gunawan *)	Juliawati Gunawan *)	Director
Tommy Gustavi Utomo	Tommy Gustavi Utomo	Independent Director

*) Serves as the Corporate Secretary

Based on Boards of Commissioners' Decision, the composition of Audit Committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2019	
		Audit Committee
Muhamad Senang Sembiring	Muhamad Senang Sembiring	Chairman
Sujoko Martin	Sujoko Martin	Member
Anwar Muljadi Arif	Anwar Muljadi Arif	Member

As of December 31, 2020 and 2019, the Company and its subsidiaries ("Group") has 461 and 390 person, respectively.

1.c. The Company's Public Offering of Shares Initial Public Offering

On September 29, 2011, the Company received the effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 to offer 100,000,000 shares to the public with par value amounted to Rp100 (full Rupiah) per share with initial offering price amounted to Rp3,400 (full Rupiah) per share.

The excess amount received from the issuance of share over its par value amounting to Rp320,524 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp9,476 (Note 20).

Penawaran Umum Terbatas I

Pada tanggal 8 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK No.S-9825/BL/2012 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 135.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan Rupiah nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp4.800 (Rupiah penuh) per saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 (Rupiah penuh) waran. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp4.800 (Rupiah penuh) dengan masa berlaku pelaksanaan tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015.

Selisih lebih jumlah yang diterima dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp630.595, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp3.905 (Catatan 20).

Waran mengalami penyesuaian dengan adanya Penawaran Umum Terbatas II menjadi 59.415.534 waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.367 (Rupiah penuh).

Sampai dengan berakhirnya masa berlaku pelaksanaan, jumlah waran yang dilaksanakan adalah 59.414.674 waran. Selisih lebih jumlah yang diterima dari waran yang dilaksanakan adalah sebesar Rp279.176 dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" (Catatan 20).

Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau *telecommunication sites* dan modal kerja.

Penawaran Umum Terbatas II

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan No.S-550/D.04/2014 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 343.165.024 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp7.000 (Rupiah penuh) per saham.

Periode pelaksanaan PUT II dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 16 Januari 2015.

Limited Public Offering I

On August 8, 2012, the Company received the effective statement from the Chairman of Bapepam-LK No.S-9825/BL/2012 related to Limited Public Offering I in order to issue Pre-emptive Rights (HMETD) amounting to 135,000,000 shares with par value of Rp100 (full Rupiah) per share with offering price of Rp4,800 (full Rupiah) per share and maximum 59,400,000 (full Rupiah) warrants. The exercise price of warrant amounted to Rp4,800 (full Rupiah) with exercise period from March 6, 2013 to August 28, 2015.

The excess amount received from the issuance of share over its par value amounting to Rp630,595 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp3,905 (Note 20).

Warrant has been adjusted in connection to Limited Public Offering II to be 59,415,534 warrants with exercise price of Rp3,367 (full Rupiah).

Up to end of the exercise period, the number of warrants exercised are 59,414,674 warrants, the excess amount received from warrants exercised amounted to Rp279,176 is recorded in "Additional Paid-In Capital" account (Note 20).

The use of proceeds resulting from above public offering are relating to acquisition, construction of towers and/or telecommunication sites and working capital.

Limited Public Offering II

On December 19, 2014, the Company received the effective statement from Financial Services Authority No.S-550/D.04/2014 related to Limited Public Offering II in order to issue Pre-emptive Rights (HMETD) amounted to 343,165,024 ordinary shares with par value amounted to Rp100 (full Rupiah) per share and an offering price amounted to Rp7,000 (full Rupiah) per share.

The period of LPO II held on January 9 until January 16, 2015.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Selisih lebih jumlah dari penerbitan saham terhadap nilai nominalnya adalah sebesar Rp2.359.200, dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi jumlah biaya emisi saham sebesar Rp8.639 (Catatan 20).

The excess amount from the issuance of share over its par value amounted to Rp2,359,200 is recorded in "Additional Paid-in Capital" account, after deducting share issuance cost amounted to Rp8,639 (Note 20).

Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas setelah dikurangi antara pinjaman pemegang saham Perusahaan kepada PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) dengan kewajiban KIE untuk penysetoran modal, untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan modal kerja.

The use of proceeds resulting from above public offering after net-off between the Company's shareholder loan to PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) with KIE's liability to pay the shares subscribed are relating to payment of a portion of loan facility and for working capital.

Seluruh saham dan waran diatas tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

All shares and warrants above are listed in Indonesia Stock Exchange (BEI).

1.d. Entitas-entitas Anak

Kepemilikan saham Perusahaan pada entitas anak yang dikonsolidasi, baik secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

1.d. Subsidiaries

The Company's ownerships, directly and indirectly, in its consolidated subsidiaries are as follows:

Entitas-entitas Anak/Subsidiaries	Bidang Usaha/ Activity	Domisili/ Domicile	Tanggal Pendirian/ Establishment Date	Dimulainya Kegiatan Operasi/ Commencement of Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
						2020	2019
PT Sarana Inti Persada	Pengelolaan dan penyewaan menara BTS / <i>Operating and leasing of BTS tower</i>	Bandung	12 Oktober / October 12, 2004	2005	100%	218,037	212,617
PT Platinum Teknologi	Perdagangan / <i>Trading</i>	Jakarta	13 September / September 13, 2011	--	100%	1,716,664	1,696,588
PT Gema Dwimitra Persada	Perdagangan / <i>Trading</i>	Jakarta	25 September / September 25, 2008	--	100%	1,702,319	1,681,734
PT BIT Teknologi Nusantara	Penyewaan menara dan jasa jaringan / <i>Tower leasing and network services</i>	Jakarta	9 Agustus / August 9, 2004	2009	100%	1,421,540	1,119,588
PT Broadband Wahana Asia	Investasi / <i>Investment</i>	Jakarta	14 Maret / March 14, 2011	--	100%	9,147	7,512
PT Rekajasa Akses	Penyewaan jasa jaringan / <i>Network services</i>	Jakarta	7 Agustus / August 7, 2000	2010	75%	11,135	16,100
Pratama Agung Pte. Ltd.	Investasi / <i>Investment</i>	Singapura / Singapore	14 Maret / March 14, 2013	2015	100%	30,108	29,949

Perusahaan membeli 99,87% saham PT Sarana Inti Persada (SIP) dan 99,99% saham PT Platinum Teknologi (PT) masing-masing pada tanggal 27 Desember 2011 dan 16 Februari 2012. Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 dan 16 Februari 2012 laporan keuangan SIP dan PT dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan. PT memiliki PT Gema Dwimitra Persada dan PT BIT Teknologi Nusantara secara langsung dan tidak langsung.

The Company acquired 99.87% shares of PT Sarana Inti Persada (SIP) and 99.99% shares of PT Platinum Teknologi (PT) on December 27, 2011 and February 16, 2012, respectively. In connection with the acquisition, starting December 27, 2011 and February 16, 2012, the financial statements of SIP and PT are consolidated in the Company's financial statements. PT has ownership in PT Gema Dwimitra Persada and PT BIT Teknologi Nusantara directly and indirectly.

Pada tahun 2013 entitas anak membeli seluruh saham kepentingan nonpengendali atas SIP dan PT di atas.

In 2013, the subsidiaries purchased all the non-controlling shares of SIP and PT above.

Perusahaan dan PT membeli 100% saham PT Broadband Wahana Asia (BWA) pada tanggal 24 Juni 2016 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2016. Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 laporan keuangan BWA dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan.

The Company and PT acquired 100% shares of PT Broadband Wahana Asia (BWA) on June 24, 2016 which become effective on January 1, 2016. As a result of the acquisition, starting January 1, 2016, the financial statement of BWA is consolidated in to the Company's financial statements.

BWA memiliki 75% saham PT Rekajasa Akses. Berdasarkan perjanjian antara pemegang saham, disepakati untuk melakukan pengalihan hak dan kepentingan meliputi diantaranya hak untuk mencatat dalam pembukuan bahwa BWA memiliki 100% kepentingan atas seluruh kekayaan dan pendapatan PT Rekajasa Akses untuk periode 5 (lima) tahun pertama sejak pengalihan dan berakhir pada 28 Oktober 2020.

BWA has 75% ownership in PT Rekajasa Akses. Based on agreement between the shareholders, it is agreed to transfer rights and interest including the rights of BWA to record and consolidate 100% of all PT Rekajasa Akses assets and revenue for the period of 5 (five) years since the date of acquisition) and end on October 28, 2020.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2. Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidance for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and elements included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 1 (Amandemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan: tentang Judul Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi Pada Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19;
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

New Standard and amendment to standards which effective for the periods beginning on or after January 1, 2020 with early adoption is permitted, are as follow:

- PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";
- PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";
- PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment In Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;"
- PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors";
- The amendments of PSAK 60 "Financial Instrument: Disclosure" about interest rate benchmark reform;
- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";
- PSAK 71: "Financial Instrument";
- PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";
- PSAK 73: "Lease";
- PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Covid-19 related Rent Concessions;
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Accounting for Murabahah";
- PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract;

- ISAK 35: "Penyesuaian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar dan interpretasi standar di atas yang relevan terhadap laporan keuangan Grup:

- **PSAK 71: Instrumen Keuangan**
PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan hasil kajian Grup dengan menggunakan kedua kriteria tersebut, tidak terdapat dampak perubahan signifikan terhadap klasifikasi dan

- ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";
- ISAK 101: "Recognition of Unearned Revenue of Murabahah Without Significant Risk Related to Inventory Ownership";
- ISAK 102: "Allowance for Murabahah Receivables";
- ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases;
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Group's accounting policies and had no material impact on the consolidated financial statements of the current year or previous year.

The following is the impact of the amendments in accounting standards that are relevant to the financial statements of the Group:

- **PSAK 71: Financial Instrument**
PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, the Group chose to apply retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Based on the Group review using both criteria, there is no significant impact on the classification and measurement of the Group's financial assets. All of

pengukuran aset keuangan Grup. Seluruh aset keuangan Grup yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK 55 berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71. Karena sebelumnya aset keuangan tersebut telah diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka pengukuran aset keuangan tersebut tidak perlu disesuaikan.

the Group's financial assets that were classified as loans and receivables in PSAK 55 are now classified as amortized costs in PSAK 71. Since these financial assets are already recorded as amortized costs, hence no need adjustments is required for those financial asset measurements.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga tidak terdapat perbedaan signifikan pada nilai tercatat aset keuangan Grup pada awal penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

Changes in the approach to calculating impairment of financial assets also has no significant impact on the carrying value of the Group's financial assets at the initial implementation of PSAK 71 on January 1, 2020.

- **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

- **PSAK 72: Revenue from Contract with Customer**

PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces 5 (five) steps model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Grup menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

The Group applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

Based on the review that the Group has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, there is no significant impact on the consolidated financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.

- **PSAK 73: Sewa**

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

- **PSAK 73: Lease**

PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Group as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

Grup menerapkan PSAK 73 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi.

The Group implemented PSAK 73: retrospectively with the cumulative effect on initial implementation and did not restate comparative information.

Pada tanggal penerapan awal, untuk semua sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, Grup:

At the date of initial implementation, for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets, which were previously classified as operating leases, the Group:

- Mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, dan didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental Grup pada 1 Januari 2020;
- Memilih untuk mengakui aset hak-guna sebesar utang sewa, dengan penyesuaian atas jumlah sewa dibayar di muka atau akrual atas pembayaran terkait sewa tersebut yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian sebelum penerapan awal standar ini.

- *Recognizes lease liabilities which measured at the present value of the remaining lease payments, and discounted using the Group's incremental loan interest rates on January 1, 2020;*
- *Choose to recognize the right-of-use asset at the amount of the lease payable, with adjustments for the amount of lease prepaid or accrual of lease-related payments that were recognized in the consolidated financial statements prior to the initial adoption of this standard.*

Pada tanggal penerapan awal, Grup juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

At the first implementation date, the Group elected the following practical expedients:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Memilih tidak menerapkan model akuntansi sewa baru untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal dan mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

- *Has applied a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;*
- *Not to apply the new lease accounting model to leases for which the lease term ends within 12 months after the date of initial application and has accounted for those leases as short-term leases and accounted those expenses in regard to the leases in the short-term lease disclosure in the financial reporting which covers the period of the first implementation date.*

Dampak Penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

The effect of adoption PSAK 73 as of January 1, 2020 is as follows:

	31 Desember / December 31, 2019 Rp	Dampak Penerapan / Application of PSAK 73 Rp	1 January / January 1, 2020 Rp	
Uang Muka dan				Advances and
Beban Dibayar di Muka	1,068,044	(913,989)	154,055	Prepaid Expenses
Aset Hak Guna	--	1,349,594	1,349,594	Right of Use Assets
Jumlah Aset	1,068,044	435,605	1,503,649	Total Assets

	31 Desember / December 31, 2019 Rp	Dampak Penerapan / Application of PSAK 73 Rp	1 January / January 1, 2020 Rp	
Liabilitas Sewa	--	447,476	447,476	Lease Liability
Akrual	171,741	(11,871)	159,870	Accruals
Jumlah Liabilitas	171,741	435,605	607,346	Total Liabilities

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and controlled entities as described in Note 1.d.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. where the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control over the acquired business, until such control ceases.

Parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entity are eliminated in full on consolidation.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the Parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2.e. Instrumen Keuangan **Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in cessation of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount of which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent.

If the Group loses control over the subsidiary, the Group:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is ceases;*
- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when the control is ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the cessation of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when the control is ceased;*
- (e) Reclassify to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other SAKs, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.*

2.e. Financial Instrument **Initial Recognition and Measurement**

The Group recognize a financial assets or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of

keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Komponen liabilitas pada instrumen keuangan majemuk diakui pada awalnya sebesar nilai wajar liabilitas yang serupa yang tidak memiliki opsi konversi ekuitas. Komponen ekuitas diakui pada awalnya sebesar selisih antara nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan dan nilai wajar komponen liabilitas. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dialokasikan pada komponen liabilitas dan ekuitas sesuai dengan proporsi nilai tercatat awalnya.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi (FVTPL)**
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

a financial asset or financial liability is not measured at fair value through profit or loss, its fair value is added or deducted with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified as fair value through profit or loss are immediately expensed.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expense immediately.

The liability component of compound financial instrument is recognized initially at the fair value of a similar liability that does not have an equity conversion option. The equity component is recognized initially as the difference between the fair value of the compound financial instrument as a whole and the fair value of the liability component. Any directly attributable transaction costs are allocated to the liability and equity components in proportion to their initial carrying amounts.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Accounting treatment before January 1, 2020
Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) **Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

(ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup dan entitas anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

(iii) Held-to-Maturity Investments (HTM)

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group and subsidiaries have the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang

(iv) Available-for-Sale Financial Assets (AFS)

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or

diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi (FVTPL)

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- (i) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- (ii) Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah

(c) *financial assets at fair value through profit or loss.*

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Accounting treatment since January 1, 2020

At initial recognition, financial assets are classified in the three categories as follows: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- (i) *The financial assets is held within a business model whose objective is to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- (ii) *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any

amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- (i) *the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and*
- (ii) *the contractual cash flows of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value, where the changes in fair value are recognized in other comprehensive income (OCI), except for impairment losses and gains or loss on foreign exchange, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI.

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk

(iii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI.

This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition are designated as fair value through profit or loss. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing in the near term, or it is a part of a portfolio of identified

tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Other Financial Liabilities

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup dan entitas anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis Ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group and subsidiaries shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (a) *Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.*
- (b) *Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.*
- (c) *Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below - market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:*
 - (i) *the amount of the loss allowance*
 - (ii) *the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.*
- (d) *Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss*

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- (b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as 'an accounting mismatch') that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- (b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.*

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as asset or liabilities any rights and obligation occurred or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognizes the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continue to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian

The Group derecognizes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

Accounting treatment before January 1, 2020

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference

tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition.

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then the Group in 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the third party is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. nilai waktu uang; dan
- iii. informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. an unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. time value of money; and*
- iii. reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Company may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with 'investment grade' according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is

relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal

the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all commission and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

Accounting treatment before January 1, 2020

The Group shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification near to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control,

pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through profit or loss, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through other comprehensive income, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through profit or loss into fair value through other comprehensive income, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into fair value through profit or loss, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorized into different level in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the entire fair value measurement:

- (i) Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

- (i) *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*

- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Lindung Nilai

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif swap dan opsi atas kurs dan tingkat bunga untuk lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas pada risiko perubahan selisih kurs dan tingkat bunga mengambang.

Dalam bisnis normal Grup terekspos dengan risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan keuangan tertulis dari manajemen, Perusahaan menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:

- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas;
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Grup menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:

- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan
- Efektifitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

- (ii) *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*

- (iii) *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between level of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period which the change occurred.

Hedging

Accounting treatment before January 1, 2020

The Group uses derivative financial instruments of cross currency and interest rate swap and option to hedge the exposure of variability in cash flows that is attributable to fluctuation of exchange rate and floating interest rate risks.

The normal course of the Group's business exposes it to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management's written treasury policies, the Company uses derivatives and other hedging instruments. PSAK 55 allows three types of hedging relationships:

- *Fair value hedge;*
- *Cash flow hedge;*
- *Hedge of a net investment in a foreign operation.*

The Group uses hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:

- *The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;*
- *Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*
- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

**Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Lindung Nilai Atas Arus Kas**

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Grup mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Derivatif

Seluruh derivatif awalnya diakui dan selanjutnya dinyatakan pada nilai wajar. Kebijakan Grup menggunakan derivatif hanya untuk tujuan lindung nilai. Akuntansi untuk derivatif dalam hubungan lindung nilai diuraikan dalam bagian di atas.

Jika, Grup melibatkan derivatif untuk melindungi nilai beberapa transaksi tetapi kriteria lindung nilai yang ketat sesuai PSAK 55 tidak dipenuhi. Dalam hal ini, meskipun transaksi memiliki alasan ekonomi dan bisnis, akuntansi lindung

The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.

**Accounting treatment since January 1, 2020
Cash Flow Hedge**

The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognised (net of tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in profit or loss.

No adjustment is made to the hedged item.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Group reclassifies the associated gains and losses that were recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.

Derivatives

All derivatives are initially recognized and subsequently carried at fair value. The Group policy is to use derivatives only for hedging purposes. Accounting for derivatives engaged in hedging relationship is described in the above section.

If, the Group enters into certain derivatives in order to hedge some transactions but the strictly hedging criteria prescribed by PSAK 55 are not met, even though the transaction has its economic and business rationale, hedge

nilai tidak dapat diterapkan. Akibatnya, perubahan dalam nilai wajar derivatif tersebut diakui dalam laba rugi dan akuntansi untuk item yang dilindung nilai mengikuti kebijakan Grup untuk item tersebut.

Derivatif Melekat

Derivatif melekat dalam kontrak utama nonderivatif diperlakukan sebagai derivatif terpisah jika karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak berkaitan erat dengan karakteristik dan risiko dari kontrak utama dan kontrak utama tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

accounting cannot be applied. As a result, changes in the fair value of those derivatives are recognized in profit or loss and accounting for the hedged item follows the Group's policies for that item.

Embedded Derivatives

Embedded derivatives in non-derivative host contracts are treated as separate derivatives when their risks and economic characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value to profit or loss.

2.f. Kas dan Bank

Kas dan Bank termasuk kas dan kas di bank (rekening giro), yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.f. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks are cash on hand and cash in banks (demand deposits) that are not used as collateral or are not restricted in use.

2.g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode biaya masuk pertama keluar pertama. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.g. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the first in first out method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period of the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in against cost of inventories recognized in the period in which the reversal occurs.

2.h. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dan dikelompokkan sebagai aset lancar dan tidak lancar, mana yang lebih tepat.

2.h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the period benefited, and are classified as current or non-current assets, whichever is more appropriate.

2.i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan

2.i. Property and Equipment

Property and Equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing

langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Aset tetap, kecuali menara dan sarana penunjang, dicatat dengan menggunakan model biaya yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, menara dan sarana penunjang dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat netto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya dari aset tersebut.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang jumlah tercatat yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan berikut ini.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai

the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Property and equipment, except Property and Supporting Equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

After initial recognition towers and supporting equipment are accounted for using the revaluation model, which is the fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses.

When an item of fixed assets is revalued, any accumulated depreciation at the date of the revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset.

The amount of the adjustment arising on the restatement or elimination of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with the following policy.

If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss.

If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognised in profit or loss. However, the decrease is recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in

yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

respect of that asset. The decrease recognised in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Revaluations are performed with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

Sebagian surplus revaluasi dialihkan sejalan dengan penggunaan aset ke saldo laba sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset awalnya. Pada saat penghentian pengakuan aset, surplus revaluasi untuk aset tersebut dialihkan ke saldo laba.

Sum of revaluation surplus is transferred as the asset is used to retained earnings amounting to the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the assets and depreciation based on the asset's original cost. Upon asset disposal, any revaluation surplus relating to those asset is transferred to retained earnings.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus, berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Depreciation of property and equipment has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

<u>Tahun/Years</u>		
Menara dan Sarana Penunjang	30	Towers and Supporting Equipment
Bangunan	20	Buildings
Menara Bergerak	8	Transportable Towers
Jaringan Serat Optik dan Infrastruktur	4 – 20	Fiber Optic Networks and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	4 – 8	Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	4	Vehicles
Antena Indoor	8	Indoor Antenna

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perusahaan dan entitas anak, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and subsidiaries, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Construction in progress are stated at cost and presented as part of the property and equipments. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipments account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

Nilai residu, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir tahun buku, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed every year ended, and adjusted prospectively, if appropriate.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

The carrying amount of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset) is credited or charged to operations in the asset is derecognized. At the end of each financial period, the Group reviews useful life, residual values, methods of depreciation, and the remaining useful life based on technical condition.

2.j. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir tahun, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

2.j. Impairment of Assets

In the end of the year, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

Penurunan Nilai Goodwill

Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh goodwill merepresentasikan level terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal dan tidak lebih besar dari segmen operasi.

2.k. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui

Impairment of Goodwill

Irrespective of whether there is any indication of impairment, goodwill is tested for impairment annually.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each cash-generating unit, or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree were assigned to those units or groups of units. Each unit or group of units to which the goodwill is so allocated represent the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes and is not larger than an operating segment.

2.k. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities recognized by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant SAK's.

Component of non-controlling interests of the acquiree are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in

dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur

other comprehensive income, that amount shall be recognized with the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, regardless of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation

berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.I. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas dari pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

2.I. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- (a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (i) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- (b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - (i) *The entity and the reporting entity are members of the same business group (i.e. parent entity, subsidiary and the fellow subsidiary is related to the others);*
 - (ii) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a business group of which the other entity is members);*
 - (iii) *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - (iv) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - (v) *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employee benefit of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - (vi) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
 - (vii) *A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); ors*

(viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

(viii) The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

**2.m. Imbalan Kerja
Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

**2.m. Employee Benefits
Short-term Employee Benefits**

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during the accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include as among wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance pay and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefits liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

- 2.n. Pengakuan Pendapatan dan Beban**
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan pada saat diperoleh. Uang muka sewa yang diterima di muka disajikan sebagai "Pendapatan Ditangguhkan" dan diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus sesuai masa sewanya. Pendapatan sewa properti investasi yang belum ditagih disajikan sebagai piutang yang belum difakturkan dan dicatat di akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020
Grup mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisis transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut;
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) *When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) *When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

- 2.n. Revenue and Expenses Recognition**
Accounting treatment before January 1, 2020
Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Rental income from operating lease of is recognized as revenue when earned. The rental received in advance are presented as "Deferred Income" and recognized as income on straight-line basis over the lease term. Tower rental revenue that has not been billed yet is presented as accrued income and recorded in Accrued Income.

Expenses are recognized as incurred on accrual basis.

Accounting treatment since January 1, 2020
The Group recognizes revenues in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

- i. *Identify contract(s) with a customer with certain criteria as follows:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*

- Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
- Kontrak memiliki substansi komersial
- Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
- *The contract has commercial substance*
- *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred*
- ii. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- iii. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
- iv. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;*
- v. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

2.o. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan

2.o. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial

timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group are offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Grup sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Grup untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Grup.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Grup telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- i. Tanggal SKPP
- ii. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP
- iii. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

2.q. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) has legally enforceable rights to offset the recognized amounts; and*
- b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously*

2.p. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Group receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Group has disclosed the following in its financial statements:

- i. The date of SKPP*
- ii. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with SKPP*
- iii. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.*

2.q. Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity with the weighted average ordinary shares outstanding during the period.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the impact of all dilutive potential ordinary shares.

2.r. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang fungsional Pratama Agung Pte. Ltd. (PA), entitas anak adalah Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas PA pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam akun "Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing".

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

1 USD
1 SGD

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.r. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and most of the subsidiaries are Rupiah.

The functional currency of Pratama Agung Pte. Ltd. (PA), a subsidiary, is United States Dollar (USD). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of PA at reporting date are translated at the closing rate at statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using transaction rate for the period. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income in "Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currency" account.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e. middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
1 USD	14,105	13,901
1 SGD	10,644	10,320

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.s. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainnya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya selama 5-11 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika, dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud merupakan perbedaan antara nilai neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak diakui sebagai pendapatan.

Goodwill

Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. *Goodwill* tidak diamortisasi.

2.s. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either definite or indefinite.

Intangible Asset with Definite Useful Life

Intangible asset with definite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Amortization is calculated so as to write-off the cost of the asset less its estimated residual value, over its useful economic life of 5-11 years.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset derecognised if, disposed or when there was no longer economic benefits future expected from its use or disposal.

Gain or loss arises from derecognition of intangible asset is the difference between the value of net disposed (if any) and the number of registered assets. Gain or losses recognized in profit or loss when the asset was retired. Gain is not recognized as revenue.

Goodwill

Goodwill arising in a business combination is initially measured at its cost, being the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

After initial recognition, goodwill acquired in a business combination is measured at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is not amortised.

2.t. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.u. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 Grup sebagai Lessee

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental

2.t. Operating Segments

The Group presented operating segments based on the financial information used by the operational decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by operational decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

2.u. Leases

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Accounting treatment before January 1, 2020 Group as Lessee

At the commencement of the lease term, the Group recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental

lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Lessor

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;

borrowing is used. Any initial direct costs of the *lessee* are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the property and equipment that are owned.

Under an operating lease, the Group recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Group as Lessors

The Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment in the finance lease as lessor.

The Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, be recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

Accounting treatment since January 1, 2020 Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- Remeasure and allocate the consideration in the modified contract;

- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Lessee

Pada tanggal inisiasi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- (a) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasi; dan
- (b) hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, yaitu hanya jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau

- Determine the lease term of the modified lease;
- Remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- Decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- Make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for leases of low-value assets and short-term leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessee:

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Group shall assess whether, throughout the period of use, the Group has both of the following:

- (a) the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and
- (b) the right to direct the use of the identified asset, only if either:
 - (i) The Group and subsidiaries has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or

(ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

- Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
- Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan

Pada tanggal permulaan, Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir

(ii) the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:

- The Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or
- The Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.

At the commencement date, the Group shall recognise a right of use asset and a lease liability.

At the commencement date, the Group shall measure the right of use asset at cost, which includes the amount of the initial measurement of the lease liability, any lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received, any initial direct costs incurred by the Group, and an estimate of costs to be incurred by the Group in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories.

After the commencement date, the Group shall measure the right of use asset applying a cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right of use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right of use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right of use asset from the

umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or the end of the lease term.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

At the commencement date, the Group shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group shall use the Group's incremental borrowing rate.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- a. *increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- b. *reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*
- c. *remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company and subsidiaries changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right of use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right of use asset has been reduced to zero.

2.v. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2.v. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Nilai Wajar Aset Tetap

Nilai wajar aset tetap bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari aset tetap. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

Penurunan Nilai Goodwill

Dalam melakukan estimasi penurunan nilai *goodwill*, manajemen Grup melakukan analisis dan *assessment* atas kemampuan unit penghasil kas, kondisi perubahan operasi entitas akuisisian dan pengalihan unit penghasil *goodwill*. Bila terdapat indikasi penurunan kemampuan unit penghasil kas dalam menghasilkan kas dan manajemen berkeyakinan bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan kemampuan dalam menghasilkan kas, maka manajemen akan

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions

Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Fair Value of Property and Equipment

The Group's fair value of property and equipment depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believe that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its investment property. Further details are disclosed in Note 9.

Impairment of Goodwill

In estimating the impairment of goodwill, the Group's management performs analysis and assessment of the ability of the cash generating unit, the change of the operating conditions of acquired entity and transfer of goodwill generating unit. If there are indications of a decrease in the ability of the cash generating unit in generating cash and management believes that the cash generating unit decrease the ability to generate cash, then the management will do

melakukan *impairment* atas *goodwill*. Bila terjadi perubahan operasional unit bisnis dan/atau unit penghasil kas telah dialihkan, maka seluruh nilai *goodwill* yang dicatat sebelumnya akan diturunkan nilainya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas (Catatan 2.i). Nilai tercatat aset tetap disajikan di Catatan 9.

Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir tahun pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban yang terkait. Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode dimana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir tahun pelaporan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan

the impairment of goodwill. If there is a change in the operational business units and/ or cash-generating unit has been transferred, the entire value of goodwill previously recorded will be impaired.

Estimated Useful Life of Property and Equipment

The Group reviews periodically the estimated useful life of property and equipment based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates due to changes in the mentioned factors above (Note 2.i). Carrying value of property and equipment is disclosed in Note 9.

Post-Employment Benefits

The present value of post-employment benefits liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the cost (income) include the discount rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits.

The Group determines the appropriate discount rate at end of reporting year by the interest rate used to determine the present value of future cash outflows expected to settle this obligation. In determining the appropriate level of interest rates, the Group considers the interest rate of government bonds denominated in Rupiah that has a similar year to the corresponding year of obligation. Other key assumption is partly determined by current market conditions, during the year in which the post-employment benefits liability is resolved. Changes in the employee benefits assumption will impact on recognition of actuarial gains or losses at the end of the year. Further details are disclosed in Note 18.

Allowance for Impairment Loss

Accounting treatment since January 1, 2020
The Group assess their financial assets measured at amortized cost for impairment

yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai piutang usaha. Nilai tercatat piutang telah diungkapkan dalam Catatan 4.

Sehubungan dengan provisi spesifik, Perusahaan memiliki tagihan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT Internux (INUX) yang telah direstrukturisasi (Catatan 12), karena menurut evaluasi manajemen terdapat ketidakpastian dalam penyelesaiannya, sehingga seluruh piutang Grup dari BTEL dan INUX telah dicatat cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar nilai tercatat piutang kepada BTEL dan INUX.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Estimasi Pajak Tangguhan

Pengakuan aset pajak tangguhan dilakukan hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada tahun mendatang, di mana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi laba kena

at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach using roll rate and discounted cash flow to measuring trade receivables. The carrying amounts of receivables are disclosed in Note 4.

In relation to specific provision, the Company has receivables from PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) and PT Internux (INUX) which were restructured (Note 12), due to based on the management's assesment that the uncertainty of the receivables repayment, all the Group's receivables from BTEL and INUX has been provided by provision for impairment loss at the carrying value of BTEL and INUX's receivables.

Fair Value of Financial Instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, Management's judgment is required to determine fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rate, accelerated repayment rate, and default rate assumptions.

Deferred Tax Estimation

Deferred tax assets recognition is performed only if it is probable that the asset will be recovered in the form of economic benefits to be received in future years, in which the temporary differences and tax losses can still be used. Management also considers the future estimated taxable income and strategic tax planning in order to

pajak di masa datang dan perencanaan strategis perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks di mana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat (Catatan 27.d).

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Sejak 1 Januari 2020, Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.e.

evaluate its deferred tax assets in accordance with applicable tax laws and its updates. As a result, related to its inherent nature, it is likely that the calculation of deferred taxes is related to a complex pattern where assessment requires a judgment and is not expected to provide an accurate calculation (Note 27.d).

ii. Critical judgments in applying the accounting policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

Since January 1, 2020, the Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.e.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kas dan Bank

3. Cash on Hand and in Banks

	2020 Rp	2019 Rp	
Kas	487	489	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	98,686	224,961	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	20,784	20,003	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,421	12,512	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	17,087	1,779	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Permata Tbk	10,139	6	PT Bank Permata Tbk
Citibank N.A., Cabang Jakarta	1,740	1,741	Citibank N.A., Jakarta Branch
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,156	368	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank	1,077	85,724	Standard Chartered Bank
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	155	126	Others (below Rp1,000 each)
Subjumlah	169,245	347,220	Subtotal
<u>US Dolar</u>			<u>US Dollar</u>
Standard Chartered Bank			Standard Chartered Bank
(2020: USD4,743,724; 2019: USD878,505)	66,910	12,212	(2020: USD4,743,724; 2019: USD878,505)
PT Bank CIMB Niaga Tbk			PT Bank CIMB Niaga Tbk
(2020:USD27,349; 2019: USD27,403)	386	382	(2020:USD27,349; 2019: USD27,403)
PT Bank BNP Paribas Indonesia			PT Bank BNP Paribas Indonesia
(2019: USD77,402)	--	1,076	(2019: USD77,402)
Lain-lain (2020: USD10,472; 2019: USD11,151)			Others (2020: USD10,472; 2019: USD11,151)
(masing-masing di bawah USD15,000)	148	155	(below USD15,000 each)
Subjumlah	67,444	13,825	Subtotal
Jumlah Kas dan Bank	237,176	361,534	Total Cash on Hand and in Banks

4. Piutang Usaha

4. Trade Receivables

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 29)			Related Party (Note 29)
PT Sekawan Abadi Prima	--	19	PT Sekawan Abadi Prima
Pihak Ketiga			Third Parties
PT XL Axiata Tbk	471,080	478,105	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	105,579	107,496	PT Hutchison 3 Indonesia
PT First Media Tbk	27,155	27,155	PT First Media Tbk
PT Indosat Tbk	11,518	4,778	PT Indosat Tbk
PT Telekomunikasi Selular	11,114	5,147	PT Telekomunikasi Selular
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	17,550	18,645	Others (below Rp10,000 each)
Subjumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga	643,996	641,326	Subtotal Trade Receivables from Third Parties
Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai	(29,775)	(29,559)	Less: Allowance for Impairment Loss
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga - Neto	614,221	611,767	Total Trade Receivable from Third Parties - Net
Jumlah Piutang Usaha - Neto	614,221	611,786	Total Trade Receivables - Net

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Perubahan cadangan kerugian nilai adalah sebagai berikut:

Movement in allowance for impairment losses is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Saldo Awal Tahun	29,559	29,495	Beginning Balance
Penambahan	407	759	Addition
Penghapusan	(191)	(695)	Write-off
Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	29,775	29,559	Total Allowance for Impairment Losses

Grup telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Group applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK 71 on January 1, 2020, which permits the use of the lifetime expected credit loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the allowance for expected credit loss of trade receivables is adequate to cover loss on uncollectible receivables.

Seluruh saldo piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

Analisis piutang usaha berdasarkan jatuh temponya disajikan pada Catatan 30.

Analysis of trade receivables by maturity is presented in Note 30.

Piutang usaha dijadikan jaminan atas utang bank sindikasi jangka panjang (Catatan 17.b).

Trade receivables used as collateral for long-term syndicated bank loans (Note 17.b).

5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

5. Accrued Income

Berikut merupakan rincian pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan pelanggan:

The detail of accrued income by customer is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
PT Telekomunikasi Selular	133,028	95,706	PT Telekomunikasi Selular
PT XL Axiata Tbk	38,784	72,347	PT XL Axiata Tbk
PT Indosat Tbk	17,181	8,673	PT Indosat Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	15,187	28,764	PT Hutchison 3 Indonesia
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	13,561	3,742	Others (below Rp10,000 each)
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	217,741	209,232	Total Accrued Income

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dan lainnya yang belum ditagih karena kelengkapan dokumen penagihan sedang dalam proses verifikasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Accrued income represents unbilled rental income of telecommunication towers and others due to the completeness of billing documents were in the verification process as of December 31, 2020 and 2019.

6. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain merupakan piutang non-usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Other receivables represents non-trade receivables to third parties as of December 31, 2020 and 2019.

7. Persediaan

Akun ini terdiri dari persediaan atas material konstruksi menara dan sarana penunjang, peralatan telekomunikasi dan suku cadang.

This account consists of the supply of tower construction materials and supporting equipment, telecommunication equipments and spare parts.

Persediaan Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, pencurian, kerusakan dan lain-lain kepada PT Lippo Insurance General Tbk, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp47.022 dan Rp13.458 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Inventory of the Group has been insured against fire, earthquake, thieves, damages and other risks to PT Lippo Insurance General Tbk, third party, with a sum insured amounted to Rp47,022 and Rp13,458 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Grup telah melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.732.

The Group has provided allowance for impairment in value of inventories as of December 31, 2020 amounting to Rp16,732.

Berdasarkan hasil penelaahan atas persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang timbul dari penurunan nilai persediaan.

Based on a review of inventories at year end, management believes that the allowance for impairment of inventories is adequate to cover losses from decline in value of inventories.

8. Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

8. Advances and Prepaid Expenses

	2020 Rp	2019 Rp	
Uang Muka Operasional	64,895	60,569	Operational Advances
Hak Penggunaan Kapasitas Jaringan dan Kabel Laut Serat Optik (Catatan 32.b.2)	47,998	54,998	Right to Use Intercity Network Capacity and Fiber Optic Sea Cables (Note 32.b.2)
Perizinan dan Lain-lain	33,419	23,054	Permits and Others
Sewa Lahan	--	929,423	Land Lease
Jumlah	146,312	1,068,044	Total
Beban Dibayar di Muka - Bagian Jangka Panjang			Prepaid Expenses - Non-Current Portion
Hak Penggunaan Kapasitas Jaringan dan Kabel Laut Serat Optik (Catatan 32.b.2)	40,998	47,998	Right to Use Intercity Network Capacity and Fiber Optic Sea Cables (Note 32.b.2)
Perizinan dan Lain-lain	21,330	10,278	Permits and Others
Sewa Lahan	--	741,423	Land Lease
Jumlah Beban Dibayar di Muka - Bagian Jangka Panjang	62,328	799,699	Total Prepaid Expenses - Non-Current Portion
Jumlah - Bagian Jangka Pendek	83,984	268,345	Total - Current Portion

Grup memiliki perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga yang antara lain berlokasi di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

The Group entered land lease agreements with third parties which among others, located in Java, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi and Papua.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 1 Januari 2020, beban dibayar di muka atas sewa lahan direklasifikasi ke aset hak guna sesuai dengan penerapan PSAK 73 (Catatan 10).

On January 1, 2020, prepaid expense's of land lease were reclassified to right of use assets in accordance with the application of PSAK 73 (Note 10).

Perizinan dan lain-lain terutama merupakan biaya perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diamortisasi sesuai masa berlakunya.

Permits and others is mainly represented Building Construction Permits (IMB) acquisition costs which amortized over the IMB validity period.

9. Aset Tetap

9. Property and Equipment

2020							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi Penyusutan dan Penyesuaian Nilai Wajar/ Accumulated Depreciation and Fair Value Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Model Revaluasi							Revaluation Model
Menara dan Sarana Penunjang	7,883,174	293,986	(34,921)	46,331	315,348	64,168	8,568,086 Towers and Supporting Equipment
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Menara dan Sarana Penunjang	--	(155,559)	300	(878)	156,137	--	-- Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	7,883,174	138,427	(34,621)	45,453	471,485	64,168	8,568,086 Subtotal
Model Biaya							Cost Model
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	10,969	--	--	--	--	--	10,969 Building
Menara Bergerak	22,857	--	--	(1,560)	--	--	21,297 Transportable Towers
Jaringan, Serat Optik dan Infrastruktur	779,495	66,426	--	3,038	--	--	848,959 Networks, Fiber Optic and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	46,807	17,713	--	--	--	--	64,520 Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	2,325	2,110	(508)	--	--	--	3,927 Vehicles
Antena Indoor	33,584	1,534	--	80	--	--	35,198 Indoor Antenna
Subjumlah	896,037	87,783	(508)	1,558	--	--	984,870 Subtotal
Aset Dalam Penyelesaian							Construction in Progress
Jaringan, Serat Optik, Infrastruktur dan Antena	26,376	38,807	--	(3,105)	--	--	62,078 Networks, Fiber Optic, Infrastructure and Antenna
Menara dan Sarana Penunjang	60,501	22,842	--	(45,521)	--	--	37,822 Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	86,877	61,649	--	(48,626)	--	--	99,900 Subtotal
Jumlah	982,914	149,432	(508)	(47,068)	--	--	1,084,770 Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	(3,981)	(548)	--	--	--	--	(4,529) Building
Menara Bergerak	(12,850)	(2,619)	--	878	--	--	(14,591) Transportable Towers
Jaringan, Serat Optik dan Infrastruktur	(343,022)	(55,829)	--	--	--	--	(398,851) Networks, Fiber Optic and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	(41,940)	(3,789)	--	--	--	--	(45,729) Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	(2,082)	(494)	508	--	--	--	(2,068) Vehicles
Antena Indoor	(20,491)	(5,379)	--	--	--	--	(25,870) Indoor Antenna
Jumlah	(424,366)	(68,658)	508	878	--	--	(491,638) Total
Nilai Tercatat	8,441,722						9,161,218 Carrying Value

2019							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi Penyusutan dan Penyesuaian Nilai Wajar/ Accumulated Depreciation and Fair Value Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Model Revaluasi							Revaluation Model
Menara dan Sarana Penunjang	7,757,686	263,494	(165,995)	5,137	119,101	(96,249)	7,883,174 Towers and Supporting Equipment
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Menara dan Sarana Penunjang	--	(83,264)	1,921	--	81,343	--	-- Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	7,757,686	180,230	(164,074)	5,137	200,444	(96,249)	7,883,174 Subtotal
Model Biaya							Cost Model
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	10,969	--	--	--	--	--	10,969 Building
Menara Bergerak	22,857	--	--	--	--	--	22,857 Transportable Towers
Jaringan, Serat Optik dan Infrastruktur	741,269	27,600	--	10,626	--	--	779,495 Networks, Fiber Optic and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	53,636	1,421	(78)	(8,172)	--	--	46,807 Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	2,945	--	(620)	--	--	--	2,325 Vehicles
Antena Indoor	32,665	837	--	82	--	--	33,584 Indoor Antenna
Subjumlah	864,341	29,858	(698)	2,536	--	--	896,037 Subtotal

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

2019							
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi Penyusutan dan Penyesuaian Nilai Wajar/ Accumulated Depreciation and Fair Value Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Dalam Penyelesaian							Construction in Progress
Jaringan, Serat Optik, Infrastruktur dan Antena	7,684	20,077	--	(1,385)	--	26,376	Networks, Fiber Optic, Infrastructure and Antenna
Menara dan Sarana Penunjang	9,801	55,837	--	(5,137)	--	60,501	Towers and Supporting Equipment
Subjumlah	17,485	75,914	--	(6,522)	--	86,877	Subtotal
Jumlah	881,826	105,772	(698)	(3,986)	--	982,914	Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Bangunan	(3,432)	(549)	--	--	--	(3,981)	Building
Menara Bergerak	(10,045)	(2,805)	--	--	--	(12,850)	Transportable Towers
Jaringan, Serat Optik dan Infrastruktur	(274,285)	(62,362)	--	(6,375)	--	(343,022)	Networks, Fiber Optic and Infrastructures
Peralatan dan Perabot Kantor	(44,894)	(3,458)	37	6,375	--	(41,940)	Office Equipment and Furnitures
Kendaraan	(2,227)	(86)	231	--	--	(2,082)	Vehicles
Antena Indoor	(16,285)	(4,206)	--	--	--	(20,491)	Indoor Antenna
Jumlah	(351,168)	(73,466)	268	--	--	(424,366)	Total
Nilai Tercatat	8,288,344					8,441,722	Carrying Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dicatat pada beban pokok pendapatan dan beban usaha (Catatan 23 dan 24).

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 are recorded to cost of revenues and operating expenses (Notes 23 and 24).

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp165.746 dan Rp154.269.

Acquisition cost of property and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp165,746 and Rp154,269, respectively.

Aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, kerusakan dan lain-lain kepada PT Lippo General Insurance Tbk, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.859.601 and Rp1.858.183 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami.

Property and equipment of the Group have been insured against fire, thieves, damages and other risks to PT Lippo General Insurance Tbk, third parties, with sum insured amounted to Rp1,859,601 and Rp1,858,183 as of December 31, 2020 and 2019, respectively. The management believes that the amount insured is adequate to cover any possible losses.

Kerugian atas pelepasan aset tetap pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp34.621 dan Rp164.094. Pelepasan aset terutama merupakan pembongkaran menara dan sarana penunjang yang dicatat sebagai bagian dari beban lain-lain – bersih (Catatan 26).

Loss on disposal of property and equipment for 2020 and 2019 amounted to Rp34,621 and Rp164,094, respectively. Disposal mainly dismantling of towers and supporting equipment that recorded as part of others expense – net (Note 26).

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset dalam penyelesaian merupakan pekerjaan terkait menara dan sarana penunjang serta jaringan serat optik dan infrastrukturnya dengan persentase tingkat penyelesaian terhadap nilai kontrak sebesar lebih dari 50% dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2021.

As of December 31, 2020, construction in progress are related to tower and supporting equipment and also fiber optic network and infrastructure with percentage of completion to contract value of more than 50% and estimated to be completed in 2021.

Nilai wajar menara dan sarana penunjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diestimasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan, penilai

The fair value of tower and supporting equipment for December 31, 2020 and 2019 are estimated based on appraisal conducted by KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan, independent appraiser. Fair

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

independen. Nilai wajar menara dan sarana penunjang dihitung menggunakan metode Diskonto Arus Kas untuk pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dan nilai wajar tanah dengan menggunakan metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar. Penilaian estimasi nilai wajar menggunakan input selain harga kuotasian dari pasar aktif yang dapat diobservasi. Berikut ini asumsi-asumsi signifikan yang dipakai oleh penilai dalam menghitung nilai wajar atas menara dan sarana penunjang:

value of the towers and supporting equipment was calculated using Discounted Cash Flows method on income approach and cost approach, and fair value of land calculated using Market Data Approach method. Estimated fair value using inputs other than quoted prices in active market that are observable. Significant assumptions used by the appraiser to determine the fair value of towers and supporting equipment are as follows:

	2020	2019	
Tingkat Diskonto (Per Tahun) dengan <i>Weighted Average</i> <i>Cost of Capital</i> (WACC)	11.36% (PT Sarana Inti Persada dan / and PT BIT Teknologi Nusantara: 11.30%)	11.30%	Discount Rate (Per Annum) using <i>Weighted Average</i> <i>Cost of Capital</i> (WACC)
Tingkat Inflasi (Per Tahun)	3.12%	3.35%	Inflation Rate (Per Annum)
Umur Manfaat Menara dan Sarana Penunjang	30 Tahun / Years	30 Tahun / Years	Useful Life of Towers and Supporting Equipments

Menara dan sarana penunjang dijamin untuk utang bank sindikasi jangka panjang yang diperoleh (Catatan 17.b).

Towers and supporting equipment are used as collateral for long-term syndicated bank loans (Note 17.b).

Pada 2020 dan 2019, uang muka yang direklasifikasi ke aset tetap adalah sebesar Rp737 dan Rp1.151.

In 2020 and 2019, advances which have been reclassified into property and equipment amounted to Rp736 and Rp1,151, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan nilai aset tetap mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2020 and 2019, management believes that there are no indications of changes in condition that might cause impairment of property and equipment.

10. Aset Hak Guna

10. Right of Use Assets

Sesuai dengan PSAK 73 mengenai "Sewa", akun ini merupakan sewa lahan untuk menara telekomunikasi, sewa tempat dan sewa peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

Based on PSAK 73 "Leases", this account represents land leases for telecommunication towers, space leases and equipment leases, with details as follows:

	31 Desember / December 31, 2019 Rp	Penyesuaian Saldo Awal / Adjustment of Initial Balance Rp	Penambahan / Addition Rp	Pengurangan / Disposal Rp	31 Desember / December 31, 2020 Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Lahan	--	1,299,516	18,886	(336)	1,318,066	Land
Peralatan	--	40,647	68,461	(213)	108,895	Equipment
Bangunan	--	9,431	34,344	(1,518)	42,257	Building
Jumlah Biaya Perolehan	--	1,349,594	121,691	(2,067)	1,469,218	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Lahan	--	--	(190,489)	336	(190,153)	Land
Peralatan	--	--	(9,054)	213	(8,841)	Equipment
Bangunan	--	--	(6,501)	1,518	(4,983)	Building
Jumlah Akumulasi Penyusutan	--	--	(206,044)	2,067	(203,977)	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	--	--			1,265,241	Carrying Amount

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dicatat pada beban pokok pendapatan dan beban usaha (Catatan 23 dan 24).

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2020 are recorded to cost of revenues and operating expenses (Notes 23 and 24).

11. Aset Takberwujud

11. Intangible Assets

	2020 Rp	2019 Rp	
Goodwill	89,029	89,029	Goodwill
Aset Takberwujud Lainnya	16,845	21,740	Other Intangible Assets
Jumlah Aset Takberwujud	105,874	110,769	Total Intangible Assets

Goodwill

Goodwill dan sebagian aset takberwujud lainnya berasal dari akuisisi entitas anak (Catatan 1.d).

Goodwill

Goodwill and part of other intangible assets occurred from acquisition of subsidiaries (Note 1.d).

Aset Takberwujud Lainnya

Other Intangible Assets

	2019 Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Disposal Rp	2020 Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat Lunak	70,181	4,899	--	75,080	Software
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat Lunak	(48,441)	(9,794)	--	(58,235)	Software
Nilai Tertcatat	21,740			16,845	Carrying Value

	2018 Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Disposal Rp	2019 Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat Lunak	58,436	11,745	--	70,181	Software
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat Lunak	(39,166)	(9,275)	--	(48,441)	Software
Nilai Tertcatat	19,270			21,740	Carrying Value

Pada 2019, penambahan aset takberwujud termasuk reklasifikasi dari uang muka sebesar Rp4.865.

In 2019, additional of intangible assets including reclassification from advance amounting to Rp4,865.

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dicatat pada beban usaha dan beban lain-lain (Catatan 24 dan 26).

Amortization expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 are recorded to operating expenses and other expenses (Notes 24 and 26).

12. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

12. Other Non-Current Financial Assets

	2020 Rp	2019 Rp	
Piutang Usaha yang Direstrukturasikan			Restructured Trade Receivables
PT Internux (Catatan 32.b.2)	299,466	299,466	PT Internux (Note 32.b.2)
PT Bakrie Telecom Tbk (Catatan 32.b.1)	123,797	123,797	PT Bakrie Telecom Tbk (Note 32.b.1)
Dikurangi:			Less:
Cadangan Penurunan Nilai atas			Allowance for Impairment Loss
Piutang Usaha yang Direstrukturasikan	(423,263)	(423,263)	of Restructured Trade Receivables
Subjumlah	--	--	Subtotal

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Piutang Derivatif (Catatan 32.a)	--	43,353	Derivative Receivables (Note 32.a)
Lain-lain	3,464	3,531	Others
Subjumlah	3,464	46,884	Subtotal
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	3,464	46,884	Other Non-Current Financial Assets

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai aset keuangan tidak lancar lainnya tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment loss of othe non-current financial asstes is adequate to cover loss on uncollectible receivables.

13. Utang Usaha

13. Trade Payables

Akun ini merupakan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur.

This account represents liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied and have been billed through invoice.

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 29)</u>			<u>Related Party (Note 29)</u>
PT Sekawan Abadi Prima	29	2,548	PT Sekawan Abadi Prima
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Indah Pratama Abadi	4,999	2,920	PT Indah Pratama Abadi
PT Harapan Utama Prima	81	2,548	PT Harapan Utama Prima
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp2.000)	10,092	3,044	Others (below Rp2,000 each)
Subjumlah	15,172	8,512	Subtotal
Jumlah Utang Usaha	15,201	11,060	Total Trade Payables

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang Rupiah dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas perolehan utang ini.

All trade payables are denominated in Rupiah and there is no collateral given by the Group of these payables.

14. Akrual

14. Accruals

	2020 Rp	2019 Rp	
Estimasi Biaya Penyelesaian			Estimated Completion Cost of
Pembangunan Aset Tetap	115,964	73,109	Property and Equipment
Beban Keuangan Lainnya	10,665	18,788	Other Financial Charges
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	10,513	20,212	Repairs and Maintenance Expenses
Bonus dan Tunjangan	10,276	6,198	Bonuses and Allowance Expenses
Beban Bunga	8,732	11,079	Interest Expense
Jasa Keamanan	3,163	10,227	Security Services
Beban Sewa	2,363	11,871	Rental Expenses
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000)	23,092	20,257	Others (below Rp5,000 each)
Jumlah Akrual	184,768	171,741	Total Accruals

Beban bunga dan beban keuangan lainnya terkait fasilitas pinjaman bank sindikasi yang diperoleh Perusahaan (Catatan 17).

Interest expense and other financial charges are related to syndicated bank loan facilities obtained by the Company (Note 17).

15. Pendapatan Ditangguhkan

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa menara dan lain-lain kepada pihak ketiga sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
PT XL Axiata Tbk	426,239	553,733
PT Hutchison 3 Indonesia	146,991	113,168
PT Telekomunikasi Selular	8,032	14,473
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	1,347	6,809
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	582,609	688,183

This account represents deferred income from rental of towers and others to third parties are as follows:

PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular
Others (below Rp10,000 each)
Total Deferred Income

16. Liabilitas Sewa

Sesuai dengan penerapan PSAK 73, Grup mengakui liabilitas sewa atas aset hak guna dengan rincian sebagai berikut:

Based on PSAK 73, the Group recognized lease liabilities of right of use assets with details as follows:

	2020 Rp
Dampak Penerapan Awal PSAK 73	447,476
Ditambah:	
Penambahan Aset Hak Guna	116,649
Beban Keuangan	29,933
Dikurangi:	
Pembayaran Liabilitas Sewa	(267,363)
Saldo Akhir	326,695
Utang Sewa - Bagian Jangka Panjang	292,749
Bagian Jangka Pendek	33,946

<i>Impact on Initial Application of PSAK 73</i>
<i>Addition:</i>
<i>Acquisition of Rights of Use Assets</i>
<i>Financial Charges</i>
<i>Less:</i>
<i>Payments of Lease Liabilities</i>
Ending Balance
Lease Liabilities - Long Term Portion
Current Portion

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dicatat pada beban keuangan sebesar Rp29.933 (Catatan 25.b).

Interest expenses of lease liabilities for the year ended December 31, 2020 is recorded to financial expenses amounting to Rp29,933 (Note 25.b).

17. Utang Bank Sindikasi

17. Syndicated Bank Loans

a. Utang Bank Jangka Pendek

a. Short-Term Bank Loan

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Fasilitas IDR Revolving Loan</u>		
PT Bank BNP Paribas Indonesia	95,625	63,750
PT Bank Permata Tbk	95,625	63,750
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	64,688	43,125
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	61,875	41,250
PT Bank BTPN Tbk	42,187	28,125
Bank of China (Hongkong) Ltd., Cabang Jakarta	33,750	22,500
PT Bank CIMB Niaga Tbk	28,125	18,750
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28,125	18,750
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	450,000	300,000

<u>IDR Revolving Loan Facility</u>
PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Permata Tbk
Citibank, N.A., Jakarta Branch
MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch
PT Bank BTPN Tbk
Bank of China (Hongkong) Ltd., Jakarta Branch
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Short - Term Bank Loan

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

b. Utang Bank Berjangka

Rincian pinjaman bank sindikasi berdasarkan bank pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
PT Bank BNP Paribas Indonesia	457,025	482,275
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Hongkong	382,951	398,264
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	363,901	380,109
PT Bank CIMB Niaga Tbk	321,988	338,316
ING Bank N.V., Cabang Singapura	319,126	331,886
PT Bank QNB Indonesia Tbk	300,000	--
PT Bank Shinhan Indonesia	285,777	298,331
Cathay United Bank, Cabang Singapura	277,639	288,741
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	266,975	281,725
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	261,100	592,100
PT Bank BTPN Tbk	257,925	272,175
PT Bank Permata Tbk	256,447	270,616
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Singapura	231,366	240,618
Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	191,476	199,132
Bank of China (Hongkong) Ltd., Cabang Jakarta	190,050	200,550
Aozora Asia Pacific Finance Limited, Hongkong	188,284	195,813
Bank of China Limited, Cabang Singapura	185,093	192,494
Yuanta Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan	185,093	192,494
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	181,000	191,000
PT Bank CTBC Indonesia	181,000	191,000
Hong Kong Mortgage Corporation Limited	140,282	--
Sinopac Capital International (HK) Limited	139,154	--
Bank of Kaohsiung, Cabang Perbankan Offshore, Taiwan	138,820	144,371
National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura	138,820	144,371
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor New York	127,650	132,754
Bank Sinopac, Cabang Perbankan Offshore, Taiwan	92,546	96,247
E.SUN Commercial Bank, Ltd., Taiwan	92,546	96,247
Eastspring Investments SICAV - FIS	92,546	96,247
Asia Pacific Dana Pinjaman, Singapura	92,546	96,247
KGI Bank, Taiwan	92,546	96,247
Taishin International Bank Co., Ltd., Cabang Singapura	92,546	96,247
Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan	92,546	96,247
NEC Capital Solution Limited	66,833	69,505
Far Eastern International Bank, Cabang Taiwan	63,825	66,377
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	59,021	--
Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd., Singapura	49,465	51,442
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura	43,401	45,137
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura	--	219,236
PT Bank Rabobank International Indonesia	--	132,755
Jumlah Utang Bank Berjangka	6,806,763	7,121,069
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(114,907)	(162,592)
Bagian Jangka Pendek	(376,064)	(372,831)
Bagian Jangka Panjang	6,315,792	6,585,646

b. Term Bank Loan

The detail of syndication bank loan based on lenders is as follows:

PT Bank BNP Paribas Indonesia	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hongkong Branch
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk
ING Bank N.V., Singapore Branch	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	Cathay United Bank, Singapore Branch
MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch	Citibank, N.A., Jakarta Branch
PT Bank BTPN Tbk	PT Bank Permata Tbk
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Singapore Branch	Standard Chartered Bank, Singapore Branch
Bank of China (Hongkong) Ltd., Jakarta Branch	Aozora Asia Pacific Finance Limited, Hongkong
Bank of China Limited, Singapore Branch	Yuanta Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Bank CTBC Indonesia
Hong Kong Mortgage Corporation Limited	Sinopac Capital International (HK) Limited
Bank of Kaohsiung, Offshore Banking Branch, Taiwan	National Bank of Kuwait S.A.K.P., Singapore Branch
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, New York Agency	Bank Sinopac, Offshore Banking Branch, Taiwan
E.SUN Commercial Bank, Ltd., Taiwan	Eastspring Investments SICAV - FIS
Asia Pacific Loan Fund, Singapore	KGI Bank, Taiwan
Taishin International Bank Co., Ltd., Singapore Branch	Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan
NEC Capital Solution Limited	Far Eastern International Bank, Taiwan Branch
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore
PT Bank Rabobank International Indonesia	
Total Term Bank Loan	Unamortized Transaction Costs
	Current Portion
	Non-Current Portion

Pinjaman Bank Sindikasi 2018

Pada bulan Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman USD sebesar USD297,000,000 yang diatur oleh BNP Paribas Cabang Singapura, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT CIMB Niaga Tbk, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan MUFG Bank Ltd. Cabang Jakarta (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd) (MUFG) (Arrangers) dan berupa fasilitas *Term Loan* dan *Revolving Loan IDR* sebesar Rp3.850.000 yang diatur oleh Arrangers.

Pada tanggal 18 Juni 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Bank Sindikasi dan menggunakan opsi *accordian* untuk meningkatkan Fasilitas Pinjaman sebesar USD20,000,000.

Fasilitas pinjaman USD dikenakan margin bunga di atas LIBOR sebesar 2,10%-2,25% per tahun berdasarkan jenis pihak pemberi pinjaman dan fasilitas pinjaman IDR dikenakan margin bunga di atas JIBOR sebesar 2,75% per tahun.

Pinjaman ini jatuh tempo pada bulan Februari 2023. Tujuan pinjaman ini terutama untuk melunasi (*refinancing*) seluruh sisa pinjaman bank sindikasi 2016 dan utang obligasi sebelumnya.

Pinjaman ini dijamin antara lain oleh:

- Pengalihan hak bersyarat atas *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perusahaan;
- Fidusia atas semua tower dan aset bergerak lainnya milik Perusahaan (Catatan 9);
- Fidusia atas tagihan milik perusahaan dari *Master Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement* (Catatan 4);
- Gadai atas rekening bank milik Perusahaan (Catatan 3); dan
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara telekomunikasi milik Perusahaan.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu, antara lain, *net debt to running EBITDA* dan *free cash flow to total debt costs*.

Selama periode fasilitas peminjaman, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk, antara lain:

- Membeli, membangun, mengakuisisi dan melakukan investasi pada unit bisnis, aset atau segala bentuk usaha milik pihak lain sepanjang kriteria tertentu tidak dipenuhi;

Syndicated Bank Loan 2018

On February 2018, the Company signed Loan Facilities Agreement of USD amounted to USD297,000,000 arranged by BNP Paribas Singapore Branch, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT CIMB Niaga Tbk, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and MUFG Bank Ltd. Jakarta Branch (formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd) (MUFG) (The Arrangers) and Loan Facility Agreement consists of Term Loan and Revolving Loan IDR Facilities amounted to Rp3,850,000 arranged by the Arrangers.

On June 18, 2018, the Company signed a Syndication Bank Agreement and exercised the *accordian* option to increase its term loan by USD20,000,000.

The USD loan facility bear interest margin above LIBOR of 2.10%-2.25% per annum based on the certain type of the lenders and the IDR loan facilities bear interest margin above JIBOR of 2.75% per annum.

The facilities have maturity date in February 2023. The purpose of the facilities is mainly to refinancing all outstanding syndicated bank loan 2016 and bond payable.

The loan is secured by, among others:

- Conditional assignment of rights on Master Lease Agreement and Land Lease Agreement;
- Fiduciary over the Company's insurance policies;
- Fiduciary over all towers and other moveable assets of the Company (Note 9);
- Fiduciary over all receivables of the Company in respect of Master Lease Agreement and Land Lease Agreement (Note 4);
- Pledge of current accounts of the Company (Note 3); and
- Mortgage deeds over the land registered under the Company's name on which the telecommunication towers located.

The Company is required to meet certain financial ratios, among others, *net debt to running EBITDA* and *free cash flow to total debt costs*.

During the loan facility period, without prior written consent from the lenders, the Company is restricted to, among others:

- Purchase, develop, acquire and invest in business unit, assets or in any type of business when certain criteria is not met;

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

- Menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perusahaan kepada pihak lain;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dan hak tagih piutang;
- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian aset Perusahaan dalam bentuk apapun; dan
- Melakukan perubahan kendali atas Perusahaan

Pembayaran pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp152.500 dan USD15,850,000 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp106.750 dan USD11,095,000.

Perusahaan memiliki saldo yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2020 atas fasilitas *Term Loan USD* sebesar USD286,885,000 dan fasilitas *Term Loan IDR* sebesar Rp2.760.250 dan *Revolving Loan* sebesar Rp450.000 dan pada tanggal 31 Desember 2019 atas fasilitas *Term Loan USD* sebesar USD302,735,000 dan fasilitas *Term Loan IDR* sebesar Rp2.912.750 dan *Revolving Loan* sebesar Rp300.000.

Pada tanggal 17 April 2020, PT Rabobank International Indonesia telah mentransfer pinjaman Perusahaan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC Hongkong).

Pada tanggal 18 September 2020, HSBC Hongkong telah mentransfer sebagian pinjaman Perusahaan kepada Sinopac Capital International (HK) Limited.

Pada tanggal 23 Oktober 2020 dan 17 November 2020 Australia and New Zealand Banking Group Limited telah mentransfer seluruh pinjaman Perusahaan kepada Sinopac Capital International (HK) Limited dan The Hongkong Mortgage Corporation Limited.

Pada tanggal 22 Maret 2021, Perusahaan melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman *Term Loan* sebesar Rp76.250 dan USD7,925,000.

Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, Perusahaan telah mencairkan dan membayar fasilitas *Revolving Loan* masing-masing sebesar Rp80.000 dan Rp300.000.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi kondisi dan persyaratan atas pinjaman bank sindikasi.

- *Pledge partially or whole author the Company's assets to other parties;*
- *Sell or transfer or otherwise dispose of any of the Company's assets and receivables on recourse term;*
- *Sell or transfer or rent out/submit the rights to use the Company's assets in any form; and*
- *Change the control of the Company.*

The payment of this loan for the year ended December 31, 2020 amounted to Rp152,500 and USD15,850,000 and December 31, 2019 amounted to Rp106,750 and USD11,095,000.

The Company has outstanding balance as of December 31, 2020 of Term Loan USD facility amounting to USD286,885,000 and Term Loan IDR amounting to Rp2,760,250 and Revolving Loan facilities amounting to Rp450,000 and as of December 31, 2019 of Term Loan USD facility amounting to USD302,735,000 and Term Loan IDR amounting to Rp2,912,750 and Revolving Loan facilities amounting to Rp300,000.

On April 17, 2020, PT Rabobank International Indonesia have transferred the Company's loan to The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC Hongkong).

On September 18, 2020, HSBC Limited have transferred a portion of the Company's loan to Sinopac Capital International (HK) Limited).

On October 23, 2020 and November 17, 2020, Australia and New Zealand Banking Group Limited have transferred all of the Company's loan to The Sinopac Capital International (HK) Limited) and The Hongkong Mortgage Corporation Limited.

On March 22, 2021, the Company made a partial payment of the Term Loan principal amounted to Rp76,250 and USD7,925,000.

Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the Company withdrawn and paid Revolving Loan facility amounted to Rp80,000 and Rp300,000, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company is in compliance with the term and condition of this syndicated bank loan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Amortisasi biaya transaksi yang dibebankan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp47.685 dan Rp44.650.

The amortized transaction costs charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp47,685 and Rp44,650, respectively.

Perusahaan mengadakan perjanjian-perjanjian lindung nilai dengan pihak ketiga atas risiko fluktuasi tingkat bunga dan selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi (Catatan 32.a).

The Company entered hedge contracts with third parties to hedge interest rate and foreign exchange fluctuation risk of the syndicated bank loan (Note 32.a).

Jika bagian pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya maka saldo pinjaman bank sindikasi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

If the portion of foreign currency loan is valued using its hedging rate the balance of syndicated bank loans as of December 31, 2020 and December 31, 2019 are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Jumlah Pinjaman	6,848,691	7,052,210	Total Loan
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(114,907)	(162,592)	Unamortized Transaction Costs
Dikurangi: Utang Sindikasi Bank Jangka Pendek	(376,064)	(372,831)	Less: Short-Term Syndicated Bank Loan
Bagian Jangka Panjang	6,357,720	6,516,787	Non-Current Portion

18. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

18. Long-Term Employee Benefits Liabilities

Imbalan Pascakerja – Program Imbalan Pasti Tanpa Pendanaan

Saldo provisi imbalan pascakerja Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia, yang laporannya masing-masing bertanggal 7 April 2021 dan 10 Maret 2020.

Post-Employment Benefits – Unfunded Defined Benefits Plan

The provision of post-employment benefits as of December 31, 2020 and 2019 were calculated by an independent actuary, PT Milliman Indonesia, with its report dated April 7, 2021 and March 10, 2020, respectively.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used to determine post-employment benefits expenses and obligation are as follows:

	2020	2019	
Usia Pensiun Normal	57 tahun/ years	57 tahun/ years	Normal Pension Age
Tingkat Diskonto (Per Tahun)	6.75% - 7.50%	7.75% - 8.00%	Discount Rate (Per Annum)
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji (Per Tahun)	6.5%	6.5%	Salary Increase Projection Rate (Per Annum)
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita/ 10% from mortality rate		Permanent Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	10% sampai dengan usia 25 tahun, kemudian menurun secara linear sampai dengan 0,5% pada saat usia 45 tahun/ 10% up to 25 years old, then proportionally decline to 0.5% at 45 years old		Resignation Rate
Tabel Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia 4 / Indonesia Mortality Table 4	Tabel Mortalita Indonesia 3 / Indonesia Mortality Table 3	Table of Mortality

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in the post-employment benefits liability in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas Awal Tahun	38,674	30,248	<i>Liabilities at Beginning of Year</i>
Beban Manfaat Karyawan Tahun Berjalan	12,182	9,325	<i>Current Year Employee Benefits Expense</i>
Pembayaran Imbalan Tahun Berjalan	(282)	(2,451)	<i>Current Year Actual Benefits Payments</i>
Keuntungan Aktuarial	4,204	1,552	<i>Actuarial Gain</i>
Liabilitas Akhir Tahun	54,778	38,674	<i>Liabilities at End of Year</i>

Rincian beban manfaat pascakerja karyawan yang diakui di tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses for the current year are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Jasa Kini	10,268	8,367	<i>Current Service Cost</i>
Beban Bunga	2,987	2,404	<i>Interest Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	(1,073)	(1,446)	<i>Past Service Cost</i>
Jumlah Beban Manfaat Kerja Karyawan	12,182	9,325	<i>Total Employee Benefits Expense</i>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang adalah sebagai berikut:

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of defined benefits obligation is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			<i>Present Value of Defined Benefits Liabilities</i>
Awal Tahun	38,674	30,248	<i>at Beginning of Year</i>
Beban Jasa Kini	10,268	8,367	<i>Current Service Cost</i>
Beban Bunga	2,987	2,404	<i>Interest Cost</i>
Pembayaran Imbalan	(282)	(2,451)	<i>Benefits Payment</i>
Biaya Jasa Lalu	(1,073)	(1,446)	<i>Past Service Cost</i>
Pengukuran Kembali:			<i>Remeasurements:</i>
Keuntungan aktuarial dari			<i>Actuarial Gain from Change in</i>
Perubahan Asumsi Keuangan	5,311	2,059	<i>Financial Assumptions</i>
Kerugian aktuarial dari			<i>Actuarial Loss from Change in</i>
Penyesuaian Pengalaman	(1,054)	(507)	<i>Experience Adjustments</i>
Kerugian aktuarial dari			<i>Actuarial Loss from Change in</i>
Perubahan Asumsi Demografis	(53)	--	<i>Demographic Assumptions</i>
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Akhir Tahun	54,778	38,674	<i>Present Value of Defined Benefits Liabilities at End of Year</i>

Akumulasi keuntungan aktuarial atas program imbalan pasti yang dicatat di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The accumulated of actuarial gain of defined benefits plan which is recorded in other comprehensive income is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	7,584	9,086	<i>Beginning Balance</i>
Keuntungan Aktuarial	(4,204)	(1,552)	<i>Actuarial Gain</i>
Pajak Penghasilan Terkait	157	50	<i>Related Income Tax</i>
Akumulasi Program Imbalan Pasti yang Diakui di Penghasilan Komprehensif Lainnya	3,537	7,584	<i>Accumulated Defined Benefits Plan which is Recognized in Other Comprehensive Income</i>

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefits pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi Pemerintah berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefits plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields. A decrease in the bond interest rate will increase the plan liabilities.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan.

Salary Risk

The present value of the defined benefits plan liabilities is calculated by reference to the future salaries of plan participants.

Analisis Sensitivitas

Peningkatan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2020, akan berakibat pada penurunan liabilitas imbalan pasti sebesar Rp5.368.

Sensitivity analysis

Increasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2020, will impact to the decrease of defined benefits plan obligation amounted to Rp5,368.

Penurunan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2020, akan berakibat pada peningkatan liabilitas imbalan pasti sebesar Rp6.202.

Decreasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2020, will impact to the increase of defined benefits plan obligation amounted to Rp6,202.

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik 1% dari yang diasumsikan pada 31 Desember 2020, liabilitas imbalan pascakerja naik sebesar Rp6.983.

If the expected salary growth increase 1% of that assumed on December 31, 2020, post-employment benefits liabilities will increase Rp6,983.

Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan turun 1% dari yang diasumsikan pada 31 Desember 2020, liabilitas imbalan pascakerja turun sebesar Rp6.105.

If the expected salary growth decrease 1% of that assumed on December 31, 2020, post-employment benefits liabilities will decrease Rp6,105.

19. Modal Saham

19. Share Capital

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders on December 31, 2020 and 2019 is as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah/ Total Rp
PT Kharisma Indah Ekaprima	491,384,554	43.20	49,138
Cahaya Anugerah Nusantara Holdings Ltd	290,228,868	25.51	29,023
Juliawati Gunawan (Direktur / Director)	359,596	0.03	36
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) / Public (below 5% each)	355,606,680	31.26	35,561
Jumlah / Total	1,137,579,698	100.00	113,758

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

20. Tambahan Modal Disetor – Bersih

20. Additional Paid-in Capital – Net

	2020 Rp	2019 Rp	
Agio Nilai Nominal Saham	3,589,495	3,589,495	Premium of Par Value of Shares
Selisih Aset dan Liabilitas			Difference from Tax Amnesty
Pengampunan Pajak	276	276	Assets and Liabilities
Jumlah	3,589,771	3,589,771	Total

Agio Nilai Nominal Saham

Akun ini merupakan agio atas nilai nominal saham dari Penawaran Umum Saham Perdana, Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Terbatas II Perusahaan setelah dikurangi biaya emisi saham, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Premium of Par Value of Shares

This account represents premium of par value of shares issued pursuant to the Company's Initial Public Offering (IPO), Limited Public Offering I and Limited Public Offering II after deducting the share issuance costs as of December 31, 2020 and 2019, as follows:

	Rp	
Hasil Penawaran Umum Saham Perdana		Initial Public Offering
Agio Saham	330,000	Premium
Biaya Emisi	(9,476)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	320,524	Subtotal
Hasil Penawaran Umum Saham Terbatas I		Limited Public Offering I
Agio Saham	634,500	Premium
Biaya Emisi	(3,905)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	630,595	Subtotal
Hasil Penawaran Umum Saham Terbatas II		Limited Public Offering II
Agio Saham	2,367,839	Premium
Biaya Emisi	(8,639)	Shares Issuance Costs
Subjumlah	2,359,200	Subtotal
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I		Exercise of Warrant Serie I
Agio Saham	279,176	Premium
Bersih	3,589,495	Net

Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, PT Rekajasa Akses, entitas anak, mengikuti pengampunan pajak ini dan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET17578/PP/WPJ.30/2016 dari Kantor Wilayah Dewan Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Selisih antara aset dan kewajiban atas pengampunan pajak dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor.

Tax Amnesty

In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty PT Rekajasa Akses, a subsidiary, participated this tax amnesty and received Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET17578/PP/WPJ.30/2016 from Kantor Wilayah Dewan Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Difference from tax amnesty assets and liabilities recorded as a part of additional paid-in capital.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

21. Penghasilan Komprehensif Lainnya

21. Other Comprehensive Income

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas Perusahaan dan entitas anak yang terdiri dari:

This account represents differences arising from transactions resulting in changes in equity of the Company and its subsidiaries which consist of:

	2020 Rp	2019 Rp	
Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang (Catatan 9)	298,457	229,399	Net Increase in Revaluation of Towers and Supporting Equipment (Note 9)
Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	15,462	15,016	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Currencies
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti (Catatan 18)	3,289	7,584	Remeasurement of Defined Benefits Plan (Note 18)
Lindung Nilai Arus Kas (Catatan 12)	(595,377)	(499,199)	Cash Flow Hedge (Note 12)
Jumlah	(278,169)	(247,200)	Total

Kenaikan Bersih Atas Revaluasi Menara

Net Increase in Revaluation of Tower

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal Tahun	229,399	333,932	Beginning Balance
Kenaikan (Penurunan) Revaluasi Menara dan Sarana Penunjang	64,168	(96,249)	Revaluation Increase (Decrease) of Towers and Supporting Equipment
Reklasifikasi Surplus Revaluasi ke Saldo Laba	4,890	(8,284)	Reclassification Revaluation Reserve to Retained Earnings
Saldo Akhir Tahun	298,457	229,399	Ending Balance

22. Pendapatan

22. Revenues

Akun ini merupakan pendapatan atas sewa menara telekomunikasi dan lain-lain sebagai berikut:

This account represents revenues from lease of telecommunication towers and others as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 29)			Related Party (Note 29)
PT Sekawan Abadi Prima	170	204	PT Sekawan Abadi Prima
Pihak Ketiga			Third Parties
PT XL Axiata Tbk	640,926	648,207	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	402,145	379,401	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular	345,894	350,227	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	220,626	136,568	PT Indosat Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	176,363	124,609	PT Smartfren Telecom Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	136,027	127,834	Others (below Rp50,000 each)
Subjumlah	1,921,981	1,766,846	Subtotal
Jumlah Pendapatan	1,922,151	1,767,050	Total Revenues

Pelanggan dengan nilai pendapatan di atas 10% dari pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah PT XL Axiata Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia, PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah PT XL Axiata Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia dan PT Telekomunikasi Selular.

Customers with sales above 10% of revenues for the year ended December 31, 2020 are PT XL Axiata Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia, PT Telekomunikasi Selular and PT Indosat Tbk, and for the year ended December 31, 2019 are PT XL Axiata Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia and PT Telekomunikasi Selular.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

23. Beban Pokok Pendapatan

23. Cost of Revenues

	2020 Rp	2019 Rp	
Penyusutan dan Amortisasi:			Depreciation and Amortization:
Penyusutan			Depreciation of Property
Aset Tetap (Catatan 9)	219,386	152,637	and Equipment (Note 9)
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 10)	199,543	--	Depreciation of Right of Use Assets (Note 10)
Hak Penggunaan Kapasitas Jaringan			Right to Use Intercity Network Capacity
dan Kabel Laut Serat Optik	7,000	7,000	and Fiber Optic Sea Cables
Perizinan	6,277	6,882	Permit
Sewa Lahan	--	189,244	Land Lease
Lain-lain	13,886	12,404	Others
Subjumlah	446,092	368,167	Subtotal
Beban Pokok Pendapatan Lainnya:			Other Cost of Revenues:
Pemeliharaan dan Perbaikan	65,530	64,007	Repair and Maintenance
Jasa Keamanan dan Lain-lain	71,071	59,926	Security Services and Others
Subjumlah	136,601	123,933	Subtotal
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	582,693	492,100	Total Cost of Revenues

Tidak terdapat pembelian kepada pemasok di atas 10% dari pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

There are no purchases to suppliers above 10% of revenues for the years ended December 31, 2020 and 2019.

24. Beban Usaha

24. Operating Expenses

	2020 Rp	2019 Rp	
Penyusutan dan Amortisasi:			Depreciation and Amortization:
Amortisasi Beban Kantor dan Asuransi	10,486	17,256	Amortization of Office Expense and Insurance
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 10)	6,501	--	Depreciation of Right of Use Assets (Note 10)
Penyusutan			Depreciation of Property
Aset Tetap (Catatan 9)	4,831	4,093	and Equipment (Note 9)
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 11)	3,196	2,677	Amortization of Intangible Assets (Catatan 11)
Subjumlah	25,014	24,026	Subtotal
Beban Usaha Lainnya:			Other Operating Expenses:
Gaji dan Tunjangan	145,485	124,059	Salaries and Allowances
Imbalan Pascakerja (Catatan 18)	12,182	9,325	Post-employment Benefits (Note 18)
Perjalanan dan Akomodasi	8,552	11,018	Travel and Accommodation
Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya	8,153	8,170	Office Supplies and Other Expenses
Jasa Profesional	5,414	6,115	Professional Fee
Pemasaran	3,495	6,390	Marketing
Subjumlah	183,281	165,077	Subtotal
Jumlah Beban Usaha	208,295	189,103	Total Operating Expenses

25. Penghasilan Bunga dan Beban Keuangan

25. Interest Income and Financial Charges

a. Penghasilan Bunga

a. Interest Income

Penghasilan bunga merupakan pendapatan atas bunga bank.

Interest income is income from bank interest.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

b. Beban Keuangan

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Bunga:		
Pinjaman Bank Sindikasi	(396,661)	(523,919)
Liabilitas Sewa	(29,933)	--
Subjumlah	(426,594)	(523,919)
Beban Keuangan Lainnya:		
Biaya Lindung Nilai	(328,445)	(280,175)
Amortisasi Beban Keuangan (Catatan 17)	(47,685)	(44,650)
Lainnya	(5,032)	(7,141)
Subjumlah	(381,162)	(331,966)
Jumlah Beban Keuangan	(807,756)	(855,885)

b. Financial Charges

Interest Expense:
Syndicated Bank Loan
Lease Liability
Subtotal
Other Financial Charges:
Hedging Cost
Amortization of Financial Charges (Note 17)
Others
Subtotal
Total Financial Charges

26. Beban Lain-lain - Neto

	2020 Rp	2019 Rp
Penghasilan (Beban) lain-lain:		
Keuntungan (Kerugian)		
Selisih Kurs - Neto	16,742	(1,676)
Kerugian atas		
Pelepasan Aset Tetap (Catatan 9)	(34,621)	(164,094)
Beban Pajak	(42,818)	(10,145)
Penurunan Nilai Persediaan (Catatan 7)	(16,732)	--
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 11)	(6,598)	(6,598)
Beban Penalti	(3,544)	(5,260)
Penurunan Nilai Piutang Usaha -		
Neto (Catatan 4)	(407)	(759)
Lain-lain - Neto	(7,229)	(13,061)
Jumlah Beban Lain-lain - Neto	(95,207)	(201,593)

Other Income (Expense):
Gain (Loss) on
Foreign Exchange Difference - Net
Loss on disposal
of Property and Equipment (Note 9)
Tax Expense
Impairment Loss Inventory (Note 7)
Amortization of Intangible Assets (Catatan 11)
Penalty Expenses
Impairment Loss Trade Receivable -
Net (Note 4)
Others - Net
Total Other Expenses - Net

27. Perpajakan

27. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2020 Rp	2019 Rp
Pajak Penghasilan		
Pasal 28A		
<u>Perusahaan</u>		
Tahun 2020	21,934	--
Tahun 2019	26,350	26,350
Tahun 2018	--	24,837
<u>Entitas Anak</u>		
Tahun 2020	3,236	--
Tahun 2019	4,912	4,912
Tahun 2018	--	4,921
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih		
Perusahaan	--	57,097
Entitas Anak	71,608	63,401
Klaim Restitusi Pajak	112,078	82,655
Jumlah Pajak Dibayar di Muka	240,118	264,173

Income Tax
Article 28A
<u>the Company</u>
Year 2020
Year 2019
Year 2018
<u>Subsidiaries</u>
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Value Added Tax - Net
The Company
Subsidiaries
Claim For Tax Refund
Total Prepaid Taxes

Tahun Pajak 2019

Perusahaan

Pada bulan November 2020, Perusahaan telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk Pajak Penghasilan (PPH) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima Perusahaan.

Entitas-entitas Anak

Pada bulan Oktober 2020, PT Sarana Inti Persada (SIP), entitas anak, telah menerima surat perintah pemeriksaan untuk PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2). Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil pemeriksaan belum diterima SIP.

Tahun Pajak 2018

Perusahaan

Pada bulan Juli 2020, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 (2) serta Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan sebesar Rp24.837 dan telah menerima pengembalian.

Entitas-entitas Anak

Pada bulan Oktober 2020, BIT telah menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN atas PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 (2) serta SKPLB PPh Badan sebesar Rp3.479 dan telah menerima pengembalian.

Pada bulan Juni 2020, SIP telah menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN atas PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 (2) serta SKPLB PPh Badan sebesar Rp774 dan atas sisanya SIP mengajukan keberatan pada bulan Agustus 2020. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil keberatan belum diterima SIP.

Pada bulan September 2020, REJA telah menerima hasil pemeriksaan berupa SKPLB untuk PPh Badan sebesar Rp198 dan SKPKB untuk PPh 21 sebesar Rp1, PPh 4 (2) sebesar Rp111 dan PPN sebesar Rp148. Atas sisa SKPLB dan SKPKB, REJA mengajukan keberatan pada bulan Desember 2020. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil keberatan belum diterima REJA.

Fiscal Year 2019

The Company

On November 2020, the Company received the tax assessment letter of Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Income Tax article 21, Income Tax article 23, Income Tax article 26 and Income Tax article 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of assessment is not yet received by the Company.

Subsidiaries

On October 2020, PT Sarana Inti Persada (SIP), a subsidiary, received the tax assessment letter of Corporate Income Tax, VAT, Income Tax article 21, Income Tax article 23 and Income Tax article 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of assessment is not yet received by SIP.

Fiscal Year 2018

The Company

On July 2020, the Company received the result of tax assessment in form of Nil Tax Assessment (SKPN) for VAT, Income Tax article 21, Income Tax article 23, Income Tax article 26 and Income Tax article 4 (2) and Tax Overpayment Assessment (SKPLB) for Corporate Income Tax amounting to Rp24,837 and have received the refund.

Subsidiaries

On October 2020, BIT received the result of tax assessment in form of SKPN VAT, Income Tax article 21, Income Tax article 23, Income Tax article 26 and Income Tax article 4 (2) and SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp3,479 and have received the refund.

On June 2020, SIP received the result of tax assessment in form SKPN VAT, Income Tax article 21, Income Tax article 23, Income Tax article 26 and Income Tax article 4 (2) and SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp774 and for the difference SIP have filled tax objection on August 2020. Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of objection is not yet received by SIP.

On September 2020, REJA received the result of tax assessment in form SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp198 and SKPKB for Income Tax article 21 amounting to Rp1, Income Tax article 4 (2) amounting to Rp111 and VAT amounting to Rp148. For the difference of SKPLB and SKPKB, REJA have filled tax objection on December 2020. Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of objection is not yet received by REJA.

Tahun Pajak 2017

Perusahaan

Pada bulan April 2019, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh pasal 4 (2) dan PPN, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 sebesar Rp9.951, serta SKPLB untuk PPh Badan sebesar Rp22.767 dan telah menerima pengembalian. Pada bulan Juni 2019, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dan hasilnya ditolak pada bulan Mei 2020. Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan telah mengajukan banding atas SKPKB tersebut. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil banding belum diterima Perusahaan.

Entitas-entitas Anak

Pada bulan Agustus 2019, BIT telah menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN atas PPh Pasal 26 dan PPN, SKPKB atas PPh Pasal 21 sebesar Rp1, PPh Pasal 23 sebesar Rp1 dan PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp8, serta SKPLB untuk PPh Badan sebesar Rp2.201 dan telah menerima pengembalian.

Pada bulan April 2019, SIP telah menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPN, serta SKPLB untuk PPh Badan sebesar Rp1.234 dan telah menerima pengembalian.

Pada bulan Agustus 2019, REJA menerima hasil pemeriksaan berupa SKPN atas PPh Pasal 4 (2) dan PPN, SKPKB atas PPh Pasal 21 sebesar Rp1 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp19, serta SKPLB untuk PPh Badan sebesar Rp781 dan telah menerima pengembalian.

Tahun Pajak 2016

Perusahaan

Pada bulan Agustus 2018, Perusahaan menerima hasil atas pemeriksaan pajak tahun 2016 berupa SKPLB PPh Badan sebesar Rp21.431 dan sisanya sebesar Rp24 dicatat sebagai beban pajak. Perusahaan telah menerima pengembalian PPh Badan 2016 sebesar Rp16.788, setelah dipotong dengan Surat Taghan Paksa (STP) atas denda Pasal 74 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebesar Rp4.594 dan sebagian SKPKB PPN Desember 2016 yang disetujui sebesar Rp49, dengan jumlah pemotongan sebesar Rp4.643 dan pada bulan November 2018, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas pemotongan tersebut. Perusahaan juga menerima SKPKB atas PPN Desember 2016 sebesar Rp50.538 (termasuk denda Rp27.566) dan SKPKB atas PPh 26 Desember 2016 sebesar Rp67.214 (termasuk denda

Fiscal Year 2017

The Company

On April 2019, the Company received the result of tax assessment in form of Nil Tax Assessment (SKPN) for Income Tax article 21, Income Tax article 23, Income Tax article 4 (2) and VAT, Tax Underpayment Assessment (SKPKB) for Income Tax art 26 amounting to Rp9,951, and SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp22,767 and have received the refund. On June 2019, the Company has filed the objection of this SKPKB and the result was rejected. On August 2020, the Company has filed the appeal of this objection. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of appeal is not yet received by the Company.

Subsidiaries

On August 2019, BIT received the result of tax assessment in form of SKPN for Income Tax art 26 and VAT, SKPKB for Income Tax article 21 amounting to Rp1, Income Tax article 23 amounting to Rp1 and Income Tax article 4 (2) amounting to Rp8, and SKPLB for Corporate Income Tax has amounting to Rp2,201 and have received the refund.

On April 2019, SIP received the result of tax assessment in form of SKPN for Income Tax article 21, Income Tax article 23, Income Tax article 4(2) and VAT, and SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp1,234 and has received the refund.

On August 2019, REJA received the result of tax assessment in form of SKPN for Income Tax article 4 (2) and VAT, SKPKB for Income Tax article 21 amounting to Rp1, Income Tax article 23 amounting to Rp19, and SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp781 and has received the refund.

Fiscal Year 2016

The Company

On August 2018, the Company received the result of tax assessment fiscal year 2016 in form of SKPLB for Corporate Income Tax amounting to Rp21,431 and the difference Rp24 recorded as tax expense. The Company has received tax refund amounting to Rp16,788, after deducted by Tax Collection Notice (STP) on tax penalty art 74 Law on General Tax Provisions and Procedures (UU KUP) amounting to Rp4,594 and partially approved SKPKB VAT December 2016 amounting to Rp49, with total deduction amounting to Rp4,643 and on November 2018, the Company has filed the objection of this deduction. The Company also received SKPKB for VAT for December 2016 amounting to Rp50,538 (including penalty of Rp27,566) and SKPKB of Income Tax article 26 amounting to Rp67,214 (including penalty of Rp19,204). The Company has

Rp19.204). Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk SKPKB PPN sebesar Rp45.895 dan pada bulan November 2018 Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 26 dan SKPKB PPN. Pada bulan November 2019, hasil keberatan menyatakan ditolak dan pada bulan Februari 2020, Perusahaan telah mengajukan banding atas hasil keberatan tersebut. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil banding belum diterima Perusahaan.

Tahun Pajak 2015

Perusahaan

Pada bulan Oktober 2019, Perusahaan menerima hasil pemeriksaan pajak tahun 2015 berupa SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp101.635 (termasuk denda Rp32.962). Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp37.972 dan pada bulan Januari 2020 Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 26 (Catatan 36).

Tahun Pajak 2014

Entitas-entitas Anak

Pada bulan Januari 2019, BIT menerima SKPKB untuk PPN Tahun Pajak 2014 sebesar Rp2.158 dan dilunasi pada bulan Februari 2019. Pada bulan Maret 2020 BIT menerima hasil keberatan yang mengembalikan sebagian Rp313 dan atas sisanya BIT mengajukan banding pada bulan Juni 2020. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, hasil banding belum diterima BIT.

Tahun Pajak 2013

Entitas-entitas Anak

Pada bulan Maret 2018, BIT menerima SKPKB untuk PPN tahun pajak 2013 sebesar Rp7.241 dan STP sebesar Rp138. Pada bulan Mei 2018, BIT telah melakukan pembayaran dan dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB dan STP. Pada bulan Mei 2019, BIT menerima hasil keberatan yang mengembalikan sebagian Rp3.715 dan atas sisanya BIT telah mengajukan banding. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil banding belum diterima BIT.

Tahun Pajak 2012

Perusahaan

Pada bulan Juni 2014, Perusahaan menerima hasil pemeriksaan pajak berupa SKPKB atas PPh Badan sebesar Rp1.369. Pada bulan Agustus 2015, Perusahaan menerima SKPKB atas PPh Badan dan hasilnya menolak pengajuan keberatan dan menambahkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp24.460. Atas surat keputusan tersebut, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp23.091 dan telah mengajukan

paid SKPKB VAT amounting to Rp45,895 and on November 2018 the Company has filed an objection of SKPKB Income Tax article 26 and SKPKB VAT. On November 2019, the result of objection was rejected and the Company has filled the appeal of this objection on February 2020. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of appeal is not yet received by the Company.

Fiscal Year 2015

The Company

On October 2019, the Company received the result of tax assessment fiscal year 2015 in form of SKPKB for Income Tax article 26 amounting to Rp101,635 (including penalty of Rp32,962). The Company has paid SKPKB Income Tax art 26 amounting to Rp37,972 and on January 2020, the Company has filled an objection of SKPKB Income Tax article 26 (Note 36).

Fiscal Year 2014

Subsidiaries

On January 2019, BIT received SKPKB VAT Fiscal Year 2014 amounting to Rp2,158 and paid on February 2019. On March 2020, BIT received the result of objection to partially refund Rp313 and for the difference BIT have filled tax appeal on June 2020. Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of appeal is not yet received by BIT.

Fiscal Year 2013

Subsidiaries

On March 2018, BIT received SKPKB VAT fiscal year 2013 amounting to Rp7,241 and STP amounting to Rp138. On May 2018, BIT has paid and in the process of an objection of SKPKB and STP. On May 2019, BIT received the result of objection to partially refund Rp3,715 and for the difference BIT had filed tax appeal. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of appeal is not yet received by BIT.

Fiscal Year 2012

The Company

In June 2014, the Company received tax assessment result in form SKPKB for Corporate Income Tax amounting to Rp1.369. In August 2015, the Company received the decision letter for the objection filed on SKPKB for Corporate Income Tax that rejected the objection and added underpayment tax amounting to Rp24,460. For this decision letter, the Company has paid amounting to Rp23,091 and has filled the appeal to tax court in November 2015. On December 2018,

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

permohonan banding ke pengadilan pajak pada bulan November 2015. Pada bulan Desember 2018, Perusahaan telah menerima putusan banding tersebut yang mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp12.352 pada bulan Februari 2019 dan sisanya menjadi beban pajak. Pada bulan Juni 2019, Perusahaan menerima STP atas denda penagihan karena hasil banding yang hanya menerima sebagian. Atas STP tersebut Perusahaan mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan yang Tidak Benar sesuai Pasal 36 ayat 1 huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Pada bulan Desember 2019, Perusahaan telah menerima hasil yang menyatakan ditolak dan mengajukan gugatan atas hasil tersebut pada bulan Desember 2019. Pada bulan Desember 2020, hasil gugatan menyatakan ditolak dan Perusahaan membukukannya di laba rugi.

the Company received appeal decision that refund tax overpayment amounting to Rp12,352 on Februari 2019 and the difference recorded as tax expense. In June 2019, the Company received STP for collection penalties due to the partial receipt of the appeal. Upon STP, the Company submitted an Application for Improper Reduction or Cancellation in accordance with Article 36 paragraph 1 letter c of the Law on General Tax Provisions and Procedures. In December 2019, the Company received the results was rejected and filed a lawsuit against these results in December 2019. On December 2020, the result of lawsuit was rejected and the Company recorded in profit or loss.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2020 Rp	2019 Rp	
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pasal 4 (2)	1,352	729	Article 4 (2)
Pasal 21	3,327	1,607	Article 21
Pasal 23	127	79	Article 23
Pasal 26	2,618	4,173	Article 26
<u>Entitas Anak</u>	1,715	1,203	<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih			Value Added Tax - Net
Perusahaan	43,682	--	The Company
Jumlah Utang Pajak	52,821	7,791	Total Taxes Payable

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expenses

	2020			2019			
	Perusahaan / the Company Rp	Entitas Anak / Subsidiaries Rp	Konsolidasian / Consolidated Rp	Perusahaan / the Company Rp	Entitas Anak / Subsidiaries Rp	Konsolidasian / Consolidated Rp	
Beban Pajak Kini	--	--	--	--	(1,675)	(1,675)	Current Tax Expense
Beban Pajak Koreksi							Tax Expense of Previous
Tahun Lalu	(10,738)	(103)	(10,841)	(12,107)	(55)	(12,162)	Year Correction
Beban Pajak Tangguhan	(10)	1,048	1,038	8	340	348	Deferred Tax Expenses
Jumlah Beban Pajak	(10,748)	945	(9,803)	(12,099)	(1,390)	(13,489)	Total Tax Expense

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan estimasi rugi fiskal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Current Tax

The reconciliation between profit before tax, as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income to the estimated tax loss for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba Sebelum Pajak Menurut			Profit before Tax as Presented in
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan			the Consolidated Statements of Profit
Komprehensif Lain Konsolidasian	718,686	241,870	or Loss and Other Comprehensive Income
Dikurangi: Rugi Entitas Anak	(49,309)	(52,633)	Deduct: Profit of Subsidiaries
Laba Komersial Perusahaan	767,995	294,503	Commercial Profit of the Company

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Perbedaan Waktu			Timing Differences:
Depresiasi	(707,793)	(894,949)	Depreciation
Beban Imbalan Kerja	7,042	2,374	Employee Benefits
Sewa	15,871	--	Allowance for Impairment Loss
Cadangan Piutang	796	--	Allowance of Trade Receivables
Subjumlah	(684,084)	(892,575)	Subtotal
Beda Tetap:			Permanent Differences:
Pendapatan yang Telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	(178,345)	(34,368)	Income Subjected to Final Tax
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	3,461	3,919	Salaries and Employee Benefits
Lain-lain	(314,438)	(77,105)	Others
Subjumlah	(489,322)	(107,554)	Subtotal
Estimasi Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(405,411)	(705,626)	Estimated Tax Loss for the Year
Taksiran Pajak Kini - Perusahaan	--	--	Estimated Current Tax - the Company
Dikurangi:			Less:
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka - Pasal 23	21,934	26,350	Prepaid Income Tax - Article 23
Taksiran Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar	21,934	26,350	Estimated Corporate Income Tax Overpayment

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2019 ke Kantor Pelayanan Pajak. Tidak terdapat selisih antara perhitungan Pajak Penghasilan Badan 2019 yang tercatat dan yang dilaporkan dalam SPT tahun 2019.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has reported its Annual Tax Return (SPT) year 2019 to the tax office. There are no differences between the calculation of Corporate Income Tax 2019 recorded and reported in SPT year 2019.

Perhitungan rugi fiskal hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPH Badan.

The calculation of taxable loss above will be the basis in filling Annual Tax Return of Corporate Income Tax.

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax benefit (expense) with the result of profit before tax with tax rate is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba Sebelum Pajak Sesuai Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	718,686	241,870	Profit before Tax as Presented in Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Dikurangi: Rugi Entitas Anak	(49,309)	(52,633)	Deduct: Loss of Subsidiaries
Laba Komersial Perusahaan	767,995	294,503	Commercial Profit of the Company
Pajak Penghasilan Dihitung dengan Tarif Efektif Pengaruh Pajak atas Koreksi Fiskal	168,959	73,626	Income Tax Expense at Effective Tax Rate
Pajak Kini	--	--	Tax Effect of Tax Adjustments
Pajak Tangguhan	(10)	8	Current Tax
Beban Pajak Koreksi Tahun Lalu	(10,738)	(12,107)	Deferred Tax
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Perusahaan	(10,748)	(12,099)	Tax Expense of Previous Correction
Beban Pajak Penghasilan - Entitas Anak:			Income Tax Benefit (Expense) - the Company
Pajak Kini dan Koreksi Tahun Lalu	(103)	(1,730)	Income Tax Expense - Subsidiaries:
Pajak Tangguhan - Tahun Berjalan	1,048	340	Tax Expense of Previous Year Correction
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Konsolidasian	(9,803)	(13,489)	Deferred Tax - Current Year
			Consolidated Income Tax Benefit (Expense)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

d. Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax

The deferred tax assets as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (Expense) to Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Asset
Perusahaan					The Company
Imbalan Pascakerja	41	(10)	6	37	Post-Employment Benefits
Entitas Anak - Bersih	1,104	1,048	151	2,303	Subsidiaries - Net
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	1,145	1,038	157	2,340	Deferred Tax Asset - Net
	31 Desember/ December 31, 2018	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (Expense) to Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Asset
Perusahaan					The Company
Imbalan Pascakerja	32	8	1	41	Post-Employment Benefits
Entitas Anak - Bersih	715	340	49	1,104	Subsidiaries - Net
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	747	348	50	1,145	Deferred Tax Asset - Net

28. Laba Per Saham

28. Earnings Per Share

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	706,991	228,382	Income Attributable to Owners of the Company
Rata-rata Tertimbang Saham Beredar (Lembar)	1,137,579,698	1,137,579,698	Weighted Average of Outstanding Shares (Shares)
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	621	201	Basic Earnings per Share (Full Rupiah)

29. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

29. Balances and Transactions with Related Parties

Grup dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

In its normal activities, the Group has transactions with related parties with details as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Asset and Liabilities	
	Rp	Rp	2020 %	2019 %
Piutang Usaha / Trade Receivables (Catatan / Note 4)				
PT Sekawan Abadi Prima	--	19	0.00	0.00
Utang Usaha / Trade Payables (Catatan / Note 13)				
PT Sekawan Abadi Prima	29	2,548	0.00	0.03

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp	Persentase terhadap Jumlah Beban yang Bersangkutan dan Penghasilan Komprehensif Lain/ Percentage to Respective Total Expense and Other Comprehensive Income	
			2020 %	2019 %
Pendapatan / Revenue (Catatan / Note 22)				
PT Sekawan Abadi Prima	170	204	0.00	0.00
Beban Imbalan Kerja / Employee Benefits Expense				
Komisaris dan Direksi / Commissioners and Directors				
Imbalan Jangka Pendek - Komisaris / Short-Term Benefits - Commissioners	1,728	1,575	1.19	1.27
Imbalan Jangka Pendek - Direksi / Short-Term Benefits - Directors	18,348	17,029	12.61	13.73
Imbalan Kerja Jangka Panjang / Long-Term Employment Benefits	1,739	1,339	1.20	1.08
Jumlah / Total	21,815	19,943	14.99	16.08

Hubungan dan sifat saldo akun atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The relationship and nature of account or transactions with related parties are as follows:

No.	Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan dengan Perusahaan/ Relationship	Transaksi/ Transaction
1.	PT Sekawan Abadi Prima	Di bawah Pengendalian Bersama/ Under the Same Control	Piutang Usaha, Utang Usaha dan Pendapatan / Trade Receivables, Trade Payables and Revenue
2.	Komisaris dan Direksi/ Commissioners and Directors	Manajemen Kunci/ Key Management	Beban Imbalan Kerja / Employee Benefits Expenses

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

All transactions with related parties have been disclosed in the consolidated financial statements.

**30. Instrumen Keuangan
Manajemen Risiko Keuangan**

**30. Financial Instruments
Financial Risks Management**

a. Faktor-faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko-risiko keuangan dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.

a. Factor and Policies of Financial Risk Management

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to financial risks and defines those risks as follows:

- Credit risk: the possibility that a customer will not pay all or a portion of a receivable or will not pay in a timely manner and therefore will cause a loss to the Group.

- Risiko likuiditas: Grup menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar terdiri dari:
 - (i) Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
 - (ii) Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.
 - (iii) Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Grup memiliki beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini antara lain, adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko fluktuasi tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin *offsetting* alami antara penjualan dan biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Grup memiliki instrumen derivatif berupa kontrak swap dalam opsi tingkat bunga dan selisih kurs untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

- *Liquidity risk: the Group defines collectibility risk of trade receivables as mentioned above, therefore, will have a difficulty in paying its obligations related to its financial liabilities.*
- *Market risk consist of:*
 - (i) *Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.*
 - (ii) *Interest rate risk is the risk of fluctuations in the fair value of financial instruments that caused the changes in market interest rates.*
 - (iii) *Price risk is risk of fluctuation in the value of financial instruments as a result of changes in market price.*

In order to manage those risks effectively, the Group has certain strategies of financial risks management, which are in line with the corporate objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks exposed by the Group.

The major guidelines of this policy are as follows:

- *Minimize fluctuation risk of interest rate, currency and market risk for all type of transactions.*
- *Maximize the use of favorable the "natural hedge" as much as possible which allowed natural off-setting between revenue and costs and payables/loans and receivables denominated in the same currency. Similar strategy is also applied to interest rate risk.*
- *All financial risk management activities are carried out and monitored.*
- *All risk management activities are conducted wisely and consistently and follow the best market practice.*

At the date of statement of financial position the Group has cross currency and interest rate swap and option contracts to anticipate possible risks that may occur.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers, clients or counterparties that fail to meet their contractual obligations. The Group's financial instruments that have the potential credit risk consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, other current financial assets and other non-current financial assets.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah eksposur risiko kredit maksimum aset keuangan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Total maximum credit risk exposure of financial assets on December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020		2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure Rp	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan Bank	237,176	237,176	361,534	361,534	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha	614,221	614,221	611,786	611,786	Trade Receivables
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	217,741	217,741	209,232	209,232	Accrued Income
Piutang Lain-lain	5,797	5,797	11,887	11,887	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	3,464	3,464	3,531	3,531	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,078,399	1,078,399	1,197,970	1,197,970	Total

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

The Group manages credit risk by setting limits on the amount of risk that is acceptable to each customer and to be more selective in choosing banks and financial institutions, only reputable and well-known banks and financial institutions are chosen.

Tabel berikut menganalisis aset yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan yang belum tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta aset keuangan yang ditentukan secara individu dan kolektif mengalami penurunan nilai:

The following tables analyze assets that have matured but not impaired and are not yet due and not impaired as well as financial assets that are individually and collective determined to be impaired:

	2020						
	Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak Mengalami Penurunan Nilai / <i>Overdue But not Impaired</i>			Belum Jatuh Tempo dan tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Not Yet Due and Not Impaired</i>	Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	0 - 30	31 - 90	> 90				
	hari / <i>days</i>	hari / <i>days</i>	hari / <i>days</i>				
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan							<i>Financial Assets</i>
Kas dan Bank	--	--	--	237,176	--	237,176	<i>Cash on Hand and in Banks</i>
Piutang Usaha	12,995	1,127	630	599,469	29,775	643,996	<i>Trade Receivables</i>
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	--	--	--	217,741	--	217,741	<i>Accrued Income</i>
Piutang Lain-lain	--	--	--	5,797	--	5,797	<i>Other Receivables</i>
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	3,464	423,263	426,727	<i>Other Non-Current Financial Assets</i>
Jumlah	12,995	1,127	630	1,063,647	453,038	1,531,437	Total

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2019			Belum Jatuh Tempo dan tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Yet Due and Not Impaired Rp	Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired Rp	Jumlah/ Total Rp	
	Lewat Jatuh Tempo tetapi tidak Mengalami Penurunan Nilai / <i>Overdue But not Impaired</i>						
	0 - 30 hari / days Rp	31 - 90 hari / days Rp	> 90 hari / days Rp				
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas dan Bank	--	--	--	361,534	--	361,534	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha	3,424	2,513	4,499	601,350	29,559	641,345	Trade Receivables
Pendapatan yang Harus Masih Harus Diterima	--	--	--	209,232	--	209,232	Accrued Income
Piutang Lain-lain	--	--	--	11,887	--	11,887	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	3,531	423,263	426,794	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	3,424	2,513	4,499	1,187,534	452,822	1,650,792	Total

Atas saldo yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup mencatat cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha masing-masing sebesar Rp29.775 dan Rp29.559 (Catatan 4), serta piutang lain-lain yang direstrukturisasi Rp423.263 (Catatan 12).

For amount due in December 31, 2020 dan 2019 the Group has recorded allowance for impairment loss of trade receivable amounting to Rp29,775 and Rp29,559 (Note 4), respectively, and restructured other receivables amounted to Rp423,263 (Note 12).

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Liquidity Risk

At present the Group expects to pay all liabilities at their contractual maturity. In order to meet such cash commitments, the Group expects its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group holds liquid financial assets and available to meet liquidity needs.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dari liabilitas keuangan. Jumlah liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan dalam satu tahun sejak 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.085.586 dan Rp871.015 serta liabilitas keuangan yang pembayarannya diharapkan lebih dari satu tahun sejak 31 Desember 2020 dan 2019 (sebelum dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi) adalah masing-masing sebesar Rp6.723.448 dan Rp6.748.238.

The Group manages liquidity risk by monitoring projections of actual cash flow continuously and supervises the maturity of its financial liabilities. Total financial liabilities with expected payments within one year are Rp1,085,586 and Rp871,015 as of December 31, 2020 and 2019, respectively, and those that are due for payments more than one year as of December 31, 2020 and 2019 (before deduction of unamortized transaction costs) are Rp6,723,448 and Rp6,748,238, respectively.

Risiko Pasar

(i) Risiko Tingkat Bunga

Grup terekspos risiko perubahan tingkat bunga terutama menyangkut pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga mengambang. Grup mengelola risiko tersebut dengan melakukan transaksi *swap* dan opsi tingkat bunga (Catatan 12).

Market Risk

(i) Interest Rate Risk

The Group is exposed to interest rate risk which mainly related to its long-term loans that bears floating interest rate. The Group managed the interest rate risk by entered into interest rate swap and option transactions (Note 12).

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

The following table presents an analysis of financial liabilities by type of interest:

	2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Tanpa Bunga	225,576	198,184	Non-Interest Bearing
Bunga Mengambang	7,256,763	7,421,069	Floating Interest Bearing
Bunga Tetap	326,695	--	Fixed Interest Bearing
Jumlah Liabilitas Keuangan	7,809,034	7,619,253	Total Financial Liabilities

Analisa sensitivitas:

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika suku bunga mengambang pada tanggal tersebut lebih tinggi sebanyak 10 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk tahun berjalan akan lebih rendah sebesar Rp7.256.

Sensitivity analysis:

As of December 31, 2020, if the floating interest rate at that date were to be higher by 10 basis point, with all variable remain constant, the consolidated income before tax would be lower by Rp7,256.

Sebaliknya, jika pada tanggal 31 Desember 2020, jika suku bunga mengambang pada tanggal tersebut lebih rendah sebanyak 10 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk tahun berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp7.256.

As of December 31, 2020, if the floating interest rate at that date were to be lower by 10 basis point, with all variable remain constant, the consolidated income before tax would be higher by Rp7,256.

(ii) Risiko Valuta Asing

Grup terekspos risiko valuta asing terutama menyangkut pinjaman jangka panjang dan bunganya. Grup mengelola risiko tersebut dengan melakukan transaksi swap dan opsi selisih kurs (Catatan 12).

(ii) Foreign Currency Risks

The Group is exposed to foreign currency risk which mainly related to its long-term loans and its interest. The Group managed the foreign currency risk by entered into cross currency swap and option transactions (Note 12).

(iii) Risiko Harga

Grup tidak memiliki risiko harga pasar karena tidak memiliki aset atau liabilitas keuangan yang diperdagangkan di pasar.

(iii) Price Risks

The Group has no price risk as it has no financial assets or liabilities which are traded at the market.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Jumlah tercatat untuk kelompok aset dan liabilitas keuangan jangka pendek, instrumen derivatif maupun yang tidak ditentukan jatuh temponya, telah mencerminkan nilai wajarnya. Sedangkan jumlah tercatat untuk pengukuran nilai wajar tagihan dan utang derivatif diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian dengan input porsi yang dapat diobservasi (Tingkat 2).

b. Fair Value of Financial Instruments

The carrying amount for group of short-term financial assets and liabilities, derivative instrument or with indefinite period, have reflected their fair value. Whereas the carrying amount for measurement of derivative receivable and payable is estimated by using valuation techniques with observable input portions (Level 2).

Investasi dalam instrumen ekuitas, yaitu obligasi wajib konversi, yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan Diukur Melalui Penghasilan Komprehensif Lain, diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Investments in unlisted equity instruments, i.e. mandatory convertible bonds, that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are also classified as Financial Assets Measured Through Other Comprehensive Income, measured at fair value where the changes in fair value are recognized in other comprehensive income.

31. Segmen Operasi

Segmen Operasi:

Grup hanya menghasilkan satu jenis jasa yang signifikan, yang tidak memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses, klasifikasi pelanggan dan distribusi jasa (Catatan 22).

Wilayah Geografis:

Seluruh menara dan sarana penunjang Grup berlokasi dan beroperasi di Indonesia.

Pelanggan Utama:

Terdapat beberapa pelanggan eksternal tunggal dengan nilai transaksi pendapatan melebihi 10% pendapatan konsolidasian. Pelanggan-pelanggan tersebut telah diungkapkan secara rinci pada Catatan 22.

31. Operating Segment

Operating Segment:

The Group only produces one type of service significantly, which does not have different characteristics in the process, customer classification and distribution services (Note 22).

Geographical Areas:

All of the Group's towers and supporting equipment are located and operating in Indonesia.

Major Customers:

There are some single external customer revenue transactions with a value exceeding 10% of consolidated revenues. Those customers have been disclosed in detail in Note 22.

32. Perjanjian dan Perikatan Signifikan

a. Piutang dan Utang Derivatif

Pada bulan Maret 2018, Perusahaan melakukan restrukturisasi atas keseluruhan perjanjian lindung nilai dan juga menandatangani kontrak yang baru yang bertujuan untuk melakukan lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman sehubungan dengan penarikan pinjaman bank sindikasi baru dalam rangka *refinancing* atas utang bank sindikasi dan pelunasan utang obligasi yang dilakukan pada bulan Maret 2018.

Restrukturisasi dan perjanjian lindung nilai baru yang dilakukan di bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut:

- Melakukan terminasi atas keseluruhan perjanjian tanggal 16 Februari 2015 untuk *swap* tingkat bunga dan selisih kurs dengan Standard Chartered Bank.
- Pada tanggal 29 Maret dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru *swap* tingkat bunga dengan Standard Chartered Bank, dengan nilai kontrak sebesar Rp225.000 dan Rp150.000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga JIBOR dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 17).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018.

32. Significant Agreements and Commitments

a. Derivative Receivables and Payables

On March 2018, the Company has restructured all its hedging agreements and signed new agreement in order to hedge the payment of loan principal and loan interest of new syndicated bank loan and to refinance the previous syndicated bank loan and bonds repayment on March 2018.

The restructuring and new hedging agreement that have been done in March 2018 are as follow:

- Termination of full contract of interest rate and foreign exchange swap contracts dated February 16, 2015 with Standard Chartered Bank.
- On March 29 and July 24, 2018, the Company signed new interest rate swap contract with Standard Chartered Bank, with contract amount at Rp225,000 and Rp150,000. This derivative instrument is used to mitigate the risk of JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 17).

The terms of this hedging transaction are as follows:

- Trading date is March 29, 2018 and July 24, 2018.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

- Tanggal efektif adalah 27 Maret 2018 dan 22 September 2018.
 - Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
 - Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
 - Standard Chartered Bank adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan JIBOR.
- Pada tanggal 28 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru *swap* dan opsi tingkat bunga dan selisih kurs dengan JP Morgan Chase Bank N.A. dengan total nilai pertukaran sebesar USD276,210,000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko selisih kurs dan tingkat bunga dari fasilitas pinjaman bank sindikasi USD (Catatan 17).

Ketentuan transaksi *swap* tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 28 Maret 2018.
 - Tanggal efektif adalah 22 dan 23 Maret 2020.
 - Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
 - Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
 - JP Morgan Chase Bank, N.A. adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR.
- Pada tanggal 28 Maret, 29 Maret dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru *swap* tingkat bunga dan selisih kurs dengan MUFG Bank, Ltd. (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.), dengan nilai kontrak sebesar USD5,197,500, Rp200.000 dan Rp609.750. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga LIBOR dan JIBOR dan selisih kurs dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 17).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 28 Maret, 29 Maret dan 24 Juli 2018.
- Tanggal efektif adalah 29 Maret 2018, 3 April 2018 dan 24 September 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 23 Maret 2020 dan 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.

- *Effective date is March 27, 2018 and September 22, 2018.*
- *Closing date is February 27, 2023.*

- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *Standard Chartered Bank is the payer of floating interest rate based on JIBOR.*

- *On March 28, 2018, the Company has signed new contract on interest swap and options with JP Morgan Chase Bank N.A amounted at USD276,210,000. This derivatives instrument is entered to mitigate the risk of foreign exchange and interest rate fluctuation related to the USD syndicated bank loan facilities (Note 17).*

The term of the swap transactions entered above are as follows:

- *Trading date is March 28, 2018.*
- *Effective dates are March 22 and 23, 2020.*
- *Closing date is February 27, 2023.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *JP Morgan Chase Bank, N.A is the payer of floating interest rate based on LIBOR.*

- *On March 28, March 29 and July 24, 2018 the Company signed an interest rate and foreign exchange swap agreement with MUFG Bank, Ltd. (formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.), with contracts value amounted to USD5,197,500, Rp200,000 and Rp609,750. This derivative instrument is used to mitigate the risk of LIBOR and JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 17).*

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading dates are March 28, March 29 and July 24, 2018.*
- *Effective dates are March 29, April 3 and September 24, 2018.*
- *Closing dates are March 23, 2020 and February 27, 2023.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*

- MUFG Bank Ltd. adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR dan JIBOR.
- Pada tanggal 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian baru swap tingkat bunga dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.100.000 dan Rp750.000. Instrumen derivatif ini ditempatkan dalam rangka mengurangi risiko fluktuasi suku bunga JIBOR dari pinjaman bank sindikasi baru (Catatan 17).

Ketentuan transaksi lindung nilai ini adalah sebagai berikut:

- Tanggal perdagangan adalah 29 Maret 2018 dan 24 Juli 2018.
- Tanggal efektif adalah 27 Maret 2018 dan 22 September 2018.
- Tanggal pengakhiran adalah 27 Februari 2023.
- Perusahaan adalah sebagai pembayar tingkat bunga tetap per tahun.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebagai pembayar tingkat bunga mengambang berdasarkan JIBOR.

Instrumen derivatif ini diklasifikasikan sebagai lindung nilai arus kas dan memenuhi syarat kriteria akuntansi lindung nilai. Oleh karena itu, nilai wajar instrumen derivatif diakui dan dicatat pada liabilitas keuangan tidak lancar lainnya sebesar Rp13.613 pada tanggal 31 Desember 2020 dan aset keuangan tidak lancar lainnya (Catatan 12) sebesar Rp43.353 pada tanggal 31 Desember 2019. Perubahan nilai wajar dicatat sebagai bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas dan diakui pada penghasilan komprehensif lain.

b. Perjanjian Sewa

Grup memiliki perjanjian sewa dengan para pelanggan sebagai berikut:

1. PT Bakrie Telecom Tbk (BTCL)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 dan 2013, Grup dan BTCL menandatangani perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa menara BTS milik Grup. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

- *MUFG Bank Ltd. is the payer of floating interest rate based on LIBOR and JIBOR.*

- *On March 29, 2018 and July 24, 2018, the Company signed new interest rate swap contract with PT Bank CIMB Niaga Tbk, with contract amount at Rp1,100,000 and Rp750,000. This derivative instrument is used to mitigate the risk of JIBOR interest rate fluctuation of new syndicated bank loan (Note 17).*

The terms of this hedging transaction are as follows:

- *Trading date is March 29, 2018 and July 24, 2018.*
- *Effective date is March 27, 2018 and September 22, 2018.*
- *Closing date is February 27, 2023.*
- *The Company is the payer of fixed interest rate per annum.*
- *PT Bank CIMB Niaga Tbk is the payer of floating interest rate based on JIBOR.*

These derivative instrument is classified as cash flow hedge and qualified for the criteria of hedge accounting. Therefore, the fair value of derivative is recognized and recorded under other non-current financial liabilities amounted to Rp13,613 as of December 31, 2020 and other non-current financial assets (Note 12) amounted to Rp43,353 as of December 31, 2019. The changes in fair value is recorded as effective portion of loss on hedging instrument in order of cash flow hedge and is recognized in other comprehensive income.

b. Lease Agreement

The Group has lease agreements with tenants as follows:

1. PT Bakrie Telecom Tbk (BTCL)

On a number of dates between 2007 and 2013, the Group and BTCL signed agreements, as amended several times, regarding the lease of the Group's BTS tower. The agreement is valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 10 November 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan BTEL dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.SusPKPU/204/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat antara BTEL dengan para kreditor terkait, termasuk Grup ("Perjanjian Perdamaian"), dimana utang sewa BTEL kepada Grup akan dibayarkan melalui mekanisme Cash Waterfall, tunai bertahap dan/atau diselesaikan dengan menggunakan obligasi wajib konversi (Catatan 12).

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah mengalihkan sebagian Piutang BTEL sejumlah Rp97.500 kepada pihak ketiga.

Menindak lanjuti Perjanjian Perdamaian, BTEL telah mendapat persetujuan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Pada tanggal 20 September 2016, BTEL menyampaikan Sertifikat asli OWK atas nama PT Solusi Tunas Pratama Tbk / Grup sebagai pelaksanaan Perjanjian Perdamaian berdasarkan Perjanjian Sewa Menara yang telah ada antara Grup dan BTEL.

Pada tanggal 3 April 2017, BTEL dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembatalan OWK atas dasar bahwa Perusahaan tidak menuntut/tidak mengakui haknya atas sebagian OWK yang telah diterbitkan. Setelah dilakukannya Perjanjian Pembatalan Obligasi Wajib Konversi, pada bulan yang sama yaitu April 2017, BTEL kembali menerbitkan Sertifikat asli OWK atas nama Perusahaan dengan nilai OWK yang telah disepakati bersama pada Perjanjian Pembatalan Obligasi Wajib Konversi.

Nilai wajar OWK diestimasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh manajemen pada tanggal 31 Desember 2020 dan KJPP Rao, Yuhai & Rekan, penilai independen, pada tanggal 31 Desember 2019 dengan hasil Nil. Nilai wajar dihitung menggunakan metode Diskonto Arus Kas Bersih untuk pendekatan pendapatan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

On November 10, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted BTEL a Temporary Suspension of Payment (the "TSOP") based on TSOP case No. 59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

On December 9, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated December 8, 2014, made by BTEL and the respective creditors, including Group (the "Settlement Agreement"), which the lease liability of BTEL to Group will be paid through Cash Waterfall mechanism, cash installments and/or settled by mandatory convertible bonds (Note 12).

In December 2015, the Company has transferred partly BTEL receivable of Rp97,500 to a third party.

Following the Temporary Suspension of Payment, BTEL obtained approval to provide the additional capital without right issue by issuance of Mandatory Conversion Bonds (OWK). In September 20, 2016, BTEL has issued original OWK Certificate for PT Solusi Tunas Pratama Tbk / the Group, as part of the Settlement Agreement in accordance with the Tower Leased Agreement between the Group and BTEL.

On April 3, 2017, BTEL and the Company signed the Cancellation Agreement of OWK. That Agreement clarified about the Company not recognize its right of OWK which has been issued. After the Cancellation Agreement of OWK was done, on the same month of April 2017, BTEL issued OWK Certificate in the name of the Company with balance of OWK that has been agree together on this Mandatory Conversion Bonds Cancellation Agreement.

The fair value of OWK estimated by management as of December 31, 2020 and KJPP Rao, Yuhai & Rekan, independent appraiser, as of December 31 2019 with amounted to Nil. Fair value was calculated using Discounted Cash Flows method on income approach.

2. PT First Media Tbk (FM) dan PT Internux (INUX)

Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup dan FM pada tanggal 12 Juli 2010, sebagaimana diubah dengan amandemen terakhir tanggal 1 Oktober 2012, FM sepakat untuk menyewa BTS dari Grup dengan harga sewa sebagaimana disepakati. Jangka waktu Perjanjian adalah 8 (delapan) tahun sejak penandatanganan Berita Acara Sewa. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan addendum tanggal 1 Oktober 2013, disepakati INUX menggantikan FM sebagai penyewa.

Pada bulan Juli 2018, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), entitas anak, menandatangani Perjanjian Pembayaran Sebagian Hutang dengan INUX. Sebagian hutang dari INUX kepada BIT dibayar dengan INUX mengalihkan seluruh Hak Penggunaan Kapasitas Jaringan Intercity dan Kabel Laut Serat Optik senilai Rp70.000.

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus INUX dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana utang sewa INUX kepada Grup akan dibayarkan dengan bertahap selama 10 (Sepuluh) tahun sehingga direklasifikasi dari piutang usaha ke aset keuangan tidak lancar lainnya (Catatan 12).

Berdasarkan surat tertanggal 28 Desember 2018, masing-masing FM dan INUX memberitahukan maksudnya untuk mengakhiri sewa lebih awal dari jangka waktunya, efektif terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018.

Saat ini Perusahaan sedang dalam proses penyelesaian perselisihan dengan FM secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didaftarkan dengan Nomor Registrasi Perkara No. 43071/XII/ARB-BANI/2020 tanggal 2 Desember 2020 dengan Perusahaan sebagai pemohon dan FM sebagai termohon.

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2017, Grup dan Indosat menandatangani beberapa perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk

2. PT First Media Tbk (FM) and PT Internux (INUX)

Based on Lease Agreement of Telecommunication Infrastructure Facility between the Group and FM dated July 12, 2010, as the latest amended on October 1, 2012, FM agreed to lease BTS towers from the Group in accordance with the agreed lease price. The term of the agreement is 8 (eight) years starting from the lease start date (Berita Acara Sewa) and can be extended with consent of both parties. Based on amendment on October 1, 2013, it's agreed that INUX replaced FM as a tenant.

In July 2018, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), a subsidiary, signed a Payment Agreement for Part of Debt with INUX. Part of the debt from INUX to BIT is paid with the Right to Use Intercity Network Capacity and Fiber Optic Sea Cables amounted to Rp70,000.

On September 17, 2018, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted INUX a Temporary Suspension of Payment (PKPU) based on No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, which the lease liability of INUX to the Group will be paid by installment for 10 (ten) years, then reclassified from trade receivables to other non-current financial assets (Note 12).

Based on the letter dated December 28, 2018, each FM and INUX notify their intention to early terminate the lease period, effective as of December 31, 2018.

Currently the Company is in the process of resolving disputes with FM by arbitration through the Indonesian National Arbitration Board which is registered with the Case Registration Number No. 43071/XII/ARB-BANI/2020 dated December 2, 2020 with the Company as the applicant and FM as the respondent.

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

On a number of dates between 2009 and 2017, the Group and Indosat signed agreements, as amended several times, regarding lease of telecommunication

amandemen, mengenai penyewaan perangkat telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pada tahun 2019, BIT dan Indosat menandatangani perjanjian untuk sewa jaringan kabel optik. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2016, Grup dan Telkomsel menandatangani perjanjian sewa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengenai sewa menara milik Grup. Perjanjian-perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smart)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2013, Perusahaan dan Smart menandatangani perjanjian induk, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa menyewa fasilitas infrastruktur telekomunikasi. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun untuk infrastruktur *in building coverage* dan 10 (sepuluh) tahun untuk penyewaan menara terhitung sejak tanggal Berita Acara yang disepakati kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

6. PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

Pada berbagai tanggal antara 2010 dan 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan HCPT, Perusahaan akan menyediakan lokasi dan fasilitas untuk kolokasi pengoperasian peralatan komunikasi HCPT. Perjanjian ini berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun untuk infrastruktur *in building coverage* dan 10-12 (sepuluh – dua belas) tahun untuk penyewaan menara dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pada bulan Juni 2018, BIT mengadakan perjanjian dengan HCPT mengenai penyewaan jaringan serat optik dengan skema *Indefeasible Right to Use* (IRU) dalam rangka fiberisasi site-site HCPT. Perjanjian ini memiliki jangka waktu sepuluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya dengan kesepakatan para pihak.

equipments owned by the Group. This agreement is valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

On 2019, BIT and Indosat signed agreement for lease of fiber optic network. This agreement is valid for 10 (ten) years.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

On a number of dates between 2009 and 2016, the Group and Telkomsel signed lease agreement, as amended several times, regarding the leasing of the Group's BTS towers. These agreements are valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smart)

On a number of dates between 2009 and 2013, the Company and Smart entered into master agreement, as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure facilities. The agreement is valid for 5 (five) years for infrastructure in building coverage and 10 (ten) years for tower lease from the date of Agreed Minutes (Berita Acara) by both parties and can be extended with the consent of both parties.

6. PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)

On a number of dates between 2010 and 2013, the Company entered into agreement with HCPT whereas the Company shall provide locations and facilities to HCPT for the operations of its communication equipments. The agreement is valid for 10 (ten) years for in building coverage infrastructures and 10-12 (ten – twelve) years for tower lease and can be extended with the consent of both parties.

On June 2018, BIT entered an agreement with HCPT regarding lease of fiber optic with Indefeasible Right to Use (IRU) scheme for HCPT's sites. This agreement is valid for ten years since the agreement was signed and can be extended for the next five years with the consent of both parties.

Pada bulan Januari 2020, BIT mengadakan perjanjian dengan HCPT mengenai sewa kapasitas. Perjanjian ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal berakhirnya *Service Order* terakhir.

On January 2020, BIT entered an agreement with HCPT regarding capacity leases. This agreement is valid until the termination date of Service Order.

7. PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Axis Telekom (Axis)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 dan 2014, Grup dan XL mengadakan perjanjian dalam rangka sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

7. PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Axis Telekom (Axis)

On a number of dates between 2009 and 2014, the Group and XL entered into lease agreements of telecommunication infrastructure owned by the Group. Validity of the agreement is 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

Efektif pada tanggal 8 April 2014 (tanggal efektif peleburan), penggabungan usaha Axis (dahulu PT Natrindo Telepon Selular) dan XL telah selesai dilakukan. Untuk itu pada tanggal efektif penggabungan usaha tersebut, XL mengambil alih semua hak, kepemilikan, dan kepentingan termasuk kewajiban-kewajiban perjanjian sehubungan dengan sites yang disewakan/ digunakan oleh Axis (Perjanjian Axis).

Effective as of April 8, 2014 (the effective date of merger), the merger of Axis (formerly PT Natrindo Telepon Seluler) and XL has been completed, therefore upon the effective date of merger, XL take over all rights, title, and interest including obligations and liabilities under any ongoing agreements that Axis has entered in relation to the Company's sites that are leased/used by Axis (Axis Agreements).

Efektif sejak tanggal 1 April 2014, Perusahaan dan XL menyetujui untuk mengalihkan semua Perjanjian Axis (termasuk perjanjian sewa menara antara Perusahaan dengan PT Ericsson Indonesia dan PT Ericsson Indonesia dengan Axis) sehubungan dengan sites yang disewa oleh Axis; dan efektif pada tanggal 1 April 2014, semua kewajiban-kewajiban terkait Perjanjian Axis sebelum tanggal efektif merger akan ditanggung dan dibayar oleh XL.

Effective from April 1, 2014, the Company and XL have agreed to transfer the effectiveness of all Axis Agreements (including tower lease agreement between the Company and PT Ericsson Indonesia and between PT Ericsson Indonesia and Axis) with respect to certain sites previously leased by Axis; and effective as of April 1, 2014, all Axis outstanding liability under Axis Agreement before the effective date of merger shall be borne and paid by XL.

8. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Berdasarkan Perjanjian Sewa No. 022/PKS/EA-STI/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 antara Perusahaan dan STI, STI akan menyewa menara BTS milik Perusahaan dengan kompensasi sebagaimana disepakati. Jangka waktu perjanjian adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal serah terima dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan persetujuan kedua belah pihak.

8. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Based on lease agreement No. 022/PKS/EA-STI/XII/2011 made between the Company and STI dated December 5, 2011, STI agreed to lease BTS towers from the Company with compensation as agreed. The term of the agreement is 5 (five) years starting from the lease commencement date and can be extended for 5 (five) years with the consent of both parties.

9. PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Aset pada tanggal 30 September 2014 antara Perusahaan dengan XL, hak-hak XL

9. PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)

Based on Asset Purchase Agreement dated September 30, 2014 between the Company and XL, XL's rights based on Master Lease

berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk menyewakan space kepada Mitratel dialihkan kepada Perusahaan. Jangka Waktu Perjanjian Sewa Site adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk Jangka Waktu tambahan selama 5 (lima) tahun sesuai kesepakatan dan persetujuan Para Pihak.

Agreement for Tower Infrastructure to lease the space to Mitratel was assigned to Company. The Site Lease Term is 10 (ten) years and can be extended for 5 (five) years additional term based on mutual consent of the Parties.

- 10. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)**
Berdasarkan perjanjian tertanggal 5 September 2020, BIT melakukan perjanjian dengan Telkom perihal pengadaan penyewaan Core FO SKKL Link Ujung Pangkah – Kepuh Bawean. Jangka waktu perjanjian adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengikatan tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2021.

- 10. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)**
Based on agreement dated September 5, 2020, BIT entered an agreement with Telkom regarding the procurement of the Core FO SKKL Link Ujung Pangkah – Kepuh Bawean lease. The term of the agreement is 12 (twelve) months from the signing of the Letter of Engagement dated July 10, 2020 until July 9, 2021.

c. Perjanjian Penting Lainnya

- 1. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Menara BTS dengan PT Sekawan Abadi Prima (SAP)**
Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 dan 2016, sebagaimana dilakukan amandemen terakhir pada Januari 2020, Perusahaan dan SAP, pihak berelasi, menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama Pekerjaan *Site Acquisition* dan/ atau Pekerjaan *Material Civil Mechanical Electrical* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dimana Perusahaan menunjuk SAP sebagai kontraktor Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Perjanjian Pengalihan Menara dengan PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)**
Berdasarkan perjanjian tanggal 10 Januari 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan menara dengan HCPT untuk membeli sejumlah menara sampai dengan 300 menara yang berlaku efektif 31 Desember 2012.
- 3. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pemeliharaan dan Manajemen Akses beserta Keamanan Lahan Infrastruktur Telekomunikasi dengan PT Indah Pratama Abadi (IPA)**
Pada tanggal 25 September 2018 telah dilakukan Penandatangan Perjanjian Pemeliharaan antara Perusahaan dan IPA,

c. Other Significant Agreements

- 1. BTS Tower Development Cooperation Agreement with PT Sekawan Abadi Prima (SAP)**
On several dates between 2008 and 2016, as latest amended on January 2020, the Company and SAP, a related party, signed Master Agreement of Site Acquisition and/ or Material Civil Mechanical Electrical Work for Telecommunication Equipment Placement wherein the Company appointed SAP as a contractor of the Company. This agreement is valid for 1 (one) year and can be extended with the consent of both parties.
- 2. Tower Transfer Agreement with PT Hutchison 3 Indonesia (HCPT)**
Based on agreement dated January 10, 2013, the Company entered into tower transfer agreement with HCPT to purchase certain towers up to 300 towers, which effective on December 31, 2012.
- 3. Cooperation Agreement of Maintenance, Access Management and Security Services of Telecommunication Infrastructure Work with PT Indah Pratama Abadi (IPA)**
On September 25, 2018 a Maintenance Agreement was signed between the Company and IPA, the Company has appointed IPA to

Perusahaan menunjuk IPA untuk melakukan jasa pemeliharaan sesuai dengan syarat ketentuan dan harga yang diatur dalam Perjanjian.

perform maintenance services with term and conditions, and certain prices as stipulated in the agreement.

4. Perjanjian Pembelian Aset dengan PT XL Axiata Tbk (XL)

Pada tanggal 30 September 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian aset dengan XL sebanyak 3.500 menara dengan harga pembelian Rp5.600 dan Perusahaan setuju untuk menyewakan kembali menara tersebut kepada XL sejak penutupan transaksi tanggal 23 Desember 2014.

4. Asset Purchase Agreement with PT XL Axiata Tbk (XL)

On September 30, 2014, the Company entered into asset purchase agreement with XL of 3,500 towers with purchase price of Rp5,600 and the Company agreed to lease back the towers to XL starting from the closing dated December 23, 2014.

5. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dengan PT Harapan Utama Prima (HUP)

Berdasarkan Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dengan HUP tanggal 29 September 2017. Perusahaan menunjuk HUP untuk melakukan jasa pemeliharaan infrastruktur menara telekomunikasi.

5. Cooperation Agreement on Infrastructure Maintenance of Telecommunication Tower with PT Harapan Utama Prima (HUP)

Based on Cooperation Agreement on Infrastructure Maintenance of Telecommunication Tower with HUP dated September 29, 2017. The Company appoints HUP to maintain the service of telecommunication tower infrastructure.

6. PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)

Pada bulan Maret 2017, Perusahaan dan ICON+ menandatangani kontrak payung mengenai kerjasama pemanfaatan sarana telekomunikasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

6. PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)

On March 2017, the Company signed the Framework Contract with ICON+ regarding coordination of establishment the usage of telecommunication infrastructures that is owned by each parties

Selanjutnya bulan Agustus 2018, BIT dan ICON+ menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pembangunan Jaringan Fiber Optik dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disepakati bersama.

Subsequently on August 2018, BIT signed a Cooperation Agreement on Provision and Development of Optical Fiber Networks with terms and conditions as mutually agreed.

33. Komitmen Pendapatan Sewa Operasi

33. Operating Income Lease Commitment

Pada akhir periode pelaporan, estimasi jumlah pendapatan sewa minimum di masa depan yang dilakukan dengan sewa operasi adalah sebagai berikut:

At the end of the reporting period, the estimate of total future minimum lease income committed under operating leases are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Kurang dari Satu Tahun	1,870,132	1,733,497	Not Later than One Year
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	6,025,720	6,057,372	More than One Year and not Later than Five Years
Lebih dari Lima Tahun	937,754	610,066	Later than Five Years
Pendapatan Sewa Tahun Berjalan	1,922,151	1,767,050	Rental Income for the Year

34. Pengelolaan Permodalan

Tujuan Grup ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Grup memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas. Rasio dihitung dengan membagi pinjaman bersih dengan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pinjaman bersih dihitung dengan mengurangi jumlah pokok pinjaman bank sindikasi dan utang obligasi (bagian pinjaman dalam mata uang asing diukur menggunakan kurs lindung nilainya (Catatan 17)) dengan kas dan bank.

Rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Pokok Pinjaman Diukur dengan Kurs Lindung Nilai	6,848,691	7,052,210
Dikurangi:		
Kas dan Bank	(237,176)	(361,534)
Pinjaman Bersih	6,611,515	6,690,676
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3,644,648	2,973,516
Rasio Pinjaman Bersih terhadap Ekuitas	1.81	2.25

34. Capital Management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern whilst seeking to maximize benefits to shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Group, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Group monitors capital on the basis of the Group's net debt to equity ratio. The ratio is calculated as net debt divided by total equity attributable to owners of the parent. Net debt is calculated as total principal of syndicated bank loan and bond payable (the portion of foreign currency loan is valued using its hedging rate (Note 17)) less cash on hand and in banks.

The net debt to equity ratio as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Principal Loan Using with Hedging Rate
Less:
Cash on Hand and in Banks
Net Borrowings
Total Equity Attributable to Owners of the Company
Net Debt to Equity

35. Transaksi Nonkas

35. Non-Cash Transactions

a. Transaksi Non-Kas

Berikut aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

	2020 Rp	2019 Rp	
Penambahan aset tetap yang masih terutang	115,967	81,068	Addition of property and equipment unpaid
Penambahan aset tetap yang berasal dari uang muka	737	1,151	Addition of property and equipment from advance
Pembayaran sewa lahan	--	4,999	Payments For Land Lease
Penambahan aset takberwujud yang berasal dari uang muka	--	4,865	Addition of intangible assets from advance

a. Non-Cash Transactions

The followings are investing and financing activities not affecting cash flows:

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

b. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

	Saldo Awal / Beginning	Dampak Penerapan / Application of PSAK 73	Arus kas / Cash Flows	Perubahan Non-Kas / Non-Cash Penambahan / Additional	Pergerakan Valuta Asing / Foreign Exchange Movement	Amortisasi / Amortization	Saldo Akhir / Ending
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
31 Desember / December 31, 2020							
Utang Bank Sindikasi Jangka Pendek / Short-Term Syndicated Bank Loans	300,000	--	150,000	--	--	--	450,000
Utang Bank Sindikasi Berjangka / Syndicated Term Bank Loans	6,958,477	--	(401,266)	--	86,960	47,685	6,691,856
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	--	447,476	(267,363)	146,582	--	--	326,695
Jumlah / Total	7,258,477	447,476	(518,629)	146,582	86,960	47,685	7,468,551
31 Desember / December 31, 2019							
Utang Bank Sindikasi Jangka Pendek / Short-Term Syndicated Bank Loans	360,000	--	(60,000)	--	--	--	300,000
Utang Bank Sindikasi Berjangka / Syndicated Term Bank Loans	7,356,829	--	(263,188)	--	(179,814)	44,650	6,958,477
Jumlah / Total	7,716,829	--	(323,188)	--	(179,814)	44,650	7,258,477

36. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

36. Events After Reporting Period

- Berdasarkan Keputusan Pengganti Rapat Direksi tanggal 5 Maret 2021, Perusahaan melakukan perubahan Sekretaris Perusahaan yang sebelumnya dijabat oleh Juliawati Gunawan, digantikan oleh Antonius Ardityo Budi Susetiatmo dan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- On January 2021, PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), a subsidiary, received the tax assessment letter of Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Income Tax article 21, Income Tax article 23 and Income Tax article 4 (2). Upon the issuance date of the consolidated financial statement, the result of assessment is not yet received by BIT.

- Pada bulan Februari 2021, hasil keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 tahun 2015 menyatakan ditolak dan pada bulan Maret 2021, Perusahaan telah mengajukan banding atas hasil keberatan tersebut. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, hasil banding belum diterima Perusahaan.

- On February 2021, the result of objection of Tax Underpayment Assessment for Income Tax article 26 was rejected and the Company has filled the appeal of this objection on March 2021. Upon the issuance date of the consolidated financial statements, the result of appeal is not yet received by the Company.

37. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

37. Standard and Interpretations Issued not Yet Adopted

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the current period.

Amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted is:

- PSAK 73 (Amendemen 2020): "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19".

- PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

The following are new standard and amendment to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2021 with early adoption is permitted:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): "Akuntansi Sukuk";
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): "Akuntansi Wa'd"; dan Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2".

- PSAK 112: "Accounting for Endowments";
- PSAK 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business";
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): "Accounting for Wa'd"; and Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding "Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2".

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

- Amendments PSAK 22: "Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks";
- Amendments PSAK 57: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts – Contract Fulfillment Costs".

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi".

- PSAK 74 "Insurance Contract"

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amandemen standar tersebut.

Until the date of the consolidated financial statements being authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards and amendments these standards.

38. Informasi Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes equity, and statement of cash flows for the year then ended, and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

39. Tanggung Jawab dan Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 22 April 2021.

39. Responsibility and Authorisation of Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements. The consolidated financial statements has been authorised for issuance by the Directors on April 22, 2021.

Lampiran I

Appendix I

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)**

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)**

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2020 and 2019

(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	219,201	331,265	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	595,678	594,176	Trade Receivables - Third Parties
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	92,077	134,761	Accrued Income
Piutang Lain-lain	349,025	202,913	Other Receivables
Persediaan	1,499	1,191	Inventory
Pajak Dibayar di Muka	152,595	185,360	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	63,806	242,734	Advances and Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar	1,473,881	1,692,400	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka - Setelah Dikurangi Bagian Lancar	20,801	721,604	Advances and Prepaid Expenses - Net of Current Portion
Investasi pada Entitas Anak	1,211,188	1,211,188	Investment in Subsidiaries
Aset Tetap	8,001,623	7,413,495	Property and Equipment
Aset Hak Guna	1,114,810	--	Right of Use Assets
Aset Takberwujud	7,425	9,067	Intangible Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	3,278	46,719	Other Non-Current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	37	41	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	10,359,162	9,402,115	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	11,833,043	11,094,515	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Trade Payables
Pihak Berelasi	29	6,794	Related Party
Pihak Ketiga	3,610	2,409	Third Parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	44,964	30,527	Other Current Financial Liabilities
Utang Pajak	51,106	6,588	Taxes Payable
Akrual	132,311	143,339	Accruals
Pendapatan Ditangguhkan	573,241	662,378	Deferred Income
Bagian Lancar atas Liabilitas Sewa	16,399	--	Current Portion of Lease Liability
Utang Bank Sindikasi			Syndicated Bank Loan
Utang Bank Jangka Pendek	450,000	300,000	Short-Term Bank Loan
Bagian Lancar atas Utang Bank	376,064	372,831	Current Portion of Long-Term
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,647,724	1,524,865	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	202,055	--	Long-Term Portion of Lease Liability
Utang Bank Sindikasi Berjangka	6,315,792	6,585,646	Syndicated Term Bank Loans
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	40,094	27,834	Long-Term Employment Benefits Liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	13,613	--	Other Non-Current Financial Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6,571,554	6,613,480	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	8,219,278	8,138,345	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per Saham			Share Capital - Rp100 Par Value per Share
- Modal Dasar - 2.000.000.000 Saham			- Authorized Capital - 2,000,000,000 Shares
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.137.579.698 Saham	113,758	113,758	- Issued and Paid-Up Capital - 1,137,579,698 Shares
Tambahan Modal Disetor - Bersih	3,589,495	3,589,495	Additional Paid-in Capital - Net
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(593,361)	(493,709)	Other Comprehensive Income
Saldo Laba (Defisit)	503,873	(253,374)	Retained Earning (Deficit)
JUMLAH EKUITAS	3,613,765	2,956,170	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11,833,043	11,094,515	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran II

Appendix II

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)
STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (In millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
PENDAPATAN	1,686,352	1,561,037	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN			COST OF REVENUES
Penyusutan dan Amortisasi	(349,338)	(277,752)	Depreciation and Amortization
Beban Pokok Pendapatan Lainnya	(71,500)	(67,743)	Other Cost of Revenues
Jumlah	(420,838)	(345,495)	Total
LABA BRUTO	1,265,514	1,215,542	GROSS PROFIT
Beban Usaha			Operating Expenses
Penyusutan dan Amortisasi	(21,941)	(20,993)	Depreciation and Amortization
Beban Usaha Lainnya	(120,826)	(113,255)	Other Operating Expenses
Jumlah	(142,767)	(134,248)	Total
LABA USAHA	1,122,747	1,081,294	OPERATING PROFIT
Penghasilan Bunga	18,837	12,628	Interest Income
Beban Keuangan			Financial Charges
Beban Bunga	(420,076)	(523,919)	Interest Expense
Beban Keuangan Lainnya	(381,161)	(331,966)	Other Financial Charges
Kenaikan Nilai dari			Incline in Value of
Revaluasi Aset Tetap	471,485	200,444	Revaluation of Property and Equipment
Beban Lain-lain - Neto	(43,837)	(143,978)	Other Expense - Net
LABA SEBELUM PAJAK	767,995	294,503	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	(10,748)	(12,099)	Income Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	757,247	282,404	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(3,480)	(731)	Remeasurement of Defined Benefits Plan
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	6	1	Income Tax of Remeasurement of Defined Benefits Plan
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			Items that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss
Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen Lindung			Effective Portion of Loss on Hedging
Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas	(96,178)	(125,741)	Instrument Related with Cash Flow Hedge
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(99,652)	(126,471)	Total Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	657,595	155,933	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In millions Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company									
Modal/ Saham/ Share Capital	Tambahan		Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income			Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
	Modal Disetor - Bersih/ Additional Paid-in Capital - Net		Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas/ Effective Portion of Loss on Hedging Instrument Related with Cash Flow Hedge	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefits Plan		Yang Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Yang Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
113,758	3,589,495	(373,458)	6,220	22,900	(558,678)	2,800,237			
--	--	(125,741)	(730)	--	282,404	155,933			
113,758	3,589,495	(499,199)	5,490	22,900	(276,274)	2,956,170			
--	--	(96,178)	(3,474)	--	757,247	657,595			
113,758	3,589,495	(595,377)	2,016	22,900	480,973	3,613,765			

SALDO PADA TANGGAL 1 JANUARI 2019 /
BALANCE AS OF JANUARY 1, 2019

Perubahan Ekuitas pada Tahun 2019 /

Movements in Equity in 2019

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan /
Total Comprehensive Income for the Year

SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 /
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019

Perubahan Ekuitas pada Tahun 2020 /

Movements in Equity in 2020

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan /
Total Comprehensive Income for the Year

SALDO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 /
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020

Lampiran V

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)**

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

	2020 Rp	2019 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1,747,851	1,952,136
Pembayaran kepada Pemasok dan Lainnya	(328,882)	(77,582)
Pembayaran kepada Manajemen dan Karyawan	(89,091)	(85,824)
Penerimaan Bunga	45,789	31,924
Penerimaan Restitusi Pajak	24,837	35,119
Pembayaran Pajak Penghasilan	(59,907)	(37,089)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>1,340,597</u>	<u>1,818,684</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tetap	(279,062)	(255,295)
Penambahan Aset Takberwujud	(1,556)	(6,880)
Pembayaran Sewa Lahan	--	(214,305)
Uang Muka Konstruksi	--	(2,220)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(280,618)</u>	<u>(478,700)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Liabilitas Sewa	(232,007)	--
Transaksi Utang Sindikasi		
Penerimaan	1,050,000	400,000
Pembayaran	(1,301,266)	(723,188)
Pembayaran Beban Keuangan	(692,860)	(805,560)
Penerimaan dari Entitas anak	5,065	33,207
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(1,171,068)</u>	<u>(1,095,541)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(111,089)	244,443
DAMPAK SELISIH KURS PADA KAS DAN BANK	(975)	576
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	331,265	86,246
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u>219,201</u>	<u>331,265</u>

Appendix V

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)**

OTHER DISCLOSURES

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash Received from Customers
Payment to Suppliers and Others
Payments for Management and Employees
Interest Received
Receipts from Tax Refund
Cash Paid For Income Tax
Net Cash Provided by Operating Activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Addition of Property and Equipment
Addition of Intangible Assets
Payments For Land Lease
Advances for Construction
Net Cash Used in Investing Activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Payments For Lease Liabilities
Syndicated Loan Transactions
Proceeds
Payments
Payment of Financial Charges
Receipt from Subsidiaries
Net Cash Used in Financing Activities

**NET INCREASE (DECREASE) IN
CASH ON HAND AND IN BANKS**

**EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE
ON CASH ON HAND AND IN BANKS**

**CASH ON HAND AND IN BANKS
AT BEGINNING OF YEAR**

**CASH ON HAND AND IN BANKS
AT END OF YEAR**

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Entitas Induk)

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(Parent Entity)

OTHER DISCLOSURES

For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (In Full Rupiah)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

1. Separate Financial Statements

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

Statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company is a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

**2. Daftar Investasi pada Entitas Anak
 Dengan Kepemilikan Langsung**

**2. Schedule of Investment in Subsidiaries
 with Direct Ownership**

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Sarana Inti Persada	Bandung	99.87%
PT Platinum Teknologi	Jakarta	99.99%
Pratama Agung Pte. Ltd.	Singapura	100%

3. Metode Pencatatan Investasi

3. Method of Investment Recording

Investasi pada entitas anak dengan kepemilikan langsung sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Investment in subsidiaries with direct ownership as mentioned in the financial statements of parent entity is recorded using cost method.